PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN JEPARA

TAHUN
2024

Seni Ukir

Pantai Kartini

Karimunjawa

Kain Tenun

Tugu Kartini

Kerajinan Monel

Pindang Serani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 19

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 239

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 246

2.1 Capaian Kinerja Makro 246

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintahan 246

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 285

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 334

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima 334

Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Penugasan) 344

1. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diterima 346
2. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan (Penugasan)..... 361

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 363

BAB V PENUTUP 446

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keterangan Reviu APIP
2. Indikator Kinerja Kunci Outcome
3. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat alokasi anggaran.
4. SK Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertangungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kepada Masyarakat. Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance.*

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman penyusunan LPPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri atas, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan

dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara Trus Karya Tataning Bumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, 20 Maret 2025

BUPATI JEPARA

H. WITIARSO UTOMO, S,E.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara. 2023 / Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2023);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2023)

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 nomor 23);
20. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 224 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Data Geografis Wilayah Kab. Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Secara geograis, Kabupaten Jepara terletak berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dengan geografis seperti itu, Kabupaten Jepara memiliki wilayah pantai yang cukup panjang. Secara Topografis, Kabupaten Jepara yang merupakan daerah kawasan utara Jawa ini dibagi dalam empat (4) wilayah yaitu : wilayah pantai di bagian tengah dan selatan, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari gunung Muria serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan rangkaian kepulauan Karimunjawa.

Dengan kontur wilayah tersebut, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), dengan daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0–2 m

dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0–1.301 m dpl yang merupakan perbukitan.

Tabel
Data Ketinggian dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Ketinggian	
1.	Kedung	0 - 2	mdpl
2.	Pecangaan	2 - 17	mdpl
3.	Welahan	2 - 7	mdpl
4.	Mayong	13 - 438	mdpl
5.	Batealit	68 - 378	mdpl
6.	Jepara	0 - 50	mdpl
7.	Mlonggo	0 - 300	mdpl
8.	Bangsri	0 - 594	mdpl
9.	Keling	0 - 1.301	mdpl
10.	Karimunjawa	0 - 100	mdpl
11.	Tahunan	0 - 46	mdpl
12.	Nalumsari	13 - 736	mdpl
13.	Kalinyamatan	2 - 29	mdpl
14.	Kembang	0 - 1.000	mdpl
15.	Pakis Aji	0 - 1.000	mdpl
16.	Donorojo	0 - 619	mdpl
Kabupaten Jepara		**0 - 1.301**	**mdpl**

Sumber : Jepara Dalam Angka 2024

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 1020,25 Km2 dengan panjang garis pantai 82,73 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling, yaitu 126,31 Km dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 26,08 Km.

1. Letak Geografis.

   Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah Kabupaten

Tabel Luas Wilayah Kab. Jepara per kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Kedung	45,71	4,48	18
2.	Pecangaan	37,08	3,63	12
3.	Kalinyamatan	25,03	2,45	12
4.	Welahan	29,21	2,86	15
5.	Mayong	70,66	6,93	18
6.	Nalumsari	55,25	5,42	15
7.	Batealit	96,20	9,43	11
8.	Tahunan	42,69	4,18	15
9.	Jepara	27,05	2,65	16
10.	Mlonggo	47,52	4,66	8
11.	Pakis Aji	65,18	6,39	8
12.	Bangsri	90,79	8,90	12
13.	Kembang	118,77	11,64	11
14.	Keling	121,09	11,87	12

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
15.	Donorojo	101,41	9,94	8
16.	Karimunjawa	46,62	4,57	4
	Jumlah	**1.020,25**	**100,00**	**195**

Sumber : Jepara Dalam Angka 2024

Peta Wilayah Kabupaten Jepara

3. Luas Penggunaan Lahan

   Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1020,25 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 121,9 Km dan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 25,03 Km .

   Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

   - lahan sawah/wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.

- bukan lahan sawah/tanah kering/*build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya pertambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan tehnologi.

4. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilyah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 º celcius dan tertinggi pada 33,71 º celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

c. INFORMASI UMUM DATA KEPENDUDUKAN

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, dari total penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2024 yaitu

1.283.687 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 645.757 orang dan perempuan sebanyak 637.930 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEDUNG	42.307	41.789	84.096
2.	PECANGAAN	46.062	45.725	91.787
3.	WELAHAN	41.872	41.174	83.046
4.	MAYONG	49.833	49.466	99.299
5.	BATEALIT	46.458	45.818	92.276
6.	JEPARA	43.169	42.801	85.970
7.	MLONGGO	45.892	44.441	90.333
8.	BANGSRI	53.712	53.202	106.914
9.	KELING	34.277	34.359	68.636
10.	KARIMUNJAWA	5.518	5.282	10.800
11.	TAHUNAN	59.559	58.109	117.668
12.	NALUMSARI	41.509	41.308	82.817
13.	KALINYAMATAN	33.616	33.230	66.846
14.	KEMBANG	37.544	37.683	75.227
15.	PAKISAJI	32.890	32.102	64.992
16.	DONOROJO	31.539	31.441	62.980
JUMLAH		**645.757**	**637.930**	1.283.687
Sumber Data : data kosolidasi bersih (DKB) Tahun 2024 semester 2 dukcapil kemendagri				

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	46.293	43.043	89.336
2.	5-9	51.740	48.748	100.488
3.	10-14	54.065	50.530	104.595
4.	15-19	47.424	46.270	93.694
5.	20-24	51.513	49.961	101.474
6.	25-29	49.386	47.976	97.362
7.	30-34	48.131	46.357	94.488
8.	35-39	47.629	46.467	94.096
9.	40-44	50.044	49.662	99.706
10.	45-49	46.701	46.408	93.109
11.	50-54	39.920	41.116	81.036
12.	55-59	35.137	36.588	71.725
13.	60-64	27.204	29.521	56.725
14.	65-69	20.797	20.385	41.182
15.	70-74	14.085	14.306	28.391
16.	75+	15.688	20.592	36.280
Jumlah		645.757	637.930	1.283.787
Sumber Data : data konsolidasi bersih (DKB) Tahun 2024 semseter 2 dukcapil kemendagri				

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jumlah Kecamatan dan Desa Kab. Jepara Tahun 2024

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	33.20.03	Welahan	15		15
2.	33.20.12	Nalumsari	15		15
3.	33.20.04	Mayong	18		18
4.	33.20.13	Kalinyamatan	12		12
5.	33.20.02	Pecangaan	12		12
6.	33.20.05	Batealit	11		11
7.	33.20.11	Tahunan	15		15
8.	33.20.06	Jepara	5	11	16
9.	33.20.01	Kedung	18		18
10.	33.20.07	Mlonggo	8		8
11.	33.20.15	Pakisaji	8		8
12.	33.20.08	Bangsri	12		12
13.	33.20.14	Kembang	11		11
14.	33.20.16	Donorojo	8		8
15.	33.20.09	Keling	12		12
16.	33.20.10	Karimunjawa	4		4
T O T A L			**184**	**11**	**195**

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016.

Tabel Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO.	Nama Perangkat Daerah	Tipelogi	Dasar Hukum (Perbup Jepara No. ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja .....)

NO.	Nama Perangkat Daerah	Tipelogi	Dasar Hukum (Perbup Jepara No. ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja .....)
1.	Sekretariat Daerah	B	67/2021
2.	Sekretariat DPRD	A	68/2021
3.	Inspetorat Daerah	A	24/2021
4.	Dinas Penddidikan, Pemuda dan Olahraga	A	69/2021
5.	Dinas Kesehatan	B	70/2021
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	71/2021
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	C	72/2021
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A	85/2021
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	73/2021
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	74/2021
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	75/2021
12.	Dinas Lingkungan Hidup	A	76/2021
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	77/2021
14.	Dinas Perhubungan	A	41/2016
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	78/2021
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	79/2021
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	80/2021
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	A	81/2021
19.	Dinas Perikanan	B	82/2021
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A	83/2021
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B	84/2021
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	A	86/2021
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	87/2021
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	18/2023
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perda 2/2022)	A	24/2023
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Instensitas Besar	90/2021
27.	Kecamatan Kedung	A	62/2016
28.	Kecamatan Pecangaan	A	62/2016
29.	Kecamatan Kalinyamatan	A	62/2016
30.	Kecamatan Welahan	A	62/2016

NO.	Nama Perangkat Daerah	Tipelogi	Dasar Hukum (Perbup Jepara No. ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja .....)
31.	Kecamatan Mayong	A	62/2016
32.	Kecamatan Nalumsari	A	62/2016
33.	Kecamatan Batealit	A	62/2016
34.	Kecamatan Tahunan	A	62/2016
35.	Kecamatan Jepara	A	62/2016
36.	Kecamatan Mlonggo	A	62/2016
37.	Kecamatan Pakis Aji	A	62/2016
38.	Kecamatan Bangsri	A	62/2016
39.	Kecamatan Kembang	A	62/2016
40.	Kecamatan Keling	A	62/2016
41.	Kecamatan Donorojo	A	62/2016
42.	Kecamatan Karimunjawa	A	62/2016

F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan	18	36	51	105
2	Sekretariat DPRD	Urusan Pemerintahan	8	4	23	35
3	Inspektorat	Fungsi Pengawasan	8	32	22	47
4	Satpol PP dan Damkar	Urusan Pemerintahan	8	30	22	60
5	Disdikpora	Urusan Pemerintahan	14	5472	829	6315
6	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan	16	1121	59	1196
7	DPUPR	Urusan Pemerintahan	17	10	75	102
8	Disperkim	Urusan Pemerintahan	7	6	12	25
9	Dinsospermasdes	Urusan Pemerintahan	7	12	9	28
10	DP3AP2KB	Urusan Pemerintahan	8	3	9	20
11	DLH	Urusan Pemerintahan	11	6	43	60
12	Disdukcapil	Urusan Pemerintahan	9	6	24	39
13	Dishub	Urusan Pemerintahan	15	7	37	59
14	Diskominfo	Urusan Pemerintahan	8	7	17	32
15	Diskopukmnakertrans	Urusan Pemerintahan	10	15	14	39
16	DPMPTSP	Urusan Pemerintahan	3	7	10	20
17	Diskarpus	Urusan Pemerintahan	4	13	8	25
18	DKPP	Urusan Pilihan	13	83	23	119
19	Diskan	Urusan Pilhan	10	7	13	30
20	Disparbud	Urusan Pilihan	12	4	16	32
21	Disindag	Urusan Pilihan	12	9	66	87
22	Bappeda	Urusan Pemerintahan	9	16	11	36
23	BPKAD	Urusan Penunjang	8	12	23	43
24	BKD	Urusan Penunjang	6	7	20	33
25	BPBD	Urusan Pemerintahan	4	0	6	10

26	Bakesbangpol	Urusan Pilihan	4	2	7	13
27	RSU RA Kartini		10	550	78	638
28	Kec. Keling		6	0	12	18
29	Kec. Bangsri		8	0	9	17
30	Kec. Kembang		7	0	13	20
31	Kec. Mlonggo		7	0	11	18
32	Kec. Karimunjawa		8	0	15	23
33	Kec. Kedung		8	0	10	18
34	Kec. Tahunan		8	0	9	17
35	Kec. Batealit		6	0	13	19
36	Kec. Pecangaan		8	0	14	22
37	Kec. Kalinyamatan		8	0	10	18
38	Kec. Welahan		8	0	11	19
39	Kec. Nalumsari		9	0	17	26
40	Kec. Mayong		7	0	18	25
41	Kec. Pakis Aji		9	0	8	17
42	Kec. Donorojo		5	0	5	10
43	Kec. Jepara		54	0	13	67
	TOTAL		**425**	**7477**	**1700**	**9602**

bersumber dari BKD Kab. Jepara Tahun 2024

G. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2.491.682.907.077**,- *(Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp. 2.607.689.344.071,-** *(Dua Triliun Enam Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)* **atau 104,66%** dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar **Rp. 497.768.341.144,-** atau **105,21%** dari target sebesar **Rp. 473.118.659.644,-** (naik sebesar **11,5%** dari penerimaan PAD pada tahun 2023 yang tercapai sebesar **Rp. 446.096.656.064,-**). Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

  - ✓ Realisasi Pajak Daerah tercapai sebesar **Rp. 198.253.689.501,-** atau **103,2%** dari target **Rp. 192.122.566.981,-.** (naik **9,7%** dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar **Rp. 180.683.638.144,-**).
  - ✓ Realisasi Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp. 278.252.385.410,- atau 106,1% dari target Rp. 261.886.186.856,- (naik 1.121,1% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar Rp. 22.745.307.136,-).

- ✓ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar Rp. 11.293.642.398,- atau 100% dari target Rp. 11.293.642.397,-. berasal dari penerimaan deviden BUMD lembaga keuangan yaitu Bank Jateng sebesar Rp. 6.431.408.083,- dan BPR BKK Rp. 4.207.351.625,- serta Perumda Aneka Usaha Rp. 654.882.689 (turun 17,3% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar Rp. 13.663.553.883,-).
- ✓ Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar Rp. 9.968.623.835,- atau 127,54% dari target Rp. 7.816.263.410,-. (turun 95,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar Rp. 229.004.156.901,-)

- Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar **Rp. 2.109.171.002.924,-** atau **104,5%** dari target sebesar **Rp. 2.017.814.247.433,-** (naik sebesar **8,4%** dari penerimaan PAD pada tahun 2023 yang tercapai sebesar **Rp. 1.892.483.209.912,-**). Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

  - ✓ Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercapai sebesar **Rp. 1.863.628.947.895,-** atau **105,4%** dari target **Rp. 1.767.084.837.438,-.** (naik **6,9%** dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar **Rp. 1.689.550.439.762,-**).
  - ✓ Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tercapai sebesar Rp. 245.542.055.032,- atau 97,93% dari target Rp. 250729409995,- (naik 21,0% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercapai sebesar Rp. 202.932.770.150,-)
- Realisasi Lain -lain Pendapatan Daerah Yang sah pada Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar **Rp. 750.000.000,-** atau **100%** dari target sebesar **Rp. 750.000.000,-** (turun sebesar **84,0%** dari penerimaan PAD pada tahun 2023 yang tercapai sebesar **Rp. 4.694.000.000,-**). Lain -lain Pendapatan Daerah Yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah

URAIAN PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	**2.491.682.907.077**	**2.607.689.344.071**
Pendapatan Asli	**473.118.659.644**	**497.768.341.144**

Daerah		
➢ Pajak daerah	192.122.566.981	198.253.689.501
➢ Retribusi Daerah	261.886.186.856	278.252.385.410
➢ Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.293.642.397	11.293.642.398
➢ Lain-lain PAD yg sah	7.816.263.410	9.968.623.835
Pendapatan Transfer	**2.017.814.247.433**	**2.109.171.002.927**
➢ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.767.084.837.438	1.863.628.947.895
➢ Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.729.409.995	245.542.055.032
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**750.000.000**	**750.000.000**
➢ Pendapatan Hibah	750.000.000	750.000.000

- Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

  Anggaran Belanja Daerah *Kabupaten* Jepara Tahun 2024 sebesar **Rp. 2.563.589.427.118,-** *(Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp. 2.447.797.224.576,-** *(Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)* **atau 95,48%** dengan rincian Belanja sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
BELANJA DAERAH	**2.534.487.380.917**	**2.431.676.307.800**

BELANJA OPERASI	**1.907.105.618.517**	**1.824.410.105.589**
Belanja Pegawai	972.832.176.687	923.981.817.122
Belanja Barang & Jasa	738.089.913.890	706.442.199.426
Belanja Subsidi	184.086.000	184.086.000
Belanja Hibah	153.151.631.940	151.585.323.041
Belanja Bantuan Sosial	42.847.810.000	42.216.680.000
BELANJA MODAL	**229.063.327.150**	**210.162.398.752**
Belanja Modal Tanah	7.800.000.000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.728.152.759	65.049.862.655
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.790.866.045	55.634.102.147
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.185.930.996	79.145.963.772
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.208.377.350	10.012.790.178
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	350.000.000	319.680.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.044.326.250**	**1.393.576.697**
Belanja Tidak Terduga	2.044.326.250	1.393.576.697
BELANJA TRANSFER	**396.274.109.000**	**395.710.226942**
Belanja Bagi Hasil	25.741.955.000	25.515.872.914
Belanja Bantuan Keuangan	370.532.154.000	370.194.354.000

- Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

  Total Pembiayaan *Daerah* yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

  - Penerimaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp. 71.906.520.041,-** *(Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu*

Empat Puluh Satu Rupiah) dengan Realisasi sebesar **Rp. 71.906.520.041,-** *(Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)* **atau 100%.**

- Pengeluaran Daerah dianggarkan sebesar **0,-** *(nol)* dengan realisasi **Rp 0,-** *(nol)* **atau 0 %,** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PEMBIAYAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan	**71.906.520.041**	**71.906.520.041**
➢ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.906.520.041	51.906.520.041
➢ Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0**
➢ Pembentukan Dana Cadangan	0	0
➢ Penyertaan Modal Daerah	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	**71.906.520.041**	**71.906.520.041**
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	**0**	**231.798.639.536**

H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Anggaran

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung

Urusan Pemerintahan yang memuat anggaran terlampir di belakang IKK Outcome.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan/isu strategis di tahun 2024 didapatkan dari pemetaan permasalahan per urusan, Capaian Indikator Kinerja per urusan dan indikator kinerja makro Daerah, Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun 2024, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2024; serta Rancangan RKP 2024. Adapun isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu. Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih mulai tahun 2019 terjadi pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan.. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Untuk membangunnya ketahanan keluarga yang baik diperlukan kekuatan dari semua komponen termasuk pondasi. Input yang diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga nilai, tujuan, serta sumber daya manusia.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indek pembangunan manusia (73,15 di Tahun 2022 dan menempati urutan ke 18 dari 35 kabupaten/kota), serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,1% di Tahun 2022.

2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang berdaya sehingga diperlukan penguatan dari sisi sosial dan budaya. Guna menghadapi perkembangan masyarakat akibat adanya pembangunan, diperlukan ketahanan sosial dan budaya yang dapat menangkal pengaruh buruk dari luar. Sehingga, karakteristik dan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Jepara tetap terjaga.

3. Perlindungan umat dan kehidupan beragama

Keragaman agama dan kepercayaan merupakan kekayaan kultural yang ada di Kabupaten Jepara. Akan tetapi, keragaman itu juga dapat menimbulkan benturan, kekerasan dan bahkan konflik dalam masyarakat. Kondisi yang ada ini menjadi pertimbangan untuk mengatur perlindungan umat dan kehidupan beragama, agar tetap terbangun kerharmonisan dan kerukuran antar umat beragama.

4. Peningkatan pelestarian kebudayaan

Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk mengenal dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman, budaya asing juga semakin berkembang dan dapat menyebabkan terkikisnya budaya lokal. Hal ini harus diantisipasi dengan meningkatkan pelestarian kebudayaan serta mendorong masyarakat untuk melindungi kearifan lokal.

5. Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan akibat dari adanya pandemi Covid-19, bidang ekonomi juga terkena imbas yang cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya beberapa indikator ekonomi makro daerah, seperti: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95% di Tahun 2022, bahkan sempat menyentuh angka -1,94% di tahun 2020 (sebelum pandemi capaian rata-rata di atas 5%), serta angka

kemiskinan naik cukup tajam menjadi 6,88% di Tahun 2022 (dimana sebelum pandemi sempat menyentuh angka 6,66% di Tahun 2019). Sehubungan dengah hal tersebut, dibutuhkan pengambangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan

   Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadi sesuatu hal mutlak dalam mewujudkan kota yang maju, modern dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang berkualitas, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi sesuai standar, perumahan dan sanitasi yang layak, serta penanganan terkait kebencaan yang responsif. Peningkatan infrastrukur juga perlu diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup sehingga pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan dapat tercapai.

7. Tata kelola pemerintahan yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif.

   Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin masif dalam menunjang kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut pula dibarengi dengan adanya perubahan mindset dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan indikator yang jelas dan akuntabel akan sangat berguna dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

8. Pelaksanaan Pilkada serentak yang demokratis.

   Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Dalam praktiknya, Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk menertibkan serta menjaga kondisivitas wilayah agar pilkada 2024 dapat berjalan secara demokratis, lancar, dan kondusif.

B. Visi Misi Kepala Daerah

Visi Misi ini merupakan Visi Misi Kepala Daerah periode 2017-2022 Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu ***"Trus Karya Tataning Bumi"***yang artinya terus bekerja keras membangun daerah*,* diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah : "***Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan BerdayaSaing"***

MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Akan tetapi pada Tahun 2022 Kabupaten Jepara di pimpin oleh Penjabat Bupati sehingga Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis menggunakan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun

2023-2026 meliputi 5 tujuan dan 10 sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan dicapai dengan

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat kebudayaan yang multikultur dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut kebijakan diarahkan pada peningkatan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.

3. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh Struktur perekonomian yang tumbuh kuat dan kokoh diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dengan memperkuat perekonomian desa dan mikro beserta infrastruktur digital pendukung yang berbasis potensi lokal menuju keunggulan kompetitif untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan Mewujudkan Jepara sebagai kota cerdas dan modern dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi dan intesitas serta cakupan bencana.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional Tujuan pembangunan kelima diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internetworked government). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Jepara di Tahun 2023-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh)sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya modal sosial masyarakat
3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat
4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate.
5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif
6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing
7. Meningkatnya pendapatan masyarakat
8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan
9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan
10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan
11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
13. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

C. Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Jangka Menengah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun penyusunan program pembangunan dalam RPD merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional. Adapun program

pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berdasarkan RPD Kabupaten jepara tahun 2023-2026

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah dalam kondisi baik	persen	89,83	283.694.192.930	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	90	93.743.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	%	100	95.346.403.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	%	90	1.141.969.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	90	496.730.000	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	%	33	934.837.000	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	11,18	25.754.198.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	0,44	18.501.169.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun	%	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,16	9.784.014.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	16,56	16.648.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	28,42	4.290.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	42,75	20.775.205.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	%	4,88	660.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%/tahun	0,23	87.315.116.198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%/tahun	100	336.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	50,00	2.255.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	%/tahun	100	430.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	1,1156	11.383.171.050	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	6,77	10.315.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100	107.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi	%/tahun	100	15.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Frekuensi patroli siaga trantibum	patroli	1,12	833.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	734.498.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	91,23	265.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.182.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	1.340.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	6,57	3.910.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	370.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan Pemiliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	2,74	1.655.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	%	8,29	280.049.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	%	100	320.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22	226.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Rasio	2,29	66.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase OPD yang meliliki data pilah gender	%	70	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	%	100	156.170.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	Rasio	0,009	46.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pembangunan infrastruktur LPM	persen	100	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi energi per kapita	persen	100	490.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	persen	100	1.035.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	80	90.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	%	8	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan kualitas air	%	16%	435.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	%	100	Rp290.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	1.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	%	100	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	43	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	40	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklim tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	50	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan yang mendapat penghargaan Properda dari yang dilakukan pembinaan	%	25	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	%	14,70	761.575.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah	%	35,85	6.854.175.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP - el	Persen	99.94	28.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan KTP - el,		99,64	144.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				Cakupan Kepemilikan KIA,		40	139.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan KK		99,73	28.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun,	Persen	95,4	41.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan,		43,5	41.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Kematian,		91	41.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan,		98,85	41.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian		94,9	41.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	555.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Persen	100	40.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	desa	184	903.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	%	100	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	%	100	8.465.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	100	640.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	%	12,25	282.164.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,25	5.469.307.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Keluarahan	rasio	1,08	6.236.657.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	%	55,88	350.000.000	Dinas Perhubungan
				Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	66,71%	1.450.000.000	Dinas Perhubungan
				persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	1.660.000.000	Dinas Perhubungan
				rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	%	63,33%	720.000.000	Dinas Perhubungan
				ketersediaan trayek angkutan darat	%	100	315.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	%	84,2%	1.100.000.000	Dinas Perhubungan
				Ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	%	77,4%	175000000	Dinas Perhubungan
				Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	%	75	684.086.000	Dinas Perhubungan
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	%	0	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Dokumen	100	1.825.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	70	2.307.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentae Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	42	95.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	78	107.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	%	6,2	377.727.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	%	28	112.165.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,62	435.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	%	1,86	1.126.166.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	%	51	119.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	%	4,5	296.246.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pnyelesaian Izin	%	76	717.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	%	80	539.393.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	70	339.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	0,078	1.385.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	54,54	2.520.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persen organisasi Pramuka yang aktif	persen	100	600.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	300.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persenate titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	45,00	50.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	%	14,28	1.550.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pembinaan kesenian	%	60,62	40.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	%	30	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	%	25	722.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	6,57persen	213.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	Persentase	100,00	593.000.000	Diskarpus
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dialihmediakan	Persentase	4,2persen	20.000.000	Diskarpus

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	%	3	3.750.000.000	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	%	3	4.125.000.000	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	%	3	1.250.000.000	Dinas Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	12,5	9.173.980.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Kali	10	1.799.743.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	853.980.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Persen	0,1	2.720.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian	persen	5	9.404.676.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesakitan ternak besar	Persen	1,1	265.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	Persen	10	210.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Persen	10	1.799.251.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase jumlah rekomendasi izin usaha	persen	0,11	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	persen	0,4	3.134.569.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	0,5	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase kenaikan nilai ekspor	persen	2	360.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	persen	3	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	persen	0,6	278.494.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	persen	0,33	5.563.399.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase pengajuan izin usaha industri	persen	0,58	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rasio peningkatan jumlah transmigran	%	50	162.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase	100,00	23.425.384.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Perekonomian, Pembangunan , dan Pengadaan Barang & Jasa	Persentase	100,00	6.193.993.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD					
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	98,00	13.700.738.000	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	01		PERENCANAAN					
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Persen	100,00	805.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100,00	835.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN					

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	persen	92,60	442.745.309.224	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	persen	18,94	4.970.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Persen	5,07	6.549.764.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN					
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	%	100,00	7.561.057.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Persen	76,00	1.635.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti	%	100,00	643.500.000	Inspektorat
				Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	%	100,00	110.000.000	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	%	100,00	930.179.000	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.840.000	Kecamatan Mayong

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	9.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	45.000.000	Kecamatan Jepara
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	12,00	12.200.000	Kecamatan Donorojo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	7.500.000	Kecamatan Kedung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	6.445.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	8.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	3.570.000	Kecamatan Welahan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	Kecamatan Bangsri

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	699.937.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	9.000.000	Kecamatan Kembang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	8.705.000	Kecamatan Keling
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.150.000	Kecamatan Tahunan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	35.130.000	Kecamatan Mayong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	30.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	3.223.400.000	Kecamatan Jepara
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	76.950.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	20,00	29.214.000	Kecamatan Donorojo

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	45.000.000	Kecamatan Kedung
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	33.000.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.048.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Welahan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.000.000	Kecamatan Bangsri
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	52.000.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.358.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	35.000.000	Kecamatan Kembang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.346.000	Kecamatan Keling
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	41.000.000	Kecamatan Tahunan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	22.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.350.000	Kecamatan Mayong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Batealit

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Jepara
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Unit	100,00	10.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.080.000	Kecamatan Donorojo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	7.500.000	Kecamatan Kedung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.500.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	5.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.000.000	Kecamatan Welahan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	Kecamatan Bangsri
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	36.908.000	Kecamatan Karimunjawa

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.065.000	Kecamatan Kembang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.986.000	Kecamatan Keling
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.000.000	Kecamatan Tahunan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	600.000	Kecamatan Mayong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	4.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	-	Kecamatan Jepara

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	15.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	5.000.000	Kecamatan Donorojo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	Kecamatan Kedung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	3.000.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	1.500.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Welahan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	10.000.000	Kecamatan Bangsri

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	13.000.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Pakisaji
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Kembang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	2.500.000	Kecamatan Keling
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	Kecamatan Tahunan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	5.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	46.145.000	Kecamatan Mayong

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	34.400.000	Kecamatan Batealit
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	60,00	99.217.000	Kecamatan Jepara
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan	100,00	25.077.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	72,00	42.500.000	Kecamatan Kedung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	59.845.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	59.236.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	49.100.000	Kecamatan Welahan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	60.680.000	Kecamatan Bangsri
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	38.443.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	25.895.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja	Persen	75,00	46.231.000	Kecamatan Kembang

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	47.174.000	Kecamatan Keling
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	78,00	37.740.000	Kecamatan Tahunan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	37.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	30.362.000	Kecamatan Donorojo
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	%	0,17	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politk dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	0,09	61.884.669.190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	prosentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persentase	50	69.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	persen	16	104.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	opini	berhasil	295.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
X			NON URUSAN					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	2.899.295.000	Kecamatan Kedung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	642.568.740.380	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	315.912.706.000	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	22.582.464.602	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	6.257.214.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.642.687.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.472.384.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.998.777.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.902.702.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	17.476.061.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	15.659.851.000	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	91,68	8.666.970.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	%	100	30.696.261.000	Dinas Perhubungan
				Persentase pengadministrasian Keuangan sesuai Peraturan	%	100		Dinas Perhubungan
				Persentase Pelayanan PD sesuai SOP	%	100		Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	5.375.122.000	DInas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	7.245.143.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	94	5.417.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.553.619.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	5.702.632.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	5.485.250.000	Dinas Perikanan

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	88	15.202.444.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.865.914.000	Kecamatan Pecangaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.108.060.000	Kecamatan Kalinyamatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.626.603.000	Kecamatan Welahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.953.168.000	Kecamatan Mayong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen	100	3.787.401.000	Kecamatan Nalumsari
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.712.840.600	Kecamatan Batealit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.269.707.000	Kecamatan Tahunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	1,00	11.380.127.000	Kecamatan Jepara
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.898.004.000	Kecamatan Mlonggo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.470.343.000	Kecamatan Pakisaji

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.912.072.000	Kecamatan Bangsri
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.673.978.000	Kecamatan Kembang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.788.863.000	Kecamatan Keling
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.433.170.000	Kecamatan Donorojo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.320.627.000	Kecamatan Karimunjawa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Organisasi, Protokol & Komunikasi Pimpinan, & Umum	Persentase	100,00	30.447.014.500	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		37.712.574.000	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	6.722.796.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	26.721.895.876	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	5.479.442.000	Badan Kepegawaian Daerah

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	7.173.361.000	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	3.146.866.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								.
			JUMLAH				**2.594.092.289.000**	

Sumber: RPD Kab. Jepara Tahun 2023-2026 dari Bappeda Kabupaten Jepara

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penjabaran program dan kegiatan pembangunan untuk merealisasikan pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kegiatan Pembangunan Daerah
dalam RKPD Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	**819.011.057.766**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**816.411.057.766**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**816.411.057.766**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**600.121.932.060**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.500.000**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.500.000	DISDIKPORA

1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.500.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.500.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.500.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**597.465.395.835**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	597.028.475.835	DISDIKPORA
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	436.920.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**328.450.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.450.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.634.586.225**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.626.125	DISDIKPORA
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.566.100	DISDIKPORA
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.205.894.000	DISDIKPORA
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.000.000**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	DISDIKPORA

1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.000.000	DISDIKPORA
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	DISDIKPORA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**216.239.125.706**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**101.823.469.000**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	595.056.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	522.192.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.766.392.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	414.456.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	441.456.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	40.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	20.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	429.100.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.425.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.757.480.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.547.160.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.740.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.554.432.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	362.725.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	450.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.382.280.000	DISDIKPORA
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**34.644.682.706**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.087.674.632	DISDIKPORA

1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.271.820.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	551.046.300	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	7.899.550.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.567.543.600	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.388.229.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	298.429.300	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	752.895.600	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.158.429.900	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.310.923.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.360.365.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	692.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	145.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.678.870.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.499.592.874	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39.776.500	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	260.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	145.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	312.537.000	DISDIKPORA
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**35.543.634.000**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	248.730.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000	DISDIKPORA

1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	87.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	60.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.362.050.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.584.680.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	101.174.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000	DISDIKPORA
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**44.227.340.000**	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.135.500.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	400.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.113.840.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23.886.500.000	DISDIKPORA
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.641.500.000	DISDIKPORA
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**50.000.000**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**50.000.000**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	DISDIKPORA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.600.000.000**	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.600.000.000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**750.000.000**	

2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**500.000.000**	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	300.000.000	DISDIKPORA
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	200.000.000	DISDIKPORA
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**250.000.000**	
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DISDIKPORA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**1.800.000.000**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**999.200.000**	
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	400.139.500	DISDIKPORA
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	599.060.500	DISDIKPORA
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**800.800.000**	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	550.800.000	DISDIKPORA
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	250.000.000	DISDIKPORA
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**50.000.000**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**50.000.000**	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000	DISDIKPORA
					UPTD Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Karimunjawa	**289.470.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**289.470.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**289.470.000**	

1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**80.140.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.640.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.640.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**17.500.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.000.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.500.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.500.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**209.330.000**	

1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**209.330.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	209.330.000	UPTD SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karimunjawa	**130.423.900**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**130.423.900**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**130.423.900**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**57.823.900**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.940.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.940.000	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.246.100**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.034.700	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.612.600	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.517.700	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.081.100	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.637.800**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.268.300	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.369.500	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**72.600.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**72.600.000**	

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72.600.000	UPTD SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Keling	**1.118.170.550**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.118.170.550**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.118.170.550**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**194.940.550**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.600.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.149.450**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.423.800	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.791.150	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.184.500	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.490.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.490.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.651.100**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485.100	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.465.500	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.700.500	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.050.000**	

1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	8.250.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.300.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**923.230.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**923.230.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	923.230.000	UPTD SMP NEGERI 1 KELING
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Keling	**215.900.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**215.900.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**215.900.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.070.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.640.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.640.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.250.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.250.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.324.300**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.124.300	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.130.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	410.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.720.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING

1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.725.700**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.725.700	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**148.830.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**148.830.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	148.830.000	UPTD SMP NEGERI 2 KELING
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo	**839.543.800**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**839.543.800**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**839.543.800**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**109.913.800**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.660.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.660.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.740.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.740.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**58.559.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.237.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.247.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.275.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.994.800**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	UPTD SMP NEGERI 1

							DONOROJO
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.394.800	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.960.000**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**729.630.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**729.630.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	729.630.000	UPTD SMP NEGERI 1 DONOROJO
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Donorojo	**353.966.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**353.966.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**353.966.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**68.406.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.810.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.810.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**17.760.800**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.099.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.235.800	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	986.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.440.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO

1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.625.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.625.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.899.200**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	610.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.289.200	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.311.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.311.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**285.560.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**285.560.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	285.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 DONOROJO
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangsri	**1.330.308.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.277.197.600**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.277.197.600**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**143.427.600**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.860.600**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.066.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.994.600	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI

1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.745.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.745.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.220.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.780.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.262.000**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.262.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.133.770.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.133.770.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.133.770.000	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
X					**NON URUSAN**	**53.110.400**	
X	**X X**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**53.110.400**	
X	**X X**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**53.110.400**	
X	**X X**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.110.400**	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.110.400	UPTD SMP NEGERI 1 BANGSRI
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangsri	**1.050.109.500**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.050.109.500**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.050.109.500**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**153.499.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**39.915.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.915.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI

1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.809.500**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.001.200	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.641.700	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.166.600	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**21.775.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.775.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.400.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.000.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**896.610.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**896.610.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	896.610.000	UPTD SMP NEGERI 2 BANGSRI
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembang	**861.711.443**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**861.711.443**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**861.711.443**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**132.081.443**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**38.031.000**	

1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.031.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.000.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.074.800**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.074.800	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.628.600**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.628.600	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.347.043**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.269.843	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.077.200	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**729.630.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**729.630.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	729.630.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEMBANG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembang	**637.422.500**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**637.422.500**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**637.422.500**	

1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**112.282.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.922.500**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.931.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.571.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.213.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.207.500	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.300.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.500.000**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**525.140.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**525.140.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	525.140.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kembang	**952.833.150**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**952.833.150**	

1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**952.833.150**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**136.083.150**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.928.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.928.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.720.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.720.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.044.250**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.147.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.164.300	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.966.300	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.389.150	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	2.377.500	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.190.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.190.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.064.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.964.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.100.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.136.900**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.195.600	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.941.300	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG

1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**816.750.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**816.750.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	816.750.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEMBANG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kembang	**156.103.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**156.103.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**156.103.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**53.253.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.640.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.640.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**16.990.000**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.878.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	792.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.320.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.410.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.213.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.753.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**102.850.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**102.850.000**	

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	102.850.000	UPTD SMP NEGERI 4 KEMBANG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mlonggo	**1.223.910.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.223.910.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.223.910.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**160.410.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.600.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.600.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.750.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.750.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.500.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.063.500.000**	

1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.063.500.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.063.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 MLONGGO
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakis Aji	**778.445.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**778.445.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**778.445.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**126.255.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.418.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.118.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.800.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.320.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.000.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.788.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.288.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.489.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.339.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI

1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.150.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**652.190.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**652.190.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	652.190.000	UPTD SMP NEGERI 1 PAKIS AJI
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakis Aji	**304.481.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**304.481.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**304.481.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64.901.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.075.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.075.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.900.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.900.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.538.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.838.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.388.000**	

1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.388.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**239.580.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**239.580.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	239.580.000	UPTD SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepara	**1.245.010.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.245.010.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.245.010.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**203.200.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.630.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.630.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.629.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.433.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.886.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.510.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.131.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.876.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA

1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.250.000**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.250.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.041.810.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.041.810.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.041.810.000	UPTD SMP NEGERI 1 JEPARA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jepara	**1.374.255.200**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.374.255.200**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.374.255.200**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**196.925.200**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.253.200**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.914.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.839.200	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.112.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.562.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.177.330.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.177.330.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.177.330.000	UPTD SMP NEGERI 2 JEPARA

					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jepara	**1.043.412.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.043.412.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.043.412.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**166.162.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.500.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.102.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.560.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.158.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.384.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**877.250.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**877.250.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	877.250.000	UPTD SMP NEGERI 3 JEPARA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara	**965.537.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**965.537.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**965.537.000**	

1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**145.157.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.500.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.500.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.237.000**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.811.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.722.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.304.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.500.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.800.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.400.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.560.000**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.560.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**820.380.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**820.380.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	820.380.000	UPTD SMP NEGERI 4 JEPARA

					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Jepara	**1.201.404.250**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.201.404.250**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.201.404.250**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**176.324.250**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.958.600**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.437.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.461.600	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.060.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.440.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.440.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.265.650**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.240.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.285.650	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.740.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.100.000**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.100.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.025.080.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.025.080.000**	

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	905.080.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120.000.000	UPTD SMP NEGERI 5 JEPARA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Jepara	**946.608.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**798.600.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**798.600.000**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**798.600.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**798.600.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	798.600.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**148.008.000**	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**148.008.000**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**148.008.000**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.600.000**	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.600.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.248.000**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	555.600	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.831.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.781.400	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA

2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.410.000**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.210.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.190.000**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	UPTD SMP NEGERI 6 JEPARA
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tahunan	**1.238.999.400**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.238.999.400**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.238.999.400**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**164.099.400**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.864.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.864.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.600.000**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.689.000**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	7.009.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.680.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.735.400**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.735.400	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN

1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.211.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.211.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.074.900.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.074.900.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.074.900.000	UPTD SMP NEGERI 1 TAHUNAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batealit	**772.430.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**772.430.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**772.430.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**87.570.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.010.000**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.010.000	UPTD SMP NEGERI 1 BATEALIT
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 BATEALIT
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**684.860.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**684.860.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	684.860.000	UPTD SMP NEGERI 1 BATEALIT
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batealit	**259.485.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**259.485.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**259.485.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**73.235.000**	

1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.212.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.212.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.920.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.920.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.687.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.340.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.347.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.320.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.320.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.096.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.847.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.349.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**186.250.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**186.250.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	186.250.000	UPTD SMP NEGERI 2 BATEALIT
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batealit	**307.631.250**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**307.631.250**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**307.631.250**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.271.250**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.640.000**	

1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.640.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.988.250**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.140.300	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.978.600	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.196.350	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.673.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.000.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.763.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.263.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.880.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**240.360.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**240.360.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	240.360.000	UPTD SMP NEGERI 3 BATEALIT
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedung	**1.002.103.750**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.002.103.750**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.002.103.750**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**136.743.750**	

1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.145.800**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.145.800	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.037.950**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.417.300	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.042.600	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.378.050	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.000.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**865.360.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**865.360.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	865.360.000	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedung	**308.659.200**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**308.659.200**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**308.659.200**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**109.009.200**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.000.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.459.200**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.259.200	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.410.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.264.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.664.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.316.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG

1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.676.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**199.650.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**199.650.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	199.650.000	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedung	**424.971.250**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**424.971.250**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**424.971.250**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**82.541.250**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.600.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.600.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.475.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.475.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**31.166.250**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.136.800	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.482.500	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.968.600	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.578.350	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.960.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.960.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG

1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.340.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	620.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.720.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**342.430.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**342.430.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	342.430.000	UPTD SMP NEGERI 3 KEDUNG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pecangaan	**1.301.206.300**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.301.206.300**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.301.206.300**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**189.306.300**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.043.300**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.057.800	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.636.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.285.500	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.494.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.570.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN

1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.500.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.018.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.018.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.185.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.185.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.111.900.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.111.900.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.111.900.000	UPTD SMP NEGERI 1 PECANGAAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pecangaan	**1.172.286.500**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.172.286.500**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.172.286.500**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**178.876.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.445.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.445.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.630.500**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	938.800	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.664.100	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.574.100	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN

1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.453.500	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23.940.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.940.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.470.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.510.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.960.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.391.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.199.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.192.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**993.410.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**993.410.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	993.410.000	UPTD SMP NEGERI 2 PECANGAAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalinyamatan	**956.931.100**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**956.931.100**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**956.931.100**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**146.231.100**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.841.100**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.861.800	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMAT

							AN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.357.300	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.989.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.313.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.750.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.570.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.150.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.150.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.680.000**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.760.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.190.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN

1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**810.700.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**810.700.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	810.700.000	UPTD SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalinyamatan	**876.469.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**876.469.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**876.469.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**126.269.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.360.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.360.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.184.000**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.322.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.691.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.171.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.885.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	885.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.840.000**	

1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**750.200.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**750.200.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	750.200.000	UPTD SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Welahan	**950.590.250**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**950.590.250**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**950.590.250**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**153.200.250**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.160.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.160.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**14.000.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.880.250**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.880.250	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.950.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN

1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.210.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**797.390.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**797.390.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	797.390.000	UPTD SMP NEGERI 1 WELAHAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Welahan	**853.533.700**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**835.690.100**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**835.690.100**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**117.040.100**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.131.100**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.464.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.667.100	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.399.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.656.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.282.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.461.000	UPTD SMP NEGERI 2

							WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.950.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**718.650.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**718.650.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	718.650.000	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**17.843.600**	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**17.843.600**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**17.843.600**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.843.600**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.843.600	UPTD SMP NEGERI 2 WELAHAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Welahan	**803.742.500**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**803.742.500**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**803.742.500**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**118.882.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**42.326.500**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.526.500	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN

1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.300.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.000.000**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	8.000.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.996.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.696.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**684.860.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**684.860.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	684.860.000	UPTD SMP NEGERI 3 WELAHAN
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mayong	**1.195.750.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.195.750.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.195.750.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**170.880.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.170.300**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.170.300	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.709.700**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.148.500	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.699.500	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.861.700	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG

1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.000.000**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.024.870.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.024.870.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.024.870.000	UPTD SMP NEGERI 1 MAYONG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mayong	**704.886.300**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**704.886.300**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**704.886.300**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**119.137.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**39.000.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 MAYONG
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.000.000**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	UPTD SMP NEGERI 2 MAYONG
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.112.500**	
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.112.500	UPTD SMP NEGERI 2 MAYONG
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.025.000**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.025.000	UPTD SMP NEGERI 2 MAYONG
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**585.748.800**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**585.748.800**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	585.748.800	UPTD SMP NEGERI 2 MAYONG
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nalumsari	**318.780.000**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**318.780.000**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**318.780.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**75.570.000**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.640.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.640.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.570.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.952.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.895.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.773.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.950.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.600.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.760.000**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**243.210.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**243.210.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	243.210.000	UPTD SMP NEGERI 1 NALUMSARI
					UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nalumsari	**1.224.332.500**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.224.332.500**	

1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.224.332.500**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**213.982.500**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.560.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**77.817.000**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.565.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.752.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.500.000**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.740.000**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.840.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.365.500**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.615.500	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.010.350.000**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1.010.350.000**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.010.350.000	UPTD SMP NEGERI 2 NALUMSARI
					UPTD Sanggar Kegiatan Belajar	**1.056.011.900**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.056.011.900**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.056.011.900**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**330.597.400**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.890.000**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.890.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.680.000**	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.680.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.985.500**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.148.300	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.877.800	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.326.400	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.483.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.950.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.220.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.190.000**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.310.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.880.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.851.900**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.751.900	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**725.414.500**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**32.340.000**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.340.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**693.074.500**	
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	60.564.500	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	632.510.000	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
					Dinas Kesehatan	**205.548.614.023**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**205.548.614.023**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**205.548.614.023**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**134.400.384.623**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97.740.000**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	900.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.760.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.380.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**130.775.714.000**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130.201.663.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	574.051.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**849.761.000**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.948.500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.212.500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.600.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.254.607.000**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.104.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.855.003.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**422.562.623**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.062.623	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**70.601.316.400**	

1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.507.615.700**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	5.386.096.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	765.038.300	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	126.481.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**63.999.643.700**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	141.820.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	65.390.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32.388.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.244.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.642.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	155.359.300	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.366.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.750.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.566.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.950.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.020.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.430.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26.842.419.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.555.000	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44.920.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.936.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.591.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	31.785.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.135.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	26.250.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	177.407.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.870.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	28.415.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	23.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	7.435.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**90.500.000**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90.500.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.557.000**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.557.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**382.362.000**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**19.645.000**	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	19.645.000	DINAS KESEHATAN

1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**70.890.000**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	22.640.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.250.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**291.827.000**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.827.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**32.125.000**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**16.250.000**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16.250.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**12.875.000**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.875.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**3.000.000**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.000.000	DINAS KESEHATAN

1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**132.426.000**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**19.604.000**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.604.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90.515.000**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	90.515.000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**22.307.000**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.307.000	DINAS KESEHATAN
					RSUD RA Kartini	**145.000.000.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**145.000.000.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**145.000.000.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**145.000.000.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**145.000.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	145.000.000.000	RSUD RA KARTINI
					UPTD Puskesmas Karimunjawa	**1.803.607.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.803.607.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.803.607.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**921.120.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**921.120.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	921.120.000	UPTD PUSKESMAS

							KARIMUNJAWA
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**882.487.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**882.487.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	882.487.000	UPTD PUSKESMAS KARIMUNJAWA
					UPTD Puskesmas Keling I	**4.017.633.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.017.633.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.017.633.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.301.600.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.301.600.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.301.600.000	UPTD PUSKESMAS KELING I
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**716.033.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**716.033.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	716.033.000	UPTD PUSKESMAS KELING I
					UPTD Puskesmas Keling II	**2.407.098.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.407.098.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.407.098.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.799.185.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.799.185.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.799.185.000	UPTD PUSKESMAS KELING II

1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**607.913.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**607.913.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	607.913.000	UPTD PUSKESMAS KELING II
					UPTD Puskesmas Donorojo	**2.719.264.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.719.264.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.719.264.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.100.000.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.100.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.100.000.000	UPTD PUSKESMAS DONOROJO
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**619.264.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**619.264.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	619.264.000	UPTD PUSKESMAS DONOROJO
					UPTD Puskesmas Bangsri I	**4.064.419.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.064.419.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.064.419.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.371.499.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.371.499.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.371.499.000	UPTD PUSKESMAS BANGSRI I
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**692.920.000**	

1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**692.920.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	692.920.000	UPTD PUSKESMAS BANGSRI I
					UPTD Puskesmas Bangsri II	**2.434.265.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.434.265.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.434.265.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.866.291.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.866.291.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.866.291.000	UPTD PUSKESMAS BANGSRI II
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**567.974.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**567.974.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	567.974.000	UPTD PUSKESMAS BANGSRI II
					UPTD Puskesmas Kembang	**4.011.004.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.011.004.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.011.004.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.365.400.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.365.400.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.365.400.000	UPTD PUSKESMAS KEMBANG
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**645.604.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**645.604.000**	

1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	645.604.000	UPTD PUSKESMAS KEMBANG
					UPTD Puskesmas Mlonggo	**5.251.640.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**5.251.640.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**5.251.640.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.513.000.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4.513.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.513.000.000	UPTD PUSKESMAS MLONGGO
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**738.640.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**738.640.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	738.640.000	UPTD PUSKESMAS MLONGGO
					UPTD Puskesmas Pakis Aji	**4.124.575.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.124.575.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.124.575.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.513.660.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.513.660.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.513.660.000	UPTD PUSKESMAS PAKIS AJI
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**610.915.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**610.915.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	610.915.000	UPTD PUSKESMAS PAKIS AJI
					UPTD Puskesmas Jepara	**3.099.595.000**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.099.595.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.099.595.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.391.300.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.391.300.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.391.300.000	UPTD PUSKESMAS JEPARA
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**708.295.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**708.295.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	708.295.000	UPTD PUSKESMAS JEPARA
					UPTD Puskesmas Batealit	**4.578.681.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.578.681.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.578.681.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.896.726.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.896.726.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.896.726.000	UPTD PUSKESMAS BATEALIT
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**681.955.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**681.955.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	681.955.000	UPTD PUSKESMAS BATEALIT
					UPTD Puskesmas Tahunan	**4.154.955.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.154.955.000**	

1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.154.955.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.508.000.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.508.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.508.000.000	UPTD PUSKESMAS TAHUNAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**646.955.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**646.955.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	646.955.000	UPTD PUSKESMAS TAHUNAN
					UPTD Puskesmas Kedung I	**4.072.233.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.072.233.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**4.072.233.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.488.723.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.488.723.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.488.723.000	UPTD PUSKESMAS KEDUNG I
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**583.510.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**583.510.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	583.510.000	UPTD PUSKESMAS KEDUNG I
					UPTD Puskesmas Kedung II	**1.811.514.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.811.514.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.811.514.000**	

1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.189.022.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.189.022.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.189.022.000	UPTD PUSKESMAS KEDUNG II
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**622.492.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**622.492.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	622.492.000	UPTD PUSKESMAS KEDUNG II
					UPTD Puskesmas Pecangaan	**3.439.404.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.439.404.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.439.404.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.800.140.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.800.140.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.800.140.000	UPTD PUSKESMAS PECANGAAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**639.264.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**639.264.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	639.264.000	UPTD PUSKESMAS PECANGAAN
					UPTD Puskesmas Kalinyamatan	**3.318.512.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.318.512.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.318.512.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.750.000.000**	

1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.750.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.750.000.000	UPTD PUSKESMAS KALINYAMATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**568.512.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**568.512.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	568.512.000	UPTD PUSKESMAS KALINYAMATAN
					UPTD Puskesmas Welahan I	**3.456.510.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.456.510.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.456.510.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.878.000.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.878.000.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.878.000.000	UPTD PUSKESMAS WELAHAN I
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**578.510.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**578.510.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	578.510.000	UPTD PUSKESMAS WELAHAN I
					UPTD Puskesmas Welahan II	**1.879.833.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.879.833.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.879.833.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.262.505.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.262.505.000**	

1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.262.505.000	UPTD PUSKESMAS WELAHAN II
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**617.328.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**617.328.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	617.328.000	UPTD PUSKESMAS WELAHAN II
					UPTD Puskesmas Mayong II	**2.674.476.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.674.476.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.674.476.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.104.080.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.104.080.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.104.080.000	UPTD PUSKESMAS MAYONG II
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**570.396.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**570.396.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	570.396.000	UPTD PUSKESMAS MAYONG II
					UPTD Puskesmas Nalumsari I	**2.912.008.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.912.008.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.912.008.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.338.819.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.338.819.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.338.819.000	UPTD PUSKESMAS NALUMSARI I

1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**573.189.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**573.189.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	573.189.000	UPTD PUSKESMAS NALUMSARI I
					UPTD Puskesmas Nalumsari II	**1.234.613.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.234.613.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.234.613.000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.234.613.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.234.613.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.234.613.000	UPTD PUSKESMAS NALUMSARI II
					UPTD Puskesmas Mayong I	**2.899.900.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.899.900.000**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.899.900.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.316.390.000**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.316.390.000**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.316.390.000	UPTD PUSKESMAS MAYONG I
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**583.510.000**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**583.510.000**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	583.510.000	UPTD PUSKESMAS MAYONG I
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**169.699.597.267**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**169.699.597.267**	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**169.699.597.267**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.333.439.000**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.735.135**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.776.000	DPUPR
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.775.135	DPUPR
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.184.000	DPUPR
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.789.659.000**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.489.659.000	DPUPR
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	DPUPR
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000**	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	DPUPR
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**830.000.000**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.000.000	DPUPR
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	DPUPR
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.843.044.865**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	DPUPR
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	739.264.865	DPUPR
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000	DPUPR
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.923.780.000	DPUPR
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**800.000.000**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	DPUPR

1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	400.000.000	DPUPR
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	DPUPR
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**15.876.830.000**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.170.000.000**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	970.000.000	DPUPR
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	200.000.000	DPUPR
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**14.706.830.000**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12.246.830.000	DPUPR
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.890.000.000	DPUPR
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	570.000.000	DPUPR
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**10.719.529.000**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**10.719.529.000**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.719.529.000	DPUPR
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**200.000.000**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000**	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000	DPUPR
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**9.684.390.000**	

1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.684.390.000**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	9.684.390.000	DPUPR
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**16.043.000.000**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**16.043.000.000**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15.823.000.000	DPUPR
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	220.000.000	DPUPR
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**25.400.000.000**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**25.400.000.000**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000.000	DPUPR
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.300.000.000	DPUPR
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100.000.000	DPUPR
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**3.645.000.000**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.645.000.000**	

1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.645.000.000	DPUPR
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**65.501.000.000**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**65.501.000.000**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.000.000.000	DPUPR
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	33.103.000.000	DPUPR
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.530.000.000	DPUPR
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.035.500.000	DPUPR
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	3.832.500.000	DPUPR
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	16.000.000.000	DPUPR
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**100.000.000**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100.000.000**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	100.000.000	DPUPR
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.196.409.267**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**550.000.000**	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	500.000.000	DPUPR
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	50.000.000	DPUPR
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50.000.000	DPUPR
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**175.000.000**	

1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	175.000.000	DPUPR
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**421.409.267**	
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	21.409.267	DPUPR
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	DPUPR
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	300.000.000	DPUPR
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**19.466.156.459**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**19.466.156.459**	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**19.466.156.459**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.645.156.459**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.000.000**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.750.057.000**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.579.492.000	DISPERKIM
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.565.000	DISPERKIM
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.431.459**	

1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.541.459	DISPERKIM
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.910.000	DISPERKIM
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	DISPERKIM
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.480.000	DISPERKIM
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.507.028.000**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.468.000	DISPERKIM
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.474.560.000	DISPERKIM
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**162.640.000**	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.250.000	DISPERKIM
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.550.000	DISPERKIM
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.840.000	DISPERKIM
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**529.000.000**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	15.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**449.000.000**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	449.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**40.000.000**	

1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	40.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**950.000.000**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**950.000.000**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	725.000.000	DISPERKIM
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	225.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**10.840.000.000**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**10.840.000.000**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.840.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.487.000.000**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**1.487.000.000**	
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.380.000.000	DISPERKIM
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	50.000.000	DISPERKIM
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	57.000.000	DISPERKIM
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**15.000.000**	

1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**15.000.000**	
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	15.000.000	DISPERKIM
					Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	**12.479.132.699**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**12.479.132.699**	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**12.479.132.699**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.975.339.699**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.605.509.000**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.548.509.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.482.999**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.682.999	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.500.000	SATPOL PP & DAMKAR

1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.500.000**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.200.560.000**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.680.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.280.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.287.700**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.787.700	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.405.793.000**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.952.918.000**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.833.918.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.000.000	SATPOL PP & DAMKAR

1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	85.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**452.875.000**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	427.875.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**98.000.000**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**90.000.000**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	5.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**8.000.000**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	8.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**2.900.178.000**	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.900.178.000**	

1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**2.900.178.000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.422.628.000**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.775.000**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.775.000	BPBD
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	BPBD
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.341.757.000**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.295.407.000	BPBD
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.350.000	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84.806.000**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.838.600	BPBD
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.609.100	BPBD
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.332.900	BPBD
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.878.400	BPBD
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.945.000	BPBD
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	BPBD
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.602.000	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**867.626.000**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.076.000	BPBD
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.550.000	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.664.000**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.514.000	BPBD

1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000	BPBD
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.000	BPBD
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**477.550.000**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.000.000	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**277.000.000**	
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	65.000.000	BPBD
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	17.000.000	BPBD
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	120.000.000	BPBD
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	BPBD
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**80.000.000**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	BPBD
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	BPBD
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	BPBD
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15.000.000	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**70.550.000**	
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	5.550.000	BPBD
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65.000.000	BPBD
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**26.963.721.480**	

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**19.202.049.480**	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**19.202.049.480**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.208.684.980**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.000.000**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.277.431.000**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.101.431.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**880.000.000**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**73.500.000**	

1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.500.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.689.553.980**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.684.553.980	DINSOSPERMADES
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.200.000**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.200.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**930.000.000**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**930.000.000**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	865.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.777.317.000**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**822.317.000**	

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	200.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	175.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	167.317.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	240.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**955.000.000**	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	700.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	130.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	70.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**8.793.572.500**	
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**30.000.000**	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**8.763.572.500**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	DINSOSPERMADES

1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.680.972.500	DINSOSPERMADES
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.772.600.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**455.000.000**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**370.000.000**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	170.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	170.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**85.000.000**	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15.000.000	DINSOSPERMADES
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.000.000	DINSOSPERMADES
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**37.475.000**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**37.475.000**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.475.000	DINSOSPERMADES
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**7.761.672.000**	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**7.761.672.000**	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**160.800.000**	
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**160.800.000**	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	160.800.000	DINSOSPERMADES
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**15.000.000**	
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**15.000.000**	

2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.000.000	DINSOSPERMADES
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**6.427.762.000**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**6.427.762.000**	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	32.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	180.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	80.290.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	20.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	84.822.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	31.650.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3.177.600.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	26.400.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	25.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.665.000.000	DINSOSPERMADES
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.158.110.000**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.158.110.000**	

2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	DINSOSPERMADES
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63.300.000	DINSOSPERMADES
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	44.310.000	DINSOSPERMADES
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	550.500.000	DINSOSPERMADES
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**16.896.894.317**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**16.896.894.317**	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.330.832.317**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.135.832.317**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.338.317**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.338.317	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	DP3AP2KB

2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.219.896.000**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.896.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.000.000**	
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.000.000**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000**	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**668.521.000**	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.440.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.081.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.077.000**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.447.000	DP3AP2KB

2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.630.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**45.000.000**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**20.000.000**	
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000	DP3AP2KB
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	10.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**30.000.000**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**15.000.000**	

2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**60.000.000**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**30.000.000**	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**30.000.000**	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DP3AP2KB
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**45.000.000**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	DP3AP2KB
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.000.000**	

2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	30.000.000	DP3AP2KB
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**12.566.062.000**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**347.200.000**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**5.000.000**	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5.000.000	DP3AP2KB
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**342.200.000**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	182.000.000	DP3AP2KB
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	160.200.000	DP3AP2KB
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**5.458.362.000**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.370.900.000**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	85.000.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	770.400.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	208.000.000	DP3AP2KB

2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	187.500.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	DP3AP2KB
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**469.000.000**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	418.000.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	51.000.000	DP3AP2KB
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.860.462.000**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.200.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.258.881.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2.500.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	531.581.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	DP3AP2KB
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**758.000.000**	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	5.000.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	753.000.000	DP3AP2KB
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**6.760.500.000**	

2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**6.740.500.000**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40.000.000	DP3AP2KB
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	370.000.000	DP3AP2KB
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25.000.000	DP3AP2KB
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	6.141.900.000	DP3AP2KB
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	163.600.000	DP3AP2KB
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**20.000.000**	
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	20.000.000	DP3AP2KB
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	**23.922.349.692**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**16.070.004.692**	

2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**16.070.004.692**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.888.124.692**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**86.710.000**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	DKPP
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	DKPP
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.710.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.324.114.000**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.176.274.000	DKPP
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.840.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**47.000.000**	
2	09	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.000.000	DKPP
2	09	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**328.000.000**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	DKPP
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	DKPP
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	DKPP
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**65.000.000**	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**832.100.000**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000	DKPP
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.100.000	DKPP
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**205.200.692**	

2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.200.692	DKPP
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	DKPP
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	DKPP
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**136.900.000**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**25.500.000**	
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.500.000	DKPP
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**111.400.000**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	91.400.000	DKPP
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	20.000.000	DKPP
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**28.530.000**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**15.000.000**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.000.000	DKPP
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**13.530.000**	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.530.000	DKPP
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**16.450.000**	

2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**16.450.000**	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.450.000	DKPP
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**7.852.345.000**	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.852.345.000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.424.760.000**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**628.480.000**	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	628.480.000	DKPP
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**796.280.000**	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	222.800.000	DKPP
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	463.480.000	DKPP
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	110.000.000	DKPP
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**4.746.060.000**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.207.880.000**	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	250.000.000	DKPP
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.919.560.000	DKPP
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.038.320.000	DKPP
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**538.180.000**	
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	538.180.000	DKPP

3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**256.755.000**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**48.090.000**	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.090.000	DKPP
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**185.575.000**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	185.575.000	DKPP
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**23.090.000**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.090.000	DKPP
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.424.770.000**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.424.770.000**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	328.250.000	DKPP
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	61.800.000	DKPP
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.034.720.000	DKPP
					Dinas Lingkungan Hidup	**20.638.153.538**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**20.638.153.538**	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**20.638.153.538**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.607.366.000**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.000.000**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	DLH

2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.974.381.000**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.814.381.000	DLH
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000**	
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**267.500.000**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	DLH
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	DLH
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	DLH
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	DLH
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000**	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.095.485.000**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	DLH
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.485.000	DLH
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**185.000.000**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000	DLH
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	DLH
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	DLH
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**150.000.000**	

2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	DLH
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**175.000.000**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**175.000.000**	
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	125.000.000	DLH
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	50.000.000	DLH
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**300.000.000**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000	DLH
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000	DLH
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**100.000.000**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000	DLH
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	DLH

2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**25.000.000**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	DLH
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**5.280.787.538**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**5.280.787.538**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.050.000.000	DLH
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.230.787.538	DLH
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**9.576.739.000**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**9.576.739.000**	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.576.739.000**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.551.739.000**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.715.749.000**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.515.749.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.000.000**	
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	DISDUKCAPIL

2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**785.295.000**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	460.295.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**841.245.000**	
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	61.245.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**894.450.000**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.450.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.000.000**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**230.000.000**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**215.000.000**	

2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**15.000.000**	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**185.000.000**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**170.000.000**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	70.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**15.000.000**	
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**580.000.000**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**450.000.000**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	450.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**130.000.000**	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	50.000.000	DISDUKCAPIL
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**30.000.000**	

2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**30.000.000**	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	15.000.000	DISDUKCAPIL
					Dinas Perhubungan	**35.970.579.609**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**35.970.579.609**	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**35.970.579.609**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.035.393.609**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.500.000**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.650.000	DISHUB
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.850.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.968.954.000**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.820.634.000	DISHUB
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.320.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**242.540.000**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	DISHUB
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	DISHUB
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	DISHUB
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.200.000	DISHUB
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.840.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.000.000**	

2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.716.899.609**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.709.609	DISHUB
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.951.040.000	DISHUB
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.735.150.000	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.500.000**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.500.000	DISHUB
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	DISHUB
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	DISHUB
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**5.921.000.000**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**5.195.000.000**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.025.000.000	DISHUB
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	170.000.000	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**192.000.000**	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	192.000.000	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**55.000.000**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**209.744.000**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	101.500.000	DISHUB
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.244.000	DISHUB

2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**185.950.000**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	185.950.000	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**14.050.000**	
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.463.000	DISHUB
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	3.587.000	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**69.256.000**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	69.256.000	DISHUB
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**1.014.086.000**	
2	**15**	**03**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**411.040.000**	
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	411.040.000	DISHUB
2	**15**	**03**	**2.09**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**184.086.000**	
2	15	03	2.09	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	184.086.000	DISHUB

2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**418.960.000**	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	350.000.000	DISHUB
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	68.960.000	DISHUB
2	**15**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	**100.000**	
2	**15**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**	**100.000**	
2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	100.000	DISHUB
					DInas Komunikasi dan Informatika	**11.017.592.573**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.017.592.573**	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**10.897.592.573**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.453.192.573**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.719.002.573**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.618.962.573	DISKOMINFO

2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.040.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**442.620.000**	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	437.620.000	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.970.000**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.970.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.500.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.000.000	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**998.600.000**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.600.000	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.000.000**	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	DISKOMINFO
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.114.400.000**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.114.400.000**	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.000.000	DISKOMINFO

2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	35.000.000	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	60.000.000	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	1.654.400.000	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	40.000.000	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	175.000.000	DISKOMINFO
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.330.000.000**	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.041.739.200**	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.041.739.200	DISKOMINFO
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**288.260.800**	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	29.260.800	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	10.000.000	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	10.000.000	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	104.000.000	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	120.000.000	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	15.000.000	DISKOMINFO
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**100.000.000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**100.000.000**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24.240.000	DISKOMINFO

2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	26.831.000	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.520.000	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	29.409.000	DISKOMINFO
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**20.000.000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**20.000.000**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DISKOMINFO
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**9.843.742.853**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**9.836.242.853**	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**2.079.024.000**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.794.024.000**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1.781.524.000**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.781.524.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**3.000.000**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**4.500.000**	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4.500.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**5.000.000**	

2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**195.000.000**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**125.000.000**	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	7.500.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	87.500.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**55.000.000**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	50.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**90.000.000**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**38.000.000**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**52.000.000**	

2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.650.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	8.700.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	23.650.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**7.757.218.853**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.632.848.853**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.534.673.000**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.394.673.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.000.000**	
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**229.080.853**	

2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.125.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.910.853	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.045.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**639.065.000**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.065.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**185.030.000**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.030.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**65.000.000**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**65.000.000**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**15.000.000**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS

2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**175.512.000**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**175.512.000**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	175.512.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**50.000.000**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**50.000.000**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**50.000.000**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	25.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**768.858.000**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**768.858.000**	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	768.858.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**7.500.000**	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**7.500.000**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**7.500.000**	
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**7.500.000**	
3	32	03	2.01	0015	Penampungan Kabupaten/Kota	5.000.000	DISKOP UKM NAKERTRANS

3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	2.500.000	DISKOP UKM NAKERTRANS
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**4.742.146.000**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.742.146.000**	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.742.146.000**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.089.326.000**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.000.000**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.960.207.000**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.837.207.000	DPMPTSP
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**54.300.000**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.300.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**252.869.000**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.869.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.000.000**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**657.900.000**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000	DPMPTSP

2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.500.000	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.050.000**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.550.000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**35.000.000**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**55.000.000**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**55.000.000**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**46.920.000**	

2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**46.920.000**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40.920.000	DPMPTSP
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	6.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**475.900.000**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**475.900.000**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12.205.000	DPMPTSP
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.695.000	DPMPTSP
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	126.000.000	DPMPTSP
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**40.000.000**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.000.000	DPMPTSP
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	**15.820.024.143**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.217.000.000**	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.217.000.000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**370.000.000**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	

2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10.000.000	DISPARBUD
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**360.000.000**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	95.000.000	DISPARBUD
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	225.000.000	DISPARBUD
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	40.000.000	DISPARBUD
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**40.000.000**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**30.000.000**	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30.000.000	DISPARBUD
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	10.000.000	DISPARBUD
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**807.000.000**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**807.000.000**	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	261.000.000	DISPARBUD
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	461.445.000	DISPARBUD
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	84.555.000	DISPARBUD
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**14.603.024.143**	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**14.603.024.143**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.948.133.000**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.200.000**	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.375.000	DISPARBUD
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	105.000	DISPARBUD

3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	105.000	DISPARBUD
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105.000	DISPARBUD
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	105.000	DISPARBUD
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.000	DISPARBUD
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	DISPARBUD
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.618.883.000**	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.474.013.000	DISPARBUD
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.870.000	DISPARBUD
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**184.050.000**	
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	DISPARBUD
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	DISPARBUD
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DISPARBUD
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.050.000	DISPARBUD
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.096.000.000**	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	DISPARBUD
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.996.000.000	DISPARBUD
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.000.000**	
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	DISPARBUD
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	DISPARBUD
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**5.960.295.000**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**250.000.000**	
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	250.000.000	DISPARBUD

3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**5.710.295.000**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	DISPARBUD
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.704.125.000	DISPARBUD
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	496.170.000	DISPARBUD
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000	DISPARBUD
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**146.707.143**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**146.707.143**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000	DISPARBUD
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	56.707.143	DISPARBUD
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000	DISPARBUD
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**547.889.000**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**547.889.000**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	547.889.000	DISPARBUD
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**6.905.877.000**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**6.905.877.000**	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.935.877.000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.585.877.000**	

2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.546.000**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.300.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.900.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.900.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.900.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.900.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.830.000	DISKARPUS
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.816.000	DISKARPUS
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.719.345.000**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.592.601.000	DISKARPUS
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.560.000	DISKARPUS
2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.184.000	DISKARPUS
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.806.000**	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.806.000	DISKARPUS
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**252.822.000**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	DISKARPUS
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.270.000	DISKARPUS
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	DISKARPUS
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.649.000	DISKARPUS
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000	DISKARPUS
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.903.000	DISKARPUS
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	DISKARPUS

2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.174.220.000**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.900.000	DISKARPUS
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.320.000	DISKARPUS
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**255.138.000**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.500.000	DISKARPUS
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.350.000	DISKARPUS
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	DISKARPUS
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.288.000	DISKARPUS
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	DISKARPUS
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**350.000.000**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**305.000.000**	
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	40.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	20.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	125.000.000	DISKARPUS
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**45.000.000**	
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25.000.000	DISKARPUS
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20.000.000	DISKARPUS

2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**970.000.000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**953.812.000**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**311.115.000**	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	267.366.000	DISKARPUS
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	43.749.000	DISKARPUS
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**439.437.000**	
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	439.437.000	DISKARPUS
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**203.260.000**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	149.480.000	DISKARPUS
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	53.780.000	DISKARPUS
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**16.188.000**	
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**16.188.000**	
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16.188.000	DISKARPUS
					Dinas Perikanan	**7.348.821.290**	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**7.348.821.290**	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**7.348.821.290**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.273.621.290**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.000.000**	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.483.181.000**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.168.181.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.510.290**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.347.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.755.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.408.290	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.000.000**	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448.930.000**	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.780.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.550.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**160.000.000**	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**1.003.600.000**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**729.600.000**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	20.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	29.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	680.600.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**174.000.000**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	122.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100.000.000**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**558.600.000**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**353.600.000**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	275.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	78.600.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**205.000.000**	

3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.320.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.680.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**513.000.000**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**323.000.000**	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	323.000.000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**190.000.000**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	DINAS PERIKANAN
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**16.913.621.368**	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**16.913.621.368**	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**15.537.097.368**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.457.097.368**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.262.173.000**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.133.993.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.180.000	DISPERINDAG
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.000.000**	

3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.114.924.368**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.020.560	DISPERINDAG
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.989.903.808	DISPERINDAG
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.000.000**	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**920.000.000**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**920.000.000**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	920.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**10.000.000**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**70.000.000**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	70.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**50.000.000**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**50.000.000**	

3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000	DISPERINDAG
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**30.000.000**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**30.000.000**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000	DISPERINDAG
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1.376.524.000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1.366.524.000**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**1.366.524.000**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.000.000	DISPERINDAG
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	70.000.000	DISPERINDAG
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.276.524.000	DISPERINDAG
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**10.000.000**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	10.000.000	DISPERINDAG
					Sekretariat Daerah	**53.159.845.693**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**53.159.845.693**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**53.159.845.693**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**28.294.487.709**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**91.360.000**	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.660.000	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.727.399.448**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.379.766.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	305.730.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.903.448	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**140.300.000**	
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.976.408.000**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.667.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	91.521.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.011.928.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.340.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.221.952.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.136.965.000**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.050.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	44.410.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.555.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.135.060.000**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.695.060.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**979.392.000**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.830.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	567.890.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	60.160.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.429.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.783.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**977.851.261**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	155.637.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	697.213.761	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**290.000.000**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	290.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**340.500.000**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**499.252.000**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	168.055.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	106.110.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	225.087.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**23.501.252.900**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**440.500.000**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	76.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	356.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**22.869.003.100**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.569.003.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	19.270.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.030.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**183.286.600**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	49.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	85.286.600	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	49.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**8.463.200**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8.463.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.364.105.084**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**430.000.000**	

4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	310.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**133.768.000**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	32.104.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	41.468.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60.196.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**137.195.130**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.195.130	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**663.141.954**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	538.141.954	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					Sekretariat DPRD	**48.387.478.604**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**48.387.478.604**	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**	**48.387.478.604**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**42.062.556.604**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.426.200**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.801.200	SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.625.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.529.480.000**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.320.240.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.240.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000**	
4	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.092.280.300**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.626.300	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.070.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.769.400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.076.600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.720.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	817.018.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91.294.000**	
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.294.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.327.717.500**	

4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.861.500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.856.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**891.324.604**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	739.664.604	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.660.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**33.045.034.000**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.025.034.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	15.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**6.324.922.000**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**870.000.000**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	230.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**290.000.000**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**545.000.000**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	130.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	130.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	130.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	130.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3.024.000.000**	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	288.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.490.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1.075.922.000**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	45.922.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**70.000.000**	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	70.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**450.000.000**	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	140.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**7.587.845.017**	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.587.845.017**	
5	**01**				**PERENCANAAN**	**7.375.745.017**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.691.845.017**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.000**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.580.409.000**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.467.489.000	BAPPEDA
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.920.000	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**212.373.017**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.031.000	BAPPEDA
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.568.000	BAPPEDA
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.136.517	BAPPEDA
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.380.500	BAPPEDA
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.768.000	BAPPEDA
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.489.000	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**752.948.000**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000	BAPPEDA
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.440.000	BAPPEDA
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.248.000	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**143.115.000**	

5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.903.000	BAPPEDA
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.544.000	BAPPEDA
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.668.000	BAPPEDA
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**345.500.000**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**255.500.000**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	136.000.000	BAPPEDA
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	119.500.000	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**15.000.000**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**75.000.000**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000	BAPPEDA
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**338.400.000**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**166.700.000**	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	60.000.000	BAPPEDA
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.700.000	BAPPEDA
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**70.000.000**	

5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35.000.000	BAPPEDA
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	35.000.000	BAPPEDA
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**101.700.000**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	101.700.000	BAPPEDA
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**212.100.000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**212.100.000**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**212.100.000**	
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	160.400.000	BAPPEDA
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	51.700.000	BAPPEDA
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**438.986.556.315**	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**438.986.556.315**	
5	**02**				**KEUANGAN**	**438.986.556.315**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.924.312.001**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.240.879**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.250.000	BPKAD
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.456.397	BPKAD
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.534.482	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.842.466.249**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.468.640.000	BPKAD
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.840.000	BPKAD

5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.350.000	BPKAD
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	500.000	BPKAD
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.136.249	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.592.014**	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.255.094	BPKAD
5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	668.460	BPKAD
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	668.460	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.364.654**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	682.052	BPKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.953.747	BPKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.289.468	BPKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.654.469	BPKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.137.304	BPKAD
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	4.091.861	BPKAD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.666.544	BPKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.775.110	BPKAD
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.114.099	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.682.722**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	374.389	BPKAD
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.308.333	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.901.367.690**	

5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.118.556	BPKAD
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.225.134	BPKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.744.024.000	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.597.793**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.213.420	BPKAD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.456.398	BPKAD
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.927.975	BPKAD
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**413.858.417.633**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**934.006.566**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	82.263.089	BPKAD
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.704.539	BPKAD
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45.699.422	BPKAD
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	75.568.544	BPKAD
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	267.660.000	BPKAD
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	294.416.624	BPKAD
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	75.321.343	BPKAD
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5.570.497	BPKAD
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	7.798.696	BPKAD
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4.456.398	BPKAD
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25.547.414	BPKAD

5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**287.940.868**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48.925.643	BPKAD
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84.735.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	28.826.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	13.369.193	BPKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4.400.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	107.685.032	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**102.185.199**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	11.048.000	BPKAD
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17.020.000	BPKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	50.698.000	BPKAD
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.294.000	BPKAD
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	18.125.199	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**412.534.285.000**	

5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	368.844.402.000	BPKAD
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000	BPKAD
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.689.883.000	BPKAD
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**401.967.073**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**401.967.073**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	25.178.647	BPKAD
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	29.684.065	BPKAD
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	891.280	BPKAD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	254.905.948	BPKAD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	668.460	BPKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	26.983.488	BPKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.492.823	BPKAD
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.162.362	BPKAD
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.801.859.608**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.801.859.608**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.780.000	BPKAD
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	288.322.608	BPKAD
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	1.076.335.000	BPKAD
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	115.284.000	BPKAD
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	75.498.000	BPKAD
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	67.640.000	BPKAD
					Badan Kepegawaian Daerah	**6.736.243.322**	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.736.243.322**	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**	**6.736.243.322**	

5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.271.624.322**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	BKD
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.851.177.022**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.742.877.022	BKD
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.300.000	BKD
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.401.300**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.298.300	BKD
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	BKD
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	BKD
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.800.000	BKD
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.303.000	BKD
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	BKD
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.567.000**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5.145.000	BKD
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.422.000	BKD
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**156.200.000**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.300.000	BKD
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.250.000	BKD
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.650.000	BKD
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.279.000**	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.579.000	BKD

5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.700.000	BKD
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.464.619.000**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**544.579.000**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	323.814.000	BKD
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	70.765.000	BKD
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	35.000.000	BKD
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000	BKD
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	11.300.000	BKD
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	33.700.000	BKD
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**466.543.000**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	BKD
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	70.000.000	BKD
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	366.543.000	BKD
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**301.134.000**	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	149.134.000	BKD
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5.000.000	BKD
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	147.000.000	BKD
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**152.363.000**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32.520.000	BKD
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	10.000.000	BKD
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	109.843.000	BKD
					Inspektorat	**11.914.991.146**	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.914.991.146**	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.914.991.146**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.211.581.000**	

6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.500.000**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.500.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.211.521.000**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.146.521.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**317.000.000**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.000.000**	
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.560.000**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.560.000	INSPEKTORAT

6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**229.000.000**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.969.000.000**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.819.000.000**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	774.000.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	645.000.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**150.000.000**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	150.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.734.410.146**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**500.000.000**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	500.000.000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**1.234.410.146**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	784.410.146	INSPEKTORAT
					Kecamatan Kedung	**3.133.694.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.133.694.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.133.694.000**	

7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.983.118.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.820.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.762.269.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.509.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.378.700**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.318.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.718.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.890.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.550.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.786.700	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.616.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.736.500**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.319.500	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.417.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.345.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.720.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.625.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.568.800**	

7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.381.600	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.507.200	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**47.705.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**47.705.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.705.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**39.440.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.440.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.440.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**15.925.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**15.925.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.925.000	KECAMATAN KEDUNG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**47.506.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**47.506.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14.316.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.263.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.842.000	KECAMATAN KEDUNG
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.418.000	KECAMATAN KEDUNG

7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.667.000	KECAMATAN KEDUNG
					Kecamatan Pecangaan	**3.273.334.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.273.334.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.273.334.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.134.029.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**350.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.876.741.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.846.981.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.557.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.461.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.292.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.641.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.662.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.745.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	16.078.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.678.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.940.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.940.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**124.722.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	290.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.432.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000	KECAMATAN PECANGAAN

7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.719.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.800.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.880.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.239.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**47.904.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**47.904.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.904.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**29.726.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**29.726.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.726.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**8.500.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8.500.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.500.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.375.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.375.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.375.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**50.800.000**	

7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**50.800.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.786.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.939.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.205.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.998.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.103.000	KECAMATAN PECANGAAN
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.769.000	KECAMATAN PECANGAAN
					Kecamatan Kalinyamatan	**3.387.374.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.387.374.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.387.374.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.274.305.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.020.250.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.992.090.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.360.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	800.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.094.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	KECAMATAN KALINYAMAT

							AN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.500.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	3.300.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.694.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.622.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.622.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.381.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	420.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.491.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.470.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.408.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.799.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.128.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.110.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.371.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**32.488.000**	

7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**32.488.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32.488.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.590.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**19.590.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.590.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.410.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.410.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.410.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**300.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**300.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	300.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**55.281.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**55.281.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.281.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.000.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000	KECAMATAN KALINYAMATAN

7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.500.000	KECAMATAN KALINYAMATAN
					Kecamatan Welahan	**3.811.928.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.811.928.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.811.928.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.691.439.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.660.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.660.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.464.182.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.405.322.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.610.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.494.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.645.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.920.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.483.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.284.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.562.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.082.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	12.582.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136.845.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	KECAMATAN WELAHAN

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.660.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.385.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.176.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.125.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.504.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.547.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**41.735.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**41.735.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41.735.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**22.815.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22.815.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.815.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**9.650.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**9.650.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.650.000	KECAMATAN WELAHAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**46.289.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**46.289.000**	

7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.425.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.440.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.200.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.100.000	KECAMATAN WELAHAN
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.124.000	KECAMATAN WELAHAN
					Kecamatan Mayong	**3.349.385.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.349.385.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.349.385.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.191.225.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.925.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.925.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.945.257.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.888.712.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.260.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	285.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**380.000**	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	380.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.925.000**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.925.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.211.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.426.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.344.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.528.000	KECAMATAN MAYONG

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.975.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.457.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.095.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.386.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.292.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.320.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.972.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.245.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	620.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.100.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.525.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.990.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.097.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.128.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.040.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.725.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**52.970.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**52.970.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.970.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**35.130.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**35.130.000**	

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.130.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.570.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**14.570.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.570.000	KECAMATAN MAYONG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**55.490.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**55.490.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.475.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.910.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.965.000	KECAMATAN MAYONG
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.175.000	KECAMATAN MAYONG
					Kecamatan Nalumsari	**4.094.072.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**4.094.072.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**4.094.072.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.933.908.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.900.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.900.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.690.850.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.090.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.557.000**	

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.505.200	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.637.400	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.300.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.023.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.671.400	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.420.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.131.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.131.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.120.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.400.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.350.000**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.480.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.370.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**32.036.000**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**10.844.000**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.844.000	KECAMATAN NALUMSARI

7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**21.192.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.192.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**81.561.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**48.340.000**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.005.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.335.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**33.221.000**	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	33.221.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**11.129.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**11.129.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.129.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.184.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.184.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.184.000	KECAMATAN NALUMSARI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**25.254.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25.254.000**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.254.000	KECAMATAN NALUMSARI
					Kecamatan Batealit	**3.124.624.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.124.624.000**	

7	**01**				**KECAMATAN**	**3.124.624.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.010.624.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.500.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.691.898.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.666.714.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.684.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.000.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.000.000**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85.290.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.290.000	KECAMATAN BATEALIT

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27.796.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	2.796.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.140.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.140.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**40.000.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**40.000.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**27.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**27.000.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**14.000.000**	

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**33.000.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**33.000.000**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000	KECAMATAN BATEALIT
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.000.000	KECAMATAN BATEALIT
					Kecamatan Tahunan	**2.836.836.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.836.836.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.836.836.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.699.382.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.800.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	804.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	996.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.444.118.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.379.507.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.611.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.845.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	918.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	KECAMATAN TAHUNAN

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.534.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.609.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	848.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.936.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.414.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.414.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**124.900.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.500.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.305.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.196.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.109.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**47.696.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**47.696.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.696.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**41.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**41.000.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.000.000	KECAMATAN TAHUNAN

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10.000.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**38.758.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**38.758.000**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.440.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.131.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.282.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.265.000	KECAMATAN TAHUNAN
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.640.000	KECAMATAN TAHUNAN
					Kecamatan Jepara	**16.603.866.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**16.603.866.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**16.603.866.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.332.057.500**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.770.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.470.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.026.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.274.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.126.944.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.069.187.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.440.000	KECAMATAN JEPARA

7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.317.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**49.700.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.700.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**451.097.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.080.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.426.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.567.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.024.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**380.344.500**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.344.500	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**828.310.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.950.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.800.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.560.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**483.892.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.739.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.153.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.654.000**	

7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12.654.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.654.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.098.613.000**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.997.563.500**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.000.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.307.419.030	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.630.980.970	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	4.163.500	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**17.079.000**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.079.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**83.970.500**	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5.517.500	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	11.715.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.785.000	KECAMATAN JEPARA

7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4.105.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.505.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	46.343.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**49.903.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**49.903.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.371.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.532.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.631.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.631.000**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.631.000	KECAMATAN JEPARA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**95.007.500**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**95.007.500**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.250.000	KECAMATAN JEPARA
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.257.500	KECAMATAN JEPARA
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	KECAMATAN JEPARA

7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.500.000	KECAMATAN JEPARA
					Kecamatan Mlonggo	**3.218.981.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.218.981.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.218.981.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.087.863.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**991.500**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	501.500	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.820.568.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.779.068.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.000.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.127.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.127.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	3.000.000	KECAMATAN MLONGGO

7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.500**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.988.500	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.012.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.570.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.570.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.606.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.518.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.008.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.080.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**61.118.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**61.118.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	61.118.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**22.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22.000.000**	

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**8.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8.000.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**3.000.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**3.000.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**37.000.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**37.000.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.000.000	KECAMATAN MLONGGO
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.000.000	KECAMATAN MLONGGO
					Kecamatan Pakisaji	**2.708.253.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.708.253.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.708.253.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.590.003.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.000.000**	

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.313.220.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.278.060.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.160.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.418.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.018.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.680.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	17.480.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**130.800.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.900.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.700.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.885.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.635.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.250.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	KECAMATAN PAKISAJI

7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**30.650.000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25.000.000**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5.650.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.650.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**38.800.000**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**38.800.000**	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	38.800.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10.000.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.800.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5.800.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**33.000.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**33.000.000**	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	KECAMATAN PAKISAJI

7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.000.000	KECAMATAN PAKISAJI
					Kecamatan Bangsri	**3.036.079.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.036.079.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.036.079.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.860.899.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.800.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.440.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.360.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.615.563.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.570.163.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	400.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.000.000**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.500.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	KECAMATAN BANGSRI

7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23.500.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.500.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.360.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.560.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.776.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.776.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**57.500.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**57.500.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57.500.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**35.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**35.000.000**	

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**15.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**15.000.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**57.680.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**57.680.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.180.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.000.000	KECAMATAN BANGSRI
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.000.000	KECAMATAN BANGSRI
					Kecamatan Kembang	**3.139.828.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**3.139.828.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**3.139.828.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.977.841.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.000.000**	

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.678.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.322.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.730.260.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.000.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.000.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.088.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.168.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.554.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.166.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.500.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.500.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.585.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000	KECAMATAN KEMBANG

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.685.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.408.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.403.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.155.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.850.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**68.930.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**68.930.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.930.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**35.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**35.000.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10.065.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10.065.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.065.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	KECAMATAN KEMBANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**37.992.000**	

7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**37.992.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.535.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.695.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.820.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.535.000	KECAMATAN KEMBANG
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.407.000	KECAMATAN KEMBANG
					Kecamatan Keling	**2.863.575.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.863.575.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.863.575.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.736.349.500**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**437.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.454.465.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.424.535.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.760.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	170.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**385.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	170.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**188.000**	
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.473.800**	

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.102.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.258.800	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.517.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.344.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.996.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.256.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.200.000**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.100.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.100.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**148.550.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.900.000	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.850.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.650.700**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.994.500	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.629.500	KECAMATAN KELING
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.026.700	KECAMATAN KELING
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**30.092.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**30.092.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.092.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**27.400.500**	

7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**27.400.500**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.400.500	KECAMATAN KELING
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**17.548.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**17.548.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.548.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.380.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.380.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.380.000	KECAMATAN KELING
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**42.805.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**42.805.000**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.420.000	KECAMATAN KELING
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.299.000	KECAMATAN KELING
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.390.000	KECAMATAN KELING
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.400.000	KECAMATAN KELING
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.296.000	KECAMATAN KELING
					Kecamatan Donorojo	**2.665.515.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.665.515.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.665.515.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.512.157.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.660.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.560.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000	KECAMATAN DONOROJO

7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.221.002.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.161.002.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.500.000**	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72.785.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.100.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.785.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.500.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.800.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.300.000	KECAMATAN DONOROJO

7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.910.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.910.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**110.009.000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**38.654.000**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.654.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**71.355.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	71.355.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.854.000**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**8.854.000**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.854.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.800.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2.800.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.800.000	KECAMATAN DONOROJO
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.695.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**31.695.000**	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.330.000	KECAMATAN DONOROJO

7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.970.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.220.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.915.000	KECAMATAN DONOROJO
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.260.000	KECAMATAN DONOROJO
					Kecamatan Karimunjawa	**6.798.628.000**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**6.798.628.000**	
7	**01**				**KECAMATAN**	**6.798.628.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.480.534.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.800.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.754.980.000**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.340.980.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	414.000.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.329.000**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.885.900	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.637.800	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.176.300	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.941.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.445.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.528.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.415.000	KECAMATAN KARIMUNJAW

							A
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.300.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.594.000**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.594.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.665.000**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.340.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.125.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**335.166.000**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.730.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.436.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.000.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**95.595.000**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**95.595.000**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95.595.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**99.890.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**99.890.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.890.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**75.560.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**75.560.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.560.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**47.049.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**47.049.000**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.600.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.028.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.421.000	KECAMATAN KARIMUNJAWA
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**43.737.633.662**	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**43.737.633.662**	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**43.737.633.662**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.198.349.612**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.900.000**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.596.001.000**	

8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.475.011.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	990.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.200.000**	
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	480.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	720.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.000.000**	
8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**154.393.612**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.272.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	946.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.114.312	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.036.300	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.025.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.200.000**	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**336.655.000**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.655.000	BAKESBANGPOL

8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.000.000**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	500.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**435.000.000**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**435.000.000**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	85.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	350.000.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**39.791.084.050**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**39.791.084.050**	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.791.084.050	BAKESBANGPOL

8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**79.200.000**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**79.200.000**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.440.000	BAKESBANGPOL
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.760.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**25.000.000**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**25.000.000**	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.000.000	BAKESBANGPOL
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**209.000.000**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**209.000.000**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45.000.000	BAKESBANGPOL

8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30.000.000	BAKESBANGPOL
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	134.000.000	BAKESBANGPOL
J U M L A H						**2.362.335.128.029**	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan

melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Tramtibum dan Linmas
6. Urusan Sosial

2. Dasar Hukum

Agar supaya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat mudah untuk dievaluasi, maka perlu peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2019 Nomor.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/868/Bangda tanggal 13 Februari 2018 tentang Pelaksanaan SPM;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
21. Keputusan Bupati Jepara Nomor 100/27 Tahun 2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara Tahun 2023-2025;
22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 370 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

3. Kebijakan Umum

Dalam menentukan Kebijakan Umum Daerah untuk rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan selanjutnya mengintegrasikan SPM ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk jangka pendek (tahunan) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, SPM juga diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran (APBD). Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta menerapkan SPM sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jepara guna menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan harus mendapatkan dukungan di dalam perencanaan penganggaran selama periode RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023- 2026. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 terdapat visi dan misi Bupati Jepara yaitu ”JEPARA RELIGIUS, MAJU, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERDAYA SAING”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut terdapat misi pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, berilmu (cerdas),dan sehat
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi

3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik
4. Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jepara mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut yang terintegrasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 menggunakan hasil pemetaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Program Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang Mendukung Pencapaian SPM

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. 1. Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro yang memuat Indeks Pembangunan manusia sampai dengan Rasio Gini, data yang disajikan adalah tahun 2023 dan tahun 2024 yang diambil berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Jepara.

Tabel
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	2023	2024	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,85	74,32	Meningkat 0,47
2	Angka Kemiskinan	6,61	6,09	Menurun 0,52
3	Angka Pengangguran	3,35	3,34	Menurun 0,01
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,17*	4,22**	Melambat 0,95
5	Pendapatan Per Kapita	31,16*	32,90**	Meningkat 5,58
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,326	0,277	Menurun 0,049

Data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2024
*Angka Sementara.
**Angka sangat Sementara.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Urusan Pendidikan

  Urusan pendidikan yang dilakasanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, tingkat keberhasilan atau capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

  1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.

Dari 39.726 anak yang berusia 5-6 tahun, ada 37.665 anak yang sudah tamat maupun sedang belajar di satuan PAUD selama tahun 2024 atau capaiannya sebesar 94,81%.

2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

   Pada Tahun 2024, anak usia 7-12 tahun, dari 123.443 total anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Jepara semuanya sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar, dengan capaian 100%.

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

   Pada tahun 2024, di Kabupaten Jepara terdapat dari total anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Jepara yaitu 63.573 anak usia 13-15, terdapat 58.577 anak yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama atau sebesar 92,14%.

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

   Dari total 3.483 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Jepara, 3.156 belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 90,61%.

❖ **Urusan Kesehatan**

Indikator kinerja kunci untuk urusan kesehatan adalah :

1. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

   Jumlah penduduk Kabupaten Jepara terbilang cukup besar. Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.283.687 jiwa. Sedangkan daya tampung rumah sakit rujukan yang ada adalah 12.671 atau capaiannya baru sebesar 0,987%.

2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi.

Untuk melayani kesehatan masyarakat, di Jepara sudah ada 6 buah rumah sakit dan jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 6 dengan capaian 100%.

3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2024

   Pada tahun 2024 jumlah ibu hamil yang ada di Jepara mencapai 17.174 orang, dan semuanya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan capaiannya sebesar 100%.

4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

   Dari 17.021 ibu bersalin yang ada di Jepara semuanya sudah mendapatkan pelayanan persalinan, sehingga capaiannya 100%.

5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

   Bayi yang lahir pada tahun 2024 sebanyak 16.924 dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 100%.

6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

   Pada tahun 2024, balita di kabupaten Jepara sebanyak 90.219 anak dan semuanya sudah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%.

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

   Pada tahun 2024, dari anak usia pendidikan dasar yang berjumlah 187.016 anak, dan semuanya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaiannya 100%.

8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

   Penduduk usia 15-59 tahun yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 826.690 orang, dan semuanya sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sehingga capaiannya 100%.

9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 162.578, dan semuanya sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, sehingga capaiannya 100%.

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

    Penderita hipertensi yang ada di Jepara pada tahun 2024 sebanyak 175.015 orang. Sedangkan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 175.015 orang dengan capaian 100%.

11. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

    Penderita Diabetes Mellitus yang ada di Jepara sebanyak 30.315 orang. Semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%

12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

    Penderita ODGJ yang ada di Jepara sebanyak 2.599 orang. Sedangkan penderita ODGJ dan semuanya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 100%.

13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

    Penderita TBC yang ada di Jepara sebanyak 14.609 orang. Dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%.

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

    Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang ada di Jepara sebanyak 26.474 orang dan yang sudah seluruhnya mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar dengan capaian 100%.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk data IMB-nya. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten

   Di Kabupaten Jepara luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai sejumlah 10.677,12 (ha) dan semuanya telah terlindungi oleh infrastuktur pengendalian banjir di wilayah sungai dengan capaian 100%.
2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten.

   Di Kabupaten Jepara, luas kawasan permukiman sepanjang rawan abrasi di wilayah sungai ada 1.855,63 dan semuanya telah terlindungi oleh infrastuktur pengaman patai di wilayah sungai sehingga capaiannya 100%.
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

   Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 28.247 dan sudah semuanya yang menjadi kewenangan kabupaten dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) sehingga capaian 100%.
4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

   Dari total rumah tangga di Kabupaten Jepara adalah 402.129 rumah, dan yang mendapatkan mendapatkan akses terhadap

air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sejumlah 389.157 dengan capaian 96,79%.

5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

   Dari seluruh kabupaten jepara jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jepara tahun 2024, yaitu 402.129 dan yang telah memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sejumlah 307.655 dengan capaian 76,51%.

6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten.

   Dari 322 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku semuanya sudah sesuai pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dengan capaian 100%.

7. Tingkat Kemantapan jalan.

   Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten Jepara adalah 854.027 km, dan yang kondisi mantap sepanjang 753.109 km atau capaiannya sebesar 88,18%.

8. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

   Dari 310 kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah Kabupaten Jepara, ada 81 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis dengan capaian 26,12%.

9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.

   Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 311 semuanya tidak terjadi kecelakaan konstruksi

- **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten.

   Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024 sebanyak 3 dan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 3 unit dengan capaian sebesar 100%.
2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.

   Pada tahun 2024 kabupaten Jepara dari jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang memenuhi kriteria sebanyak 12 dan semuanya telah menerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan, dengan capaian 100%.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten Jepara yang ditangani tahun 2024

   Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ada di Kabupaten Jepara adalah 67,73 hektar, 2,22 hektar sudah ditangani sehingga capaian 3,27%.
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Jepara tahun 2024

   Dari jumlah total seluruh unit rumah di Kabupaten Jepara yaitu 365.673 unit, ada 9.116 unit rumah yang tidak layak huni. Dengan capaian 2,493%.
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2024

   Dari total rumah yang ada di Jepara yaitu 5.413 unit, sudah semua unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak dengan capaian 100%.

❖ **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

   Dari 6 pengaduan pelanggaran yang masuk pada tahun 2024 semuanya bisa diselesaian.capaian 100%.

2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

   Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi pada tahun 2024 sebanyak 8 Perda dan seluruhnya memuat sanksi yang ditegakkan, dengan capaian 100%.

3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

   Dari seluruh target penduduk Kabupaten Jepara, yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 95.919 orang, dan seluruhnya sudah mendapatkan layanan informasi rawan bencana dengan capaian 100%.

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

   Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana di Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebanyak 140 sedangkan yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak 140, dengan capaian 100%.

5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Jepara Tahun 2024.

   Dari 140 yang menjadi korban bencana dan semuanya telah memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100%.

6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

   Dari 78 kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2024, yang dapat dijangkau dan ditangani sampai padam sebanyak 64 kejadian sehingga capainnya sebesar 82,05%.

7. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran.

   Response time penanganan kebakaran adalah 12,15 menit.

❖ **Urusan Sosial**

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

   Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.223 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 2.223 orang atau capaiannya sebesar 100%.

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

   Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 348, dan seluruh korban bencana alam dan sosial sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga capaian kinerjanya 100%.

❖ **Tenaga Kerja**

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

   Pada tahun 2024 dari 9 seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten jepara dan semuanya telah mengacu pada RTKD, capaian 100%.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 164.883 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 1.169 orang atau 0,71% capaiannya meningkat dari tahun seblumnya sebesar 0,66%.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

   Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 164.883 orang. Sedangkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 25.482.070.000.000,00 sehingga capaiannya adalah 15,546375,31%.
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar).

   Pada tahun 2024, perusahaan yang ada di Jepara berjumlah 430. Perusahaan sudah menerapkan tata kelola kerja yang baik sebanyak 57 perusahaan atau 13,26%.
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah.

   Dari 26.195 pencari kerja yang terdaftar, ada 10.817 pencari kerja yang ditempatkan atau 41,29%, capaiannya menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 56,94%.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

   Belanja langsung APBD Kab. Jepara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.067.577.666.737 sedangkan Jumlah ARG pada belanja operasionla pada APBD sebesar Rp. 177.535.539.332 dengan capaian 9%.
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten.

   Pada tahun 2024, di Kabupaten Jepara terdapat 16 anak (berusia kurang dari 18 tahun) yang menjadi korban kekerasan sementara jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten Jepara yang (usia penduduk kurang dari 18 tahun) sejumlah 16, capaian 100%.
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

Pada tahun 2024 di kabupaten Jepara dari 325.450 penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Jepara yang mengalami kekerasan sejumlah 8 orang sehingga capaian 2,34%.

❖ **Pangan**

1. Persentase cadangan pangan.

   Pada tahun 2024, jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten Jepara 85,36 ton sedangkan jumlah target cadangan pangan 42 ton sehingga capaiaan 203,24%.

❖ **Pertanahan.**

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

   Pada tahun 2024 di Kabupaten Jepara dari 1.252.043,08 m^2 luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) seluruhnya sudah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), capaian 100%.

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

   Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum pada tahun 2024 tidak ada pembangunan untuk fasilitas umum.

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

   Pada tahun 2024 di Kabupaten Jepara dari luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan seluas 1.252.043,08 M2, semuanya sudah sesuai peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).capaian 100%

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

   Pada tahun 2024 tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.

   Tidak tersedia tanah untuk rakyat di Kabupaten Jepara pada tahun 2024

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

   Kabupaten Jepara pada tahun 2024 tidak terdapat sengketa tanah Garapan.

❖ **Lingkungan Hidup.**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 63,16
   - Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) : 49,00
   - Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) : 87,42
   - Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40% : 42,61
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten.

   Pada saat ini, persoalan sampah menjadi masalah di semua wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Jepara dari 157.915,99 timbunan sampah, baru baru 54,73 % atau 8.643,98 timbunan sampah yang dapat tertangani.

3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

   Pada tahun 2024, ada 25 Usaha dan/ atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dan sudah semuanya atau 18 penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Jepara dengan capaian 72%.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Perekaman KTP Elektronik

   Pada tahun 2024 di kabupaten jepara , dari jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yaitu 950.014 orang, terdapat 950.447

orang 17 tahun keaatas yang sudah melakukan perekaman dan memiliki ktp-el capaiannya 99,95%.

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

   Dari 328.323 anak di tahun 2024 yang ada di Jepara, sebanyak 222.971 atau 67,91% anak sudah memiliki KIA.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran.

   jumlah penduduk 0-18 tahun di kabupaten Jepara sejumlah 342.791 yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 340.623 orang atau 99,37%.

4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

   Dari 25 Perangkat Daerah (kecamatan tidak termasuk), yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebanyak 11 PD dengan capaian 44%.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Persentase pengentasan desa tertinggal.

   Pada tahun 2024, di Kabupaten Jepara tidak terdapat desa yang masuk kategori desa tertinggal.

2. Persentase peningkatan status desa mandiri.

   Pada tahun 2024, di Kabupaten Jepara terdapat 62 desa yang berstatus sebagai desa berkembang dan terdapat 2 desa yang termasuk kategori desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun, sehingga capaian 3,32%.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

   Angka kelahiran total di kabupaten Jepara adalah 2,03.

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR).*

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2024 di Kabupaten Jepara 211.993 dan yang menjadi peserta KB aktif Modern sebanyak 145.214 dengan capaian 68,50%.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmeet need).*

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2024 di Kabupaten Jepara terdapat 211.993 PUS, dan yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani sebanyak 16.179 PUS atau 7,6%.

❖ **Perhubungan**

1. Rasio konektivitas kabupaten

   Rasio konektvitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) yaitu 1 + 0,64 /2 = 0,82 trayek/ lintas Kinerja lalu lintas kabupaten.
2. V/C ratio di jalan kabupaten Jepara adalah 0,21%.

❖ **Komunikasi dan Informatika**

1. Persentase Perangkat Organisasi Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

   Dari 42 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara, OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 33 PD atau 78,58%.
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.

   Dari 14 Layanan Publik yang ada pada tahun 2024 dan semuanya sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 100%.
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.

   Pada tahun 2024, jumlah pendudUK usia 15-64 tahun Kabupaten Jepara tahun 2024 sebanyak 884.240 jiwa, yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,

mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebanyak 884.240 jiwa. Sehingga capaian 100%.

❖ **Koperasi dan UKM**

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.

   Di Tahun 2024, total koperasi yang ada di Jepara sebanyak 326 koperasi, dan yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sebanyak 170 buah, capaiannya 52,15% naik dari tahun sebelumnya 25,55%

2. Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.

   Dari 78.023 usaha kecil yang ada di Jepara, ada 8.868 usaha kecil yang menjadi wirausaha capaiannya 11,37% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4.80%.

❖ **Penanaman Modal.**

1. Jumlah investasi kabupaten Jepara tahun 2024 sebesar 8.273.369.474.586 dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 8.928.971.312.243 dengan Persentase peningkatan investasi di kabupaten Realisasi investasi tahun 2024 adalah -7,34%.

❖ **Kepemudaan dan Olahraga**

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

   Pada tahun 2024, di kabupaten Jepara terdapat 289.834 pemuda (umur 16-30 tahun) dan sejumlah 24.224 orang berwirausaha dengan capaian 8,36%

2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

   Dari total 289.834 pemuda (umur 16-30 tahun) di tahun 2024, terdapat 132.725 orang yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi dengan capaian 45,79%

3. Peningkatan prestasi olahraga

   Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2024 sebanyak 52 medali meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 48 medali

❖ **Statistik**

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

   Dari 26 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, semuanya sudah yang telah menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%.
2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

   Dari 26 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, semuanya telah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%.

❖ **Persandian.**

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Jepara

   Pada tahun 2024, di kabupaten Jepara jumlah nilai per area keamanan informasi 630 sedangkan area penilaian sebanyak 645 dengan capaian 97,67%.

❖ **Kebudayaan**

1. Terlestarikannya Cagar Budaya.

   Kabupaten Jepara memiliki 40 cagar budaya sampai tahun 2024. Semuanya merupakan cagar budaya dilestarikan. Dengan capaian 100%

❖ **Perpustakaan**

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

   survey kajian kegemaran membaca kabupaten Jepara kategori baik dengan capaian sebesar 78,24%.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

   survey Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur

sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) Kabupaten Jepara tahun 2024 sebesar 61,13% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 58,78%.

❖ **Kearsipan**

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.

   Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui T = (a + i + s + j)/4 Capaiannya 72,34% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 62,37%.
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

   Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui rumus T = (m + b + g + a + c + i)/6. Capainnya 83,33%.

URUSAN PILIHAN

❖ **Kelautan Perikanan**

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).

   Dari target produksi perikanan (tangkap dan bididaya) di Kabupaten Jepara 58.966.225 ton , dan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) sebanyak 59.966.225 ton dengan capaian 100,275%

❖ **Pariwisata**

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

   jumlah wisatawan mancanegara yang datang pada tahun 2024 sebanyak 19.928 orang, jumlah yang datang pada tahun 2023 sebanyak 15.251, persentasenya meningkat drastis yaitu 30,66%.

2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara per kebangsaan.

   Tahun 2023 wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 1.964.135 orang, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 2.058.854 orang, sehingga persentase peningkatannya 4,82 %.
3. Tingkat hunian akomodasi.

   Dari 387.265 jumlah kamar yang tersedia, pada tahun 2024 terdata ada 123.035 kamar yang terjual sehingga capaiannya 31,77%.
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

   Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah) 40.564,22 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) 1.898,34 atau 4,68%.
5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

   Realisasi PAD tahun 2024 sebesar 497.777.936.704, sedangkan realisasi PAD dari sektor pariwisata tahun 2024 sebesar 29.223.238.091 dengan capaian 5,87%.

❖ **Pertanian**

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

   Produktvitas pertanian di tahun 2024 adalah 8,28 ton/hektar.
2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

   Kejadian/ kasus penyakit hewan menular yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 91, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 3.152 peningkatan kasus capaian sebesar -97,11%, sehinnga tidak terjadi penurunan kasus penyakit hewan menular.

❖ **Kehutanan**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan kehutanan.

❖ **ESDM**

Kabupaten Jepara tidak ada perusahaan yang memanfaatkan panas bumi.

❖ **Perdagangan**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

   Pada tahun 2024, terdapat 111 pelaku usaha perdagangan, dan seluruhnya sudah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 84 dengan capaian 100%.
2. Persentase kinerja realisasi pupuk.

   RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebanyak 24.141.845 sedangkan realisasinya sebesar 20.678.979 atau 85,6%.
3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

   Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Jepara adalah 3.304, sedangkan UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2024 sebanyak 3.304 shingga capaiannya 100%.

❖ **Perindustrian**

1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.

   Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2024 sebanyak 13.462, sedangkan tahun 2023 sebanyak 10.551. capaian kinerja untuk urusan perindustrian adalah 27,58%.
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten), Perda RPIK Masih dalam Proses Pembahasan sehingga belum dapat dihitung.

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

   Pada tahun 2024 Dari 179 izin yang dikeluarkan terdapat 88 yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, sehingga capaiannya sebesar 49%.

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

   Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan pada tahun 2024 tidak ada.

5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

   Pada tahun 2024, Kabupaten Jepara tidaka menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.

   Sampai dengan tahun 2023, informasi industri secara lengkap terkini ada 7 yaitu :

   1. Keterkinian informasi industri dengan batas waktu 0-6 (50 %)
      - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25 %)
      - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)
   2. Kelengkapan informasi industri meliputi :
      - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
      - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)
      - Informasi bahan bakar/energy (10%)
      - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
      - Informasi tenaga kerja (10%)

❖ **Transmigrasi**

Pada Tahun 2024 berdasarkan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475/743 tanggal 5 Maret 2024 hal alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi provinsi Jawa Tengah tahun 2024, menyatakan Kabupaten Jepara belum mendapatkan kuota pemberangkatan calon transmigran karena jumlah KKnya terbatas.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	**Pendidikan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	37.665 -- x 100 % 39.726	94,81%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	123.443 ---x 100 % 123.443	100%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	58.577 -- x 100 % 63.573	82,14%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	3.156 ---x 100 % 3.483	90,04%	Disdikpora
2	**Kesehatan**	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	12.671 ---x 100 1.283.687	0,98%	Dinkes
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	6 ----x 100 6	100 %	Dinkes
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	17.174 ----- x 100 17.174	100%	Dinkes
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	17.021 ----- x 100	100%	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		persalinan	17.021		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16.924 ----- x 100 16.924	100%	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,219 ----- x 100 90,219	100%	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	187.016 -------- x 100 187.016	100%	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	826.690 -----x 100 826.690	100 %	Dinkes
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	162.578 ----- x 100 162.578	100%	Dinkes
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	175.015 ------x 100 175.015	100%	Dinkes
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.315 -----x 100 30.315	100%	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.599 ---- x 100 2.599	100 %	Dinkes
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	14,609 -----x 100 14,609	100%	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	26.474 -----x 100	100%	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	26.474		
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	10.677,12 ---X 100% 10.677,12	100%	DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	1855,63 ---X 100% 1855,63	100%	DPUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	28.247 -- X 100% 28.247	100%	DPUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	389.201 ---X 100% 402.129	96,79%	DPUPR.
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	307.655 ---X 100% 402.129	76,51%	DPUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	322 -- X 100% 322	100%	DPUPR
		Tingkat Kemantapan jalan.	753,109 ---X 100% 854,027	88,18%	DPUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	81 --x 100% 310	26,12%	DPUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	311 ---X 100% 311	100	DPUPR
4.	**Perumahan Rakyat**	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	3 -- x 100% 3	100%	Disperkim
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0+0+12 -- x 100% 12	100%	Disperkim
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	2,22 -- x 100% 67,73	3,27%	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9.116 -- x 100% 365.673	2,493%	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	5.413 -- x 100% 5.413	100%	Disperkim
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	6 --x 100 6	100%	Satpol PP & Damkar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	8 --x 100 8	100%	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	95.919 --x 100 95.919	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140 --- x 100 140	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	140 --- x 100 140	100 %	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	64 ------x100 78	82,05%	Satpol PP & Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,15 Menit	12,15	Satpol PP & Damkar
6.	**Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2.223 ---x 100% 2.223	100	Dinsos Permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	348 --- x 100% 348	100	Dinsos Permasdes
7.	**Tenaga Kerja**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	9 -- x 100% 9	100%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga Kerja	1.169 -- x 100%	0,71%	Diskop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Bersertifikat Kompetensi.	164.883		Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.	25.482.000.000,00 --x 100% 164.883	154,546,375,31	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar.	57 --x 100% 430	13,26%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	10.817 -- X 100% 26.195	41,29%	Diskop UKM Nakertrans
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	177.535.539.332 ---x 100% 2.067.577.666.737	9%	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	16 -x100% 16	100%	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8 ---100% 325.450	2,45%	DP3AP2KB
9.	**Pangan**	Persentase cadangan pangan	85,36 ton ---x 100% 42 ton	203,24%	DKPP
10.	**Pertanahan**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1.252.043,08 M2 ---x 100% 1.252.043,08 M2	100	DPMPTSP
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 -- X 100% 1	Tdi	DPUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	1.252.043,08 M2 ---x 100 1.252.043,08 M2	100	DPMPTSP
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 --x100% 1	Tdi	DPUPR
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 ----x 100% 1	Tdi	DPUPR
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 ----x 100% 1	Tdi	DPUPR
11	**Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	IKLH = 63,16 IKA = 49,00 IKU = 87,42 IKTL = 42,61	IKLH = 63,16 IKA = 49,00 IKU = 87,42 IKTL = 42,61	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	86.43,98 ---x100% 157.915,99	54,73 %	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	18 -- x 100% 25	72 %	DLH

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	Perekaman KTP Elektronik	950.447 ----x 100% 950.014	99,95	Disdukcapil
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	222.971 ---- x100% 328.323	67,91	Disdukcapil
		Kepemilikan Akta Kelahiran.	340.623 --x 100% 342.791	99,37	Disdukcapil
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	11 --- x 100% 25	44 (Kecamatan tidak termasuk)	Disdukcapil
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Persentase pengentasan desa tertinggal.	0 --- x 100% 1	tdi	Dinsos Permasdes
		Persentase peningkatan status desa mandiri	2 --- x 100% 62	3,32	Dinsos Permasdes
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,03	2.03	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).	145.214 ----x100% 211.993	68,50%	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	16.179 ---x100% 211.993	7,6%	DP3AP2KB
15	**Perhubungan**	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	$\frac{1 + 0,64}{2}$	0,82 trayek/ lintas	Dishub
		Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,21	0,21	Dishub
16	**Komunikasi dan Informatika.**	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses			Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	33 ---x 100% 42	78,57%	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.	14 ---x 100 14	100%	Diskominfo
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	884.240 ---x100% 884.240	69,32	Diskominfo
17	**Koperasi dan UKM**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	170 --x 100% 326	52,15%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha	8.868 -- x 100% 78.023	11,37	Diskop UKM Nakertrans
18	**Penanaman Modal**	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	8.273.369.474.586 – 8.928.971.312.243 ----- x100% 8.928.971.312.243	-7,34%	DPMPTSP
19	**Pemuda dan Olahraga.**	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	24.224 -- X 100% 289.834	8,36%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	132.725 --X 100% 289.834	45,79%	Disdikpora
		Peningkatan prestasi olahraga.	52	52 medali	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	**Statistik**	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	26 --x100% 26	100%	Diskominfo
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	26 ---x100% 26	100%	Diskominfo
21	**Persandian**	Tingkat keamanan informasi pemerintah.	630 ---x100% 645	97,67%	Diskominfo
22	**Kebudayaan**	Terlestarikannya Cagar Budaya.	40 ---x100% 40	100%	Disparbud
23	**Perpustakaan**	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	78,24%.	78,24%	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,13%	61,13%	Diskarpus
24	**Kearsipan**	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) + Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)+ Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) + Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)+ Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)+ Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	(0,4907+ 0,2743+0, 1617+0,3 526+1,00 00+1.000 0+1,0000) x 100 / 7 **4,2793/7 = 72,43**	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			+ Jumlah Pemustaka (UPLM7) x 100 / 7 (0,4907+0,2743+0,1617+0,3526+1,0000+1.0000+1,0000) x 100 / 7 **4,2793/7 = 72,34**		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	(m + b + g+ a + c+i)/6 m = 100% b = 12,5% g = 100% a = 100% c = 100% I = 10%	(100%+12,5%+100%+100%+100) = 83,33%	83,33% Diskarpus
25	**Kelautan Perikanan.**	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).	59.128.342 ton ---x100 % 58.966.225 ton	100,275	Dinas Perikanan
26	**Pariwisata**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	19.928-15.251= 4.677 ---x100% 15.251	30,67%	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	2.058.854-1.964.135= 94.719 ---x100% 1.964.135	4,82%	Disparbud
		Tingkat hunian akomodasi.	123.035 ---x100% 387.265	31,77%	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku .	1.898,34 --x 100% 40.564,22	4,68	Disparbud dan BPS
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	29.223.238.091 ---x 100% 497.777.936.704	5,87%	Disparbud
27	**Pertanian**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun.	554.980,09 ton ---x 100% 66,996,761 Ha	8,28ton/ha	DKPP
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-3.061 --- x 100% 3.152	-97,11	DKPP
28	**Kehutanan**			Tidak melaksanakn	
29	**ESDM**			Tidak melaksanakn	
30	**Perdagangan**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	111 --x 100% 111	100%	Disperindag
		Persentase kinerja realisasi pupuk	20.678.979 --- X100% 24.141.845	85%	Disperindag
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku).	3.304 --- x 100% 3.304	100%	Disperindag
31	**Perindustrian**	Pertambahan jumlah industri Kecil dan	13.462-10.551		Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Menengah di kabupaten.	---x 100% 10.551	27,58%	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) .	1.(X20%) = 0 2.(X20%) = 0 3.(X20%) = 0 4.(X20%) = 0 5.(X20%) = 0	Tdi Perda RPIK Masih Dalam Proses	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	88 ----- x 100 179	49 %	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0 %	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0 %	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	=(1+2) =(50%+(10%+10%+10%+10%10%)	100 %	Disperindag
32	**Transmigrasi..**	Pengembalian Alokasi	0	0	Diskop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah			Nakertrans

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

❖ **Perencanaan Dan Keuangan**

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.

   Jumlah realisasi APBD 2024 sebesar Rp. 2.447.771.976.813 sedangkan realisasi jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah 999.927.945.735 dengan capaian 40,85%

2. Rasio PAD.

   Jumlah PAD Kabupaten Jepara di tahun 2024 sebesar 497.777.936.704, sedangkan jumlah pendapatan APBD 2.549.837.564.631 Rasio PAD-nya sebesar 19,52%.

3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

   Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara adalah level 3.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

   Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara level 3.

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures).

   Realisasi Belanja APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp.2.447.771.976.813, sedangkan belanja urusan

pemerintahan dikurangi transfer Expenditures sebesar Rp. 1.721.120.357.927. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum sebesar 70,31%.

6. Opini Laporan Keuangan.

   Kabupaten Jepara, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 Opini Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tahun 2024 belum keluar, karena masih proses.

❖ **Pengadaan**

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.

   Kontrak konstruksi keseluruhan di tahun 2024 adalah 52 sedangkan kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 tidak ada.

2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

   Pada tahun 2024, di Kabupaten Jepara, pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sejumlah 5.284 paket. Sedangkan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 4.505 paket, capaian kinerjanya sebesar 85,26%.

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

   Pada tahun 2024, total belanja operasi dan modal Kabupaten Jepara sebesar Rp. 703.515.180.427 sedangkan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan Rp.384.692.161.716,06 , sehingga capaiannya sebesar 54,68%.

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah, pada tahun 2024 jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi sebesar Rp. 342.335.000.000 sedangkan jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri produk

UMKM dan koperasi tahun 2022 sebesar Rp. 549.104.000.000 sehingga hasil capaiannya -37,65%.

❖ **Kepegawaian**

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

   Pada tahun 2024 Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2024 sebanyak 1.900 orang. Sedangkan pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.215 orang. Rasionya adalah 63,95%.
2. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

   Pada tahun 2024 Jumlah seluruh PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.900 orang. Sedangkan jumlah PNS Fungsional sebanyak 339 orang dengan capaian 17,84%.
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

   Pegawai Fungsional yang ada di Jepara pada tahun 2024 sebanyak 339 orang dan yang sudah bersertifikat kompetensi sebanyak 281 dengan capaian 82,89%.

❖ **Manajemen Keuangan**

1. *Budget execution* : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.

   Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) : 2.575.605.896.300, Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi : 2.447.771.976.813. Budget execution sebesar 4,96%.
2. *Revenue mobilization* : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

   Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) adalah 466.309.174.300 Nilai absolut dari total

PAD dalam realisasi adalah 497.777.936.704. Revenue mobilization : 6,75%.

3. *Jumlah Asset Managemen* Assets management
   - Daftar asset tetap : Ada
   - Manual untuk menyusun daftar asset tetap : Ada
   - Proses inventarisasi asset tahunan : Ada
   - Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran : Ya
4. *Cash Management:* Rasio anggaran sisa terhadap total belanja APBD Tahun sebelumnya

   Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya 2.431.682.976.394 nilai Realisasi SILPA : 173.972.107.859. Rasionya : 7,15%.

❖ **Transparansi Dan Partisipasi Publik**

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units).*

Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sejumlah Rp. 2.563.589.427.118.

Realisasi Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Rp.2.447.797.224.576 dengan capaian 95,48%.

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah *(Public access to fiscal information).*

Total jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 12 dokumen. Sedangkan yang sudah dipublikasikan di website Pemda sebanyak 12 dokumen, sehingga capaian 100%.

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	ElemenData	Capaian Kinerja	Sumber Data

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	ElemenData	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	**Perencanaan Dan Keuangan**	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.	999.927.945.735 ---x 100% 2.447.771.976.813	40,85%	BPKAD
		Rasio PAD.	497.777.936.704 ---x 100% 2.549.837.564.631	19,52%	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	Inspektorat
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	Inpektorat
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	1.721.120.357.927 ---x 100% 2.447.771.976.813	70,31%	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	Bukti opini WTP (tahun 2014– 2023)	WTP. (Tahun 2024 masih proses)	BPKAD
2	**Pengadaan**	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	0 ---x100% 52	0	Bag. PBJ
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4.505 --- x 100% 5.284	85,26%	Bag. PBJ
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	384.692.161.716,06 -- X 100% 703.515.180.427	54,68%	Bag. PBJ

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	ElemenData	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. pemerintah daerah	342.335.000.000- 549.104.000.000=- 206.769.0000.000 -- X 100% 549.104.000.000	-37,65%	Bag. PBJ
3	**Kepegawaian**	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.215 -- x 100% 1.900	63,95%	BKD.
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	339 --x 100% 1.900	17,84%	BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	281 ---x 100% 339	82,89%	BKD
4	**Manajemen Keuangan.**	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.447.771.976.813 --x 100% 2.575.605.896.300	4,96%	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	497.777.936.704 --x 100% 466.309.174.300	6,75%	BPKAD
		Assets management	- Daftar aset tetap - Manual untuk menyusun aset tetap - Inventarisasi asset tahunan - Nilai aset tercantum dalam	Ya Ya Ya Ya	BPKAD

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	ElemenData	Capaian Kinerja	Sumber Data
			laporan		
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	173.972.107.859 -- x 100% 2.431.682.976.394	7,15%	BPKAD
5	**Transparansi Dan Partisipasi Publik).**	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	2.447.797.224.576 ---x 100% 2.563.589.427.118	95,48%	BPKAD
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	12 ---x 100% 12	100%	BPKAD

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan RPJMD Kabupaten Jepara berakhir di tahun 2022 dan kepala daerah baru akan terpilih setelah diadakan Pilkada tahun 2024 mendatang.

Dalam pengukuran capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana

Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Jepara.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1.	100 % lebih	BAIK SEKALI (A)
2.	> 75 % s/d100 %	Baik (B)
3.	>55 % s/d75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (D)

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026, maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Terdapat 5 Tujuan, 13 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama;

  Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Sasaran, diketahui bahwa sebanyak 20 indikator sasaran atau 68,96% bermakna Baik Sekali, 4 indikator sasaran atau 14,28 % bermakna baik, 2 indikator sasaran atau 7,14% bermakna cukup, 1 indikator sasaran atau 3,5% bermakna kurang, dan 2 indikator sasaran belum ada data capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **112,54 %**, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 139,73 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2024 bermakna Baik

Sekali meskipun ada penurunan sebesar 27,23 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen perencanaan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dokumen RPD 2023-2026 terdapat beberapa perubahan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Penjabat Bupati Jepara Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun kedua dari pelaksanaan RPD 2023-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2024 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,15
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,09
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,43
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	55,43
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	32,43
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6369
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,0 - 4,0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2 Wisnus:1,5
		Rasio wirausaha	4,25 - 4,75
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	3.075,00
		LPE Industri Pengolahan	5,0 - 5,5
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0 - 4,5
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,6
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	54,84
		Indeks SPBE	3,25
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,32
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,56
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,83
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,5725
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	60,82
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	83

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	BB
		SPIP Terintegrasi	3
		IPKD	B
		Indeks Merit Sistem	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,15	8,15
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79	12,79
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,09	76,21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,43	58,78
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	55,43	66,84
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	32,43	78,18
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6369	0,72
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,0 - 4,0	0,39

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2 Wisnus:1,5	Wisman: 2,1 Wisnus: 1,67
		Rasio wirausaha	4,25 - 4,75	3,19
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	3.075,00	
		LPE Industri Pengolahan	5,0 - 5,5	2,97
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0 - 4,5	3,63
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,6	3,34
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	54,84	40,32
		Indeks SPBE	3,25	3,63
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,32	63,16
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,56	0,55
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,83	91,03
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,5725	99,69
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana Sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	60,82	60,92
12.	Meningkatnya kualitas	Nilai Survey Kepuasan	83	85,14

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
	pelayanan publik	masyarakat		
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Tinggi (41,26)
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	BB	B
		SPIP Terintegrasi	3	3,192
		IPKD	B	Belum rilis
		Indeks Merit Sistem	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Tinggi

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,26	8,15
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,79
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,04	76,21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,44	58,78
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	60,32	66,84
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	120	78,18
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6976	0,3
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,39

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2,12 Wisnus: 1,71	Wisman: 2,1 Wisnus: 1,67
		Rasio wirausaha	15,57	3,19
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	8.928,97	8.273.369.474.586
		LPE Industri Pengolahan	4,57	2,97
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,62	3,63
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,35	3,34
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	22,58	40,32
		Indeks SPBE	3,63	3,63
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,22	63,16
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,50	0,55
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,89	91,03
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,67	99,69
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	63,28	60,92
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	85,11	85,14
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Tinggi (41,26)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	B	B
		SPIP Terintegrasi	3,261	3,192
		IPKD	B	Belum rilis
		Indeks Merit Sistem	Kurang	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Baik	Tinggi

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,15	98,45
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79	100,15
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,21	99,78
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	58,78	99,77
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial ≥ 0,8	66,84	99,10
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	78,18	354,5
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,72	108,94
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39	0,97
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Menginap	Wisman: 2,1 Wisnus: 1,67	Wisman: 110 Wisnus:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
				88
		Rasio wirausaha	3,19	346
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	8.273.369.474.586	65,1
		LPE Industri Pengolahan	2,97	87,88
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,63	110
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,34	92,53
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	40,32	27,45
		Indeks SPBE	3,63	95,52
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,16	101,76
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,55	83,3
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	91,03	99,52
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,69	100,09
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	60,92	100,97
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	85,14	100,12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi (41,26)	Sangat tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	87,14
		capaian Nilai SAKIP	B	82,11
		SPIP Terintegrasi	3,192	105,19
		IPKD	Belum rilis	96,45
		Indeks Merit Sistem	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi	Tinggi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari tiga belas sasaran, terdapat 12 (dua belas) sasaran strategis yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target karena ada 1 (satu) sasaran strategis yang indikator kinerjanya belum ada data capaian kinerja, dengan tingkat efisiensi yaitu :

1) Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, kinerja mencapai 100,72% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,1 %.
2) Meningkatnya modal sosial masyarakat, kinerja mencapai 120,58% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,3%.
3) Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat, kinerja mencapai 241,07% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,5%.
4) Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food*

estate, kinerja mencapai 63,02%.

5) Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, kinerja mencapai 97,12% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,78%.
6) Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, kinerja mencapai 131,18% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,65%
7) Meningkatnya pendapatan masyarakat, kinerja mencapai 107,78% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,06%
8) Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, kinerja mencapai 90,76% dengan efisiensi anggaran sebesar 8,37 %.
9) Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, kinerja mencapai 105,175% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,67%
10) Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, kinerja mencapai 100,305% dengan efisisensi anggaran sebesar 3,87%
11) Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU, kinerja mencapai 100,16% dengan efiseinsi anggaran sebesar 5,4%
12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja mencapai 102,6% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,8%
13) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kinerja mencapai 102,598% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,4%.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari : sisa lelang, perjalanan dinas dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan. Disamping hal-hal tersebut, efisiensi anggaran juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat** dengan 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,56 % dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Rata – Rata Lama Sekolah	8,03	8,26	102,86	8,15	8,27	101,47	98,56
2.	Harapan Lama Sekolah	12,78	12,85	100,54	12,79	12,86	100,54	100,23
3.	Umur Harapan Hidup (UHH)	76,03	76,04	100,01	76,09	76,21	100,15	100
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,32	91,53	100,23	91,43	91,53	100,1	99,86
	Rata-Rata Capaian			**100,89**			**100,56**	

Sumber : BPS Kabupaten Jepara 2024

1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 8,09 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2023 sudah mencapai 8,26 tahun. Capaian kinerja di tahun 2024 naik menjadi 8,27 Angka ini menunjukkan bahwa rata– rata penduduk Kabupaten Jepara sudah mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 2 SMP. Hal ini diperkuat dengan tingginya persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata- rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan semakin meningkatnya rata- rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Jepara juga mengalami perubahan pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 0,01 tahun sehingga mencapai 8,27 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Tengah hanya mencapai 8,02 tahun 2024 dan 8,01 tahun pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target kinerja di akhir periode RPD atau pada tahun 2026 yang sebesar 8,39, capaian kinerja pada tahun 2024 ini sudah mencapai 98,56%.

Konsistensi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara ini tidak lepas dari beberapa kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan mutu serta kualitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD/MI, danSMP/MTs;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas input, proses dan output pendidikan;
3. Meningkatkan kemasyarakatan dan prestasi kegiatan

pemuda, olahraga dan seni;

4. Meningkatkan kemandirian pengelolaan pendidikan non formal (PNF) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Namun demikian, jumlah sumber daya pendidik dari unsur PNS perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlahnya yang semakin tidak proporsional dangan jumlah siswa/ kelas yang ada saat ini. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jepara telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Jepara. Pada indikator ini terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara periode tahun 2023-2024 mengalami perubahan cukup baik yakni bertambah 0,01 tahun, sementara peningkatan rata-rata lama sekolah Jawa Tengah yang mencapai 0,01 tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan RLS Kabupaten Kudus, pada tahun 2024 Kabupaten Jepara lebih rendah 1,08 tahun. RLS Kabupaten Kudus menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 9,35 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang semakin meningkat.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pernjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 terealisasi 12,86 dari target sebesar 12,79 sehingga capaiannya adalah sebesar 100,55%. Realisasi kinerja ini naik jika dibandingkan tahun 2021, 2022 dan 2023 yang masing- masing sebesar 12,76, 12,77 dan 12,85. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara diharapkan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ini sudah mencapai 100,23 % bila dibandingkan dengan target di akhir periode RPD yang sebesar 12,83.

Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten di sekitar masih jauh. Untuk Kabupaten Kudus Harapan lama sekolahnya mencapai 13,28, Kabupaten Pati 12,98, dan Kabupaten Demak 13,36.

Pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan kualitas kegiatan diklat dan pelatihan mutu guru dan kepala sekolah;
2) Peningkatan mutu guru kelas akhir melalui kegiatan KKG SD dan MGMP SMP;
3) Pemberian tunjangan kesejahteraan GTT/PTT dan guru non sertifikasi;

4) Pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu baik pendidikan formal dan non formal; dan
5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

1.3 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup seseorang tergantung pada berbagai variable penting diantaranya gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan, dan status ekonomi. Namu, seseorang bisa saja bertahan hidup lebih lama atau lebih sebentar dari yang diharapkan karena angka tersebut hanya dihitung berdasarkan rata-rata standar harapan hidup di wilayah sendiri.

UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH merupakan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. Umur Harapan hidup (UHH) di Kabupaten Jepara secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terhitung sejak tahun 2021, angka harapan hidup di Kabupaten Jepara mencapai 75,91 kemudian naik menjadi 75,97 pada tahun 2022, tahun 2023 angkanya mencapai 76,04, dan tahun 2024 naik menjadi 76,21. Dan persentase capaian terhadap target akhir RPD sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Indonesia tahun 2024 yang mencapai angka 73,93 maka capaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Jepara lebih tinggi 2,28 tahun. Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Grafik
Umur Harapan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2024

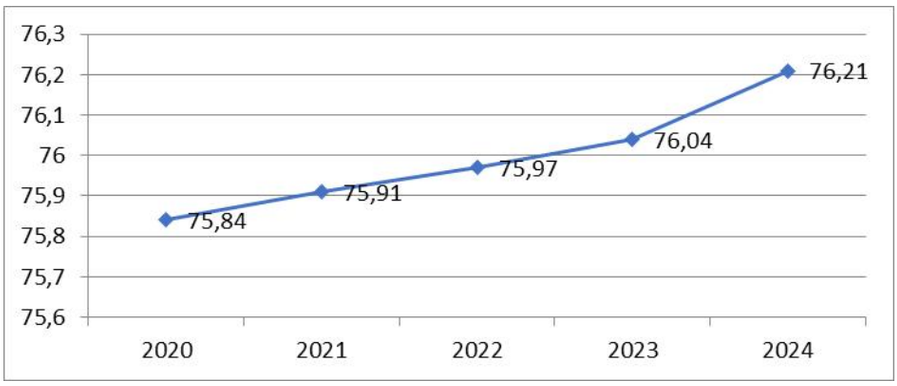

Sumber : Data BPS Kab. Jepara Tahun 2019-2024

Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Jepara pada 5 (lima) tahun terakhir antara lain dipengaruhi menurunnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi tinggi, umur harapan hidup akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/kongenital, penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal serta kesehatan ibu dan bayi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi usia produktif, ibu, bayi dan balita dengan memperhitungkan pemberian jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
- Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Implementasi PHBS dan GERMAS di semua sektor.
- Akselerasi pencapaian Kabupaten Sehat.

1.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, namun mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Semakin

mendekati 100 maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2022, IPG Kabupaten Jepara tercatat sebesar 91,44 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 91,28. Angka ini menunjukkan bahwa IPM perempuan 91,44 persen dari IPM laki-laki, yaitu 70,47 IPM perempuan disbanding dengan 77,07 IPM laki-laki. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi IPG Kabupaten Jepara tercatat diangka 91,53. Sedangkan untuk realisasi IPG tahun 2024 belum release dari BPS, jadi masih menggunakan realisasi tahun 2023.

Angka ini jika dibandingkan dengan IPG Jateng pada tahun 2023 yang mencapai 92,87, Kabupaten Jepara berada dibawahnya 1,44. Sedangkan angka IPG di Kabupaten Kudus 93,83, Kabupaten Demak 91,17.

2. Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **120,58%** dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial ≥0,8	52,72	60,32	114,42	55,43	66,84	120,58	109,8
	Rata-Rata Capaian			**114,42**			**120,58**	

Sumber : idm.kemendesa.go.id

2.1 Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial ≥0,8

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru dalam dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dengan angka realisasi kinerja di tahun 2023 sebesar 60,32%, ada penurunan realisasi dari tahun 2022 sebesar 1,09%.

Pengembangan kapasitas desa dalam satu dekade terakhir menjadi fokus utama pemerintah, dengan mencanangkan berbagai macam kebijakan, strategi, maupun program seperti contohnya adalah program-program yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa, program penguatan pemerintah desa, program tata kelola administrasi desa, kebijakan dan peraturan mengenai pembangunan desa, dan banyak lainnya. Semua memiliki satu muara yaitu untuk mewujudkan desa yang memiliki kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian yang maksimal. Berbagai program untuk memaksimalkan potensi dan kapasitas desa tersebut tidak bersifat permanen dan dapat dihentikan oleh pemerintah tergantung dari tingkat keberhasilan dari tujuan program itu sendiri.

Dalam melaksanakan program-program tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara yang memiliki 184 desa telah melaksanakan beberapa program yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, diantaranya adalah:

Mengaktifkan kegiatan gotong royong yang merupakan nilai luhur dan bekerja sama dengan TNI dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD);

Menggerakkan kader-kader PKK di tiap desa untuk dapat membantu pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat yang ada di desa;

Mendorong partisipasi maryarakat dalam setiap kegiatan pembangunan

3. Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran Strategis **Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **241,07%** dengan predikat **"Baik Sekali"**. Jika dilihat dari jumlah peningkatan partisipasi masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya tahun 2024 sudah mencapai target akhir renstra dengan capaian 230,96%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Reali sasi	Capaian (%)		
1.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	32,14	120	373,36	32,43	78,18	241,07	33,85	230,96
	Rata-Rata Capaian			333,35			241,07		

Sumber : Disparbud Kab.Jepara, 2024

3.1. Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pelestarian Seni Budaya

Target peningkatan jumlah partisipasi masyakarat pada tahun 2023 sebesar 32,14% sedangkan realisasi peningkatan jumlah partisipasi pada tahun 2023 sebesar 30 penghargaan dan realisasi jumlah partisipasi tahun 2022 sebesar 25 penghargaan sehingga jika dihitung realisasi persentase partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\%\ \text{Partisipasi masyarakat} = \frac{\text{Jumlah peningkatan partisipasi tahun selanjutnya x 100\%}}{\text{Jumlah total partisipasi tahun sebelumnya}}$$

Reali

sasi Persentase partisipasi masyarakat tahun 2023 sebesar 120% dan melebihi target. Target tahun 2024 sebesar 32,43% dengan jumlah

peningkatan partisipasi 12 penghargaan. Realisasi peningkatan partisipasi masyarakat tahun 2024 sebesar 43 penghargaan dan total partisipasi tahun 2023 adalah 55 penghargaan sehingga persentase partisipasi masyarakat tahun 2024 sebesar 78,18% dan melebihi target.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 peningkatan partisipasi masyarakat pada tahun 2024 lebih banyak dan dapat dikatakan setiap tahun jumlah partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang melestarikan dan mengembangkan seni budaya.
2. Berkembangnya kelompok seni/ pelaku seni yang menyelenggarakan pertunjukan untuk masyarakat.
3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap gelaran seni pada setiap perhelatan yang diadakan secara mandiri oleh Masyarakat.
4. Melakukan updating data pelaku seni sehingga memunculkan nama-nama pelaku seni yang layak mendapatkan penghargaan.

4. Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate*

Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate* sebesar 63,02% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja tahun 2023 yaitu 55,44. Jika dilihat dari rata – rata capaian kinerja tahun 2024 memang mengalami kenaikan namun pada realisasi indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan belum mencapai target yang diinginkan. Realisasi Indeks Ketahanan Ekonomi jika dibandingkan dengan target akhir RPD sudah mencapai target dengan capaian 112,44%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate* disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate*

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6348	0,6976	109,89	0,6369	0,72	113,04	0,6403	112,44
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,0-4,0	0,03	1	3,0-4,0	0,39	13	3,1-4,1	12,58
	Rata-Rata Capaian			**55,44**			**63,02**		

Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara Thun 2024

4.1. *Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)*

Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Ketahanan ekonomi juga mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu desa. IKE merupakan bagian dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang juga mencakup Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Komponen Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Keragaman produksi masyarakat desa, Ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Akses distribusi/logistik, Keterbukaan wilayah. Realisasi Indeks ketahanan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2023 mencapai 0,6976 dan melebihi target dengan capaian 109,89%. Realisasi indeks ketahanan ekomoni Kabupaten Jepara tahun 2024 sebesar 0,72 dan melebihi target dengan capaian 113,04%.

4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 0,03 dengan capaian kinerja 1%. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan angka realisasi

kinerja dengan target kinerja. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,98%, melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%. Sedangkan pertumbuhan dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,49%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jepara tahun 2023 mencapai 0,03. Data Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2024 sebesar 0,39 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023.

5. Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **97,12%** dengan predikat **"Baik"**. Capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,4% dikarenakan Indikator Rasio Wirausaha tidak mencapai target. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Rata-rata lama Menginap								
	Wisman	2	2,12	106	2	2,1	105	2	105
	Wisnus	1,5	1,71	114	1,5	1,67	111,33	1,5	111,33
2.	Rasio Wirausaha	4,25-4,75	3,34	78,58	4,25 - 4,75	3,19	75,05	4,5 - 5,0	70,88
	Rata-Rata Capaian			**99,52**			**97,12**		

Sumber : Disparbud Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara Tahun 2024

5.1 Rata-rata lama Menginap

Realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara baik tahun 2024 yaitu selama 1,67 hari melebihi target dengan capaian 111,33%. Realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2024 yaitu 2,1 hari melebihi target dengan capaian kinerja 105%. Walaupun pada pencapaian target tahun 2024 melebihi target namun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan baik dari realisasi rata-rata lama menginap wisatawan nusantara dan realisasi rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara.

Rata-rata lama menginap wisatan memang fluktuatif dalam kurun waktu 1 tahun, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain yaitu acara musiman atau tradisional, kondisi cuaca, dan aksesibilitas menuju daya tarik wisata. Misalnya, destinasi populer seperti Karimunjawa bisa mengalami penurunan kunjungan pada bulan-bulan dengan cuaca buruk. Beberapa upaya untuk meningkatkan rata-rata lama menginap wisatawan ditahun selanjutnya diantaranya meningkatkan kualitas akomodasi penginapan baik hotel bintang maupun hotel non-bintang, meningkatkan promosi wisata Kabupaten Jepara serta meningkatkan kualitas destinasi wisata.

5.2 Rasio Wirausaha

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan total angkatan kerja. Rasio kewirausahaan dapat menjadi indikator keberhasilan transformasi ekonomi. Realisasi rasio wirausaha tahun 2023 adalah 3,34 dan belum mencapai target tahun 2023. Pada tahun 2024 realiasi rasio wirausaha sebesar 3,19 belum mencapai target dan jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini akan menjadi fokus perhatian untuk dapat meningkatkan rasio wirausaha ditahun selanjutnya

6. Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing

Sasaran strategis **Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing** memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai Investasi Daerah, LPE Industri Pengolahan, dan LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata rata capaian kinerja mencapai 131,18%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 37% dikarenakan terdapat 2 indikator LPE

Industri Pengolahan dan LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tidak mencapai target serta realisasi tahun 2024 menurun daripada tahun 2023. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Nilai Investasi Daerah	3.000,00	8.928,97	297,63	3.075,00	8.273.369.474.586	269,05	3.230,67	258
2.	LPE Industri Pengolahan	5,0-5,5	4,57	91,40	5,0-5,5	2,97	59,4	5,25 - 5,75	56,5
3.	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0-4,5	4,62	115,50	4,0-4,5	3,63	84	4,25 - 4,75	79,05
	Rata-Rata Capaian			**168,18**			**131,18**		

Sumber : Bappeda Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara, 2024

6.1. Nilai Investasi Daerah

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan usaha yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok pembangunan daerah Kabupaten Jepara, baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Realisasi Nilai Investasi Daerah tahun 2023 sebesar 8.928.971.312.243 dan melebihi target dengan capaian 297,63% sedangkan tahun 2024 Realisasi

Nilai Investasi Daerah sebesar 8.273.369.474.586 melebihi target dengan capaian 269,05%. Walaupun realisasi nilai investasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 menurun sebesar 662.316.837.568 namun secara pencapaian target akhir RPD sudah mencapai target dengan capaian 258%.

Nilai investasi tahun 2024 dapat melebihi target didorong oleh pelaku usaha sudah sadar untuk menyampaikan LKPM sebagai dampak dari kegiatan pengawasan dan bimbingan teknis/ Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dimana DPMPTSP menginformasikan bahwa ada kewajiban yang dilaksanakan setelah pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, DPMPTSP juga aktif mengundang pelaku usaha untuk melaksanakan pendampingan penyampaian LKPM saat periode pelaporan. DPMPTSP juga memberikan bantuan pendampingan secara daring bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam penyampaian LKPM.
Adapun beberapa hal penyebab realisasi nilai investasi tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 diantaranya :

a. Semakin berkurangnya investor yang melakukan perluasan usahanya, baik PMA maupun PMDN (sudah mencapai puncak produksinya)

b. Semakin berkurangnya investor baru yang melakukan investasinya, dikarenakan terbatasnya lahan sawah yang dilindungi (LSD)

Rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kemajuan Penanaman Modalnya secara online (LKPM) per periode dikarenakan ada trouble di sistem sehingga laporan dari pelaku usaha belum semuanya terbaca dan status laporan LKPM dari pelaku usaha (Terkirim tapi belum terverifikasi) yang mengakibatkan tidak menambah jumlah capaian target realisasi investasi.

6.2 LPE Industri Pengolahan

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Industri pengolahan Kabupaten Jepara mencapai 5,17 dan menurun di tahun 2022 menjadi 3,75. Kemudian pada tahun 2023 naik lagi menjadi 4,57. Capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target hanya tercapai sebesar 91,40%. Realisasi LPE Industri Pengolahan tahun 2024 sebesar 2,97% menurun jika dibandingkan tahun 2023.

6.3 LPE Sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada tahun 2023 realisasi LPE Sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 115,50%. Realisasi LPE Sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 sebesar 3,63% menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

7. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 107,78 % dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	3,35	114,92	3,6	3,34	107,78	92,81
	Rata-Rata Capaian			**114,92**			**107,78**	

Kkabupaten Jepara, 2024

7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari

pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2014-2021 berfluktuatif dan terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Jepara sebesar 4,23% terus menurun menjadi 4,10% pada tahun 2022. Dalam tahun 2023 turun lagi menjadi 3,35% dan tahun 2024 menjadi 3,34%. Angka ini di bawah angka pengangguran nasional yang mencapai 4,91% dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,78%. Apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Kudus (3,19%), Kabupaten Pati (3,87%) dan Kabupaten Demak (4,75%).Angka ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebesar 3,6%.

Penurunan angkat TPT ini didukung dengan pelaksanaan beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara selama tahun anggaran 2024 yaitu:

1. Meningkatkan jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
2. Adanya aplikasi yokerjo.go.id lebih memudahkan bagi para pencari kerja untuk mengakses lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

8. Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 107,61% dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik	22,58	22,58	100	54,84	40,32	73,52	27,45
2.	Indeks SPBE	3,15	3,63	115,23	3,25	3,51	108	95,52
	Rata-Rata Capaian			**102,95**			**90,76**	

Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2024

8.1 Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Dalam menghadapi tantangan jaman yang serba digital saat ini, masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan penggunaan akses internet yang luar biasa. Akan tetapi ketersediaan akses internet ini belum merata di setiap daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 79,50% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas sudah pernah mengakses internet pada tahun 2024. Terjadi peningkatan 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sedangkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah penduduk Indonesia yang mengakses internet pada tahun 2024 tembus 221 juta jiwa. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terkoneksi internet tahun 2024 setara dengan 79,5%.

Dalam upaya meningkatkan dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk lebih mudah mengakses internet, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan peningkatan jumlah titik akses internet publik dari hanya 5 titik pada tahun 2022 menjadi 14 titik pada tahun 2023. Dan

meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 20 titik. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 38,70%.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Adanya dukungan kebijakan dan anggaran
2. Sudah terpasangnya jaringan *fiber optic* (FO) di seluruh OPD wilayah Kabupaten Jepara
3. Terpasangnya jaringan *fiber optic* (FO) memudahkan pemasangan free wifi sebagai sarana untuk akses internet publik
4. Koordinasi yang optimal antar OPD dalam proses mempercepat

Meskipun begitu masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Kurangnya kestabilan daya listrik di OPD-OPD mengakibatkan seringnya perangkat jaringan menjadi tidak berfungsi secara maksimal
2 Terjadinya putus jaringan FO diakibatkan karena tertarik oleh kendaraan dengan ketinggian yang melebihi standar serta terkena pohon yang roboh
3 Kurangnya SDM baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga mengakibatkan penanganan trobel jaringan yang agak terlambat

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar ada harmonisasi dan kolaborasi dalam percepatan pemasangan free wifi publik
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan untuk dilakukan solusi dan penanganan

8.2 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemrintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan angkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2022 telah dievaluasi oleh KemenPANRB dengan nilai 3,14 dan tahun 2023 naik menjadi 3,63. Pada tahun 2024 hasil evaluasi SPBE Kabupaten Jepara 3,51. Hasil ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 3,25. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Jepara. Jika dibandingkan dengan pencapaian Kabupaten Kudus 4,23, Kabupaten Pati 3,75, Kabupaten Demak 3,93, dan Provinsi Jawa Tengah 4,42, maka masih banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan implementasi SPBE di Kabupaten Jepara.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Indeks SPBE sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif baik secara haorisontal (Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SBPE) maupun koordinasi secara vertikal (tingkat provinsi maupun pusat)

2. Melaksanakan percepatan penerapan SPBE di sektor layanan administrasi pemerintahan dan sektor layanan publik

3. Perluasan digital melalui penambahan jaringan internet di pemerintahan dan aera publik untuk meningkatkan layanan

4. Optimalisasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti : pelatihan dan sosialisasi di lingkup pemerintahan dan masyarakat

5. Pemenuhan bukti dukung yang revelan pada indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian / evaluasi SPBE

Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Jepara antara lain:

1. Implementasi kebijakan SPBE yang belum optimal.
2. Pelaksanaan tata kelola SPBE yang belum optimal.
3. Masih ada bukti dukung yang belum relevan dengan tingkat kematangan pada indikator evaluasi SPBE.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah dalam mengatasi hambatan yang ada antara lain:

1. Perlunya meningkatkan intensitas koordinasi dari Tim Koordinasi SPBE.
2. Perlunya sosialisasi tentang kebijakan dan tata kelola SPBE.
3. Perlunya meningkatkan literasi digital terkait dengan manajemen SPBE.

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah sebesar Rp. 102.989.677,- atau sebesar 99,03 % dari total pagu sebesar Rp. 104.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,97 % dari pagu yang ditentukan.

9. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan

Capaian Sasaran strategis **Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan** mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 105,175% dengan predikat **"Baik Sekali"**. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dari 102,41% menjadi 105,175%. Namun walaupun secara rata – rata capaian kinerja mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 namun pada aspek pencapaian target tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana. Realisasi Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana tahun 2024 sebesar 0,55 sedangkan target tahun 2024 sebesar 0,56. Hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran strategis **Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,54	58,22	104,82	56,32	63,16	112,14	57,21	110,4
2.	Indeks kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,54	0,54	100	0,56	0.55	98,21	0,6	91,67
	Rata-Rata Capaian			**102,41**			**105,175**		

Sumber : DLH Kabupaten Jepara, 2024

9.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kategori tersebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tahun 2024 memiliki angka indeks 63,16 yang termasuk berada dalam kategori Sedang. Nilai IKLH tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan IKLH Tahun 2023 yaitu 56,27. Kenaikan nilai IKLH liniar dengan adanya kenaikan pada Nilai IKA (Indeks Kualitas Air) dan IKU (Indeks Kualitas Udara). Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Sumber air

Sumber air yang dipakai untuk pengujian kualitas air adalah Sungai Bakalan, Sungai Mayong, Sungai Gelis, Sungai Wiso, dan Sungai Klawing-Gintung. Keseluruhan sungai tersebut pada tahun 2024 mengandung sedikit sumber pencemaran baik dari industri, pertanian, maupun domestik.

b. Fluktuasi Debit

Debit tahun 2024 mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh iklim penghujan yang bergeser, sehingga air sungai sedikit banyak mengalami pengenceran beban pencemar.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Iklim dan arah angin

Iklim sangat mempengaruhi pembacaan larutan penjerap pada passive sampler. Pada musim penghujan, kandungan polutan pada udara ambien akan terjerap oleh air hujan, sehingga pembacaan kandungan polutan akan berkurang. Arah angin yang berhembus melewati passive sampler juga mempengaruhi keakuratan nilai SOx dan NOx.

b. Pencemaran alami dan antropogenik

Faktor lain penyebab nilai IKU mengalami kenaikan adalah minimnya pencemaran alami di sekitar lokasi passive sampler. Selain itu, pencemaran yang diisebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik) tampaknya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

9.2. Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Capaian Realisasi Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 namun pada aspek pencapaian target pada tahun 2024 belum dapat mencapai target. Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana tahun 2024 sebesar 0,55 dan belum mencapai target yakni 0,56. Hasil 0,55 ini masih nilai sementara yang dikeluarkan oleh BNPB dan masih menunggu nilai final. Usulan perhitungan nilai dari BPBD Kabupaten Jepara 0,58 dan setelah dilakukan proses validasi/verifikasi di BNPB nilai menurun menjadi 0,55. Hal ini mengakibatkan ketidaktercapaian target. Salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah di tahun selanjutnya yaitu melakukan persiapan yang lebih matang terutama pada persiapan dokumen data dukung.

10. Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan Tahun 2024** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah mencapai target dan mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,305% dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil

pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	90,33	90,84	100,56	90,58	91,03	100,49	91,32	99,68
2.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,5675	99,67	100,1	99,5725	99,6934	100,12	99,5825	100,11
	Rata-Rata Capaian			**100,33**			**100,305**		

Sumber : Disperkim Kab. Jepara,2024

10.1 Persentase Rumah Layak Huni

Realisasi kinerja Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebesar 91,03% dengan capaian 100,49%. Jika dibandingkan tahun 2023 realisasi Persentase Rumah Layak Huni (RLH) mengalami kenaikan 0,19 dari 90,84 menjadi 91,03. Persentase Rumah Layak Huni dapat meningkat diantaranya didukung dengan meningkatnya Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni setiap tahunnya. Realisasi penanganan RTLH di tahun 2024 sebanyak 1.821 unit dengan rincian :

a. RTLH yang tertangani oleh Disperkim sebanyak 147 unit

b. RTLH yang tertangani oleh Non APBD Murni sebanyak 762 unit

c. Rumah layak huni yang dibangun Pengembang sebanyak 912 unit

Faktor keberhasilan pada peningakatan Persentase Rumah Layak Huni diantaranya :

1. Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan *stackeholders*, baik vertikal maupun horisontal, melalui beberapa acara, seperti :

a. Koordinasi ke Diperakim Provinsi Jawa Tengah terkait :

- Bankeu untuk rehabilitasi RTLH yang dialokasikan untuk Kabupaten Jepara di tahun 2024 sebanyak 337 unit
- Bankeu untuk relokasi program normalisasi SWD 2 yang berlokasi di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung, dimana untuk tahun 2024 sebanyak 12 unit rumah yang terdampak

b. Konsutasi ke Kementerian PUPR maupun Kemensos terkait program kegiatan yang bisa dialokasikan di Kabupaten Jepara, dimana tahun 2024 sudah mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi RTLH dari Kemensos sebanyak 27 unit

c. Konsultasi ke Bupati dan Sekretaris Daerah terkait Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk korban bencana rumah roboh, dimana tahun 2024 sudah merealisasi 3 unit rumah korban bencana rumah roboh

d. Koordinasi dengan Petinggi dan Perangkat Desa serta sosialisasi terkait dengan Bansos RTLH yang akan diberikan kepada calon penerima Bansos di masing-masing desa serta pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk bantuan RTLH, dimana ditahun 2024 dana desa yang dialokasikan untuk bantuan RTLH terealisasi sebanyak 343 unit

e. Koordinasi dengan Bank Jateng terkait dana CSR yang dialokasikan untuk Bantuan Rehab RTLH, dimana tahun 2024 mendapat CSR untuk rehab RTLH sebanyak 10 unit

10.2 Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan pada tahun 2024 sebesar 99,6934 dengan capaian 100,12%. Jika dibandingkan tahun 2023 realisasi Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan mengalami kenaikan 0,0234 dari 99,67 menjadi 99,6934. Kenaikan Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni utamanya didukung dengan Persentase

Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh. Apabila kawasan permukiman kumuh menurun maka diharapkan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan meningkat.

Target penanganan kawasan kumuh ditahun 2024 seluas 1 Ha atau 0,4275% dan terrealisasi seluas 2,22 Ha atau 0,4146%, dengan rincian :

- Penanganan kawasan kumuh di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan seluas 1,49 Ha
- Penanganan kawasan kumuh di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri seluas 0,73 Ha

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan penataan permukiman kumuh berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan.
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh, serta pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh

11. Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang Pekerjaan Umum

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,16 % dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU** disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) Bidang PU dalam kondisi baik	59,89	63,28	105,66	60,82	60,92	100,16	97,2
	Rata-Rata Capaian			**105,66**			**100,16**	

Sumber : Sumber DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

11.1 Persentase Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU dalam Kondisi Baik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satu indikator keberhasilan adalah tersedianya prasarana sarana daerah dalam kondisi baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan optimal. Hal ini juga mendorong pertumbuhan sosial ekonomi suatu daerah. Prasarana sarana daerah di bidang Pekerjaan Umum (PU) yang dimaksud disini meliputi jalan kondisi mantap, bangunan gedung dalam kondisi baik, akses air minum layak, akses sanitasi layak, irigasi dalam kondisi baik, dan bendung dalam kondisi baik.

Realisasi kinerja persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik tahun 2024 sebesar 60,92%, hal ini berarti bahwa capaian kinerjanya sebesar 100,16% dari target sebesar 60,82%. Capaiannya ini didukung oleh:

1. Persentase jalan kondisi mantap sebesar 88,18%
2. Persentase Gedung dalam kondisi baik sebesar 42,75%
3. Persentase akses air minum layak sebesar 98,79%
4. Persentase akses sanitasi layak sebesar 74,30%
5. Persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 25,05%
6. Persentase bendung dalam kondisi baik sebesar 36,44%

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung setiap pencapaian indikator kinerja.
2. Komitmen dari pimpinan untuk menyediakan prasarana sarana daerah untuk mendukung kegiatan masyarakat agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Ditetapkannya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan prasarana sarana daerah.

Langkah-langkah Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya baik dana maupun SDM sehingga dapat meningkatkan lagi kinerja tahun yang akan dating.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berdasarkan berdasarkan skala prioritas dan berdampak luas terkait dengan keterbatasan anggaran infrastruktur.
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi kawasan permukiman.
5. Peningkatan kompetensi SDM pada masing-masing bidang

12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 102,6 % dengan predikat **"Baik Sekali".** Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disajikan dalam tabel sebagai berikut**:**

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	85,11	103,79	83	85,14	102,6	100,12
	Rata-Rata Capaian			**103,79**			**102,6**	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Jepara, 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 83,15, dan meningkat di tahun 2023 menjadi 85,11. Di tahun 2024 angka SKM menunjukkan peningkatan lagi menjadi 85,14, sehingga capaiannya sebesar 102,6 %. Pada Tahun 2024 Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah (42), 11 kelurahan dan 22 puskesmas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyusun nilai kepuasan masyarakat sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan khusus pada aspek kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal.
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 502/4 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Jepara.
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/92 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pegaduan Permasalahan Perijinan Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2015.
9. Mulai tahun 2012 telah diterapkan Sistem Standar Mutu ISO 9001: 2008 hingga akhir tahun 2015 di Jepara.
10. Penyelenggaraan lomba pelayanan publik yang dilaksanakan tiap tahun

13. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan** tahun 2024 dari total 7 Indikator kinerja, 6 indikator telah keluar hasilnya sedangkan 1 indikator kinerja belum keluar hasilnya yaitu Indeks IPKD. Terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Capaian Nilai SAKIP dikarenakan beberapa nilai komponen penilaian belum maksimal. Rata – rata capaian kinerja dari 6 indikator sebesar **102,598 %** dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir RPD	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)		
1.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Tinggi	100	Tinggi	Tinggi (realisasi 41,26)	100	Sangat tinggi (nilai minimal kategori sangat tinggi 46,1)	89,5
2.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Inovatif	Inovatif (50,40)	100	Sangat inovatif (minimal nilai pada kategori sangat inovatif 60,01)	83,98
3.	Capaian Nilai SAKIP	B	B	100	BB (nilai minimal kategori BB 70)	B (realisasi 66,03)	94,32	A (nilai minimal kategori A 80)	82,53
4.	SPIP Terintegrasi	2,8	3,261	116,46	3	3,192	106,4	3,1	106,4
5.	IPKD	B	B	100	B	Belum release	-	A	-

6.	Indeks merit Sistem	Kurang	Kurang	100	Baik	Baik	100	Baik	100
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang	100	Sedang (nilai minimal kategori sedang 71)	Tinggi (realisasi 81,56)	114,87	Tinggi	100
Rata-Rata Capaian				102,35					

Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara, 2024

13.1 Tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah menetapkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 untuk mengukur sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variabel tersebut sangat menentukan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah.

Capaian Nilai KOD Kabupaten Jepara Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
3	2021	37,4	Tinggi
4	2022	39,93	Tinggi
5	2023	40,17	Tinggi
6	2024	41,26	Tinggi

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Jepara 2024

Dilihat dari grafik diatas nilai KOD Kabupaten Jepara mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2024 kenaikan nilai hampir terjadi diseluruh 11 variabel

penilaian. Kenaikan nilai KOD Kabupaten Jepara dari tahun 2021 – 2024 tentu tidak terlepas dari komitmen dan upaya untuk meningkatkan Nilai Kematangan Organisasi Daerah antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam pemenuhan kecukupan dan kualitas data dukung.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan manajemen pemerintahan di semua perangkat daerah.
3. Nilai kematangan organisasi daerah dijadikan indikator dalam dokumen perencanaan sehingga meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan Nilai KOD.
4. Melakukan verifikasi dan validasi ke Verifikator Provinsi terkait Evaluasi KOD.

13.2 Indeks Inovasi Daerah

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengukuran ini dilakukan oleh Badan strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) kementerian Dalam Negeri.

Tabel Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara tahun 2021 - 2024.

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	46.52	Inovatif
2	2022	46.44	Inovatif
3	2023	44.88	Inovatif
4	2024	50.40	Inovatif

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Jepara 2024

Dilihat dari tabel diatas Indeks Inovasi Daerah terlihat pada tahun 2021 – 2023 kinerja mengalami tren penurunan walaupun secara pencapaian target tercapai yaitu kategori inovatif namun jika dilihat berdasarkan nilai tahun 2021 sampai tahun 2023 kinerja Kabupaten Jepara menurun. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan 5,52 poin.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara masih rendah. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus 58,14 sedangkan Kabupaten Demak 55,67. Hal ini akan menjadi motivasi untuk Kabupaten Jepara untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah pada tahun selanjutnya

13.3 Capaian Nilai SAKIP

Pelaksanaan evaluasi AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bertujuan untuk:

a. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
b. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat implementasi SAKIP
d. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
e. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
f. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Jepara Tahun 2021 – 2024 :

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	64,13	B
2	2022	64,53	B
3	2023	65,69	B
4	2024	66,03	B

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Jepara 2024

Dilihat dari tabel diatas, SAKIP Kabupaten Jepara mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 – 2024 namun kenaikan tiap tahun belum signifikan. Capaian SAKIP tahun 2024 melebihi capaian tahun 2023 yakni 66,03 namun belum mencapai target SAKIP tahun 2024 kategori BB atau minimal dengan nilai 70-80. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa komponen penilaian Evaluasi AKIP yang belum maksimal yakni komponen Perencanaan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Beberapa syarat pada Evaluasi SAKIP untuk kategori BB yaitu:

a. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja
b. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
c. Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi
d. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator

Dalam rangka perbaikan dan meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Jepara agar dapat mencapai target antara lain :

a. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan Indikator SMART
c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi/ aplikasi pada pengukuran kinerja
d. Meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja khususnya kedalaman Informasi pada Bab III Akuntabilitas Kinerja
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah khususnya pengampu komponen penilaian SAKIP yaitu Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan Diskominfo

13.4 SPIP Terintegrasi

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan Oleh BPKP dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tingkat Maturitas	Interval Skor
Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
Terkelola dan terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
Optimum	≥ 4,50

Capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jepara tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Nilai
1	2021	2,697
2	2022	3,214
3	2023	3,261
4	2024	3,192

Berdasarkan tabel diatas capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Maturitas SPIP Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dan mencapai target. Pada tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan nilai pada komponen IEPK sehingga capaian Maturitas SPIP pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 walaupun secara pencapaian target telah melebihi target yaitu 3.

13.5 IPKD

IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Jepara tahun 2021 – 2024.

No	Tahun	Nilai	Peringkat
1	2021	74,0002	B
2	2022	75,2284	B
3	2023	76,2284	B
4	2024	Proses penilaian	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Jepara mengalami tren kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya upaya perbaikan setiap dimensi penilaian. Target Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 adalah B namun Nilai IPKD tahun 2024 belum keluar dan masih menunggu penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

13.6 Indeks Merit Sistem

Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah

Nilai	Indeks	Sebutan
325 - 400	0.81 – 1	Sangat Baik
250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

Pada tahun 2023 Pemerintah kabupaten Jepara memperoleh nilai 179,5 dengan sebutan "Kurang". Realisasi tahun 2023 mencapai target yaitu Kurang namun secara kinerja masih sangat perlu ditingkatkan dan pada tahun 2024 target Indeks Sistem Merit Kabupaten Jepara meningkat menjadi Baik. Realisasi Capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan nilai 265,5 dengan sebutan Baik dan telah mencapai target. Pencapaian Indeks Sistem Merit dikarenakan fokus perbaikan dan pemenuhan setiap komponen penilaian sehingga didapat memperbaiki kekurangan pada tahun 2023.

13.7 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Tujuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat Indeks Profesionalitas ASN :

a. ***Pegawai*** Digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN

b. ***Instansi Pemerintah*** Digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional

c. ***Masyarakat Digunakan*** sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.

Kategori Tingkat IP ASN	
91-100	sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤60	Sangat rendah

Pada tahun 2022 Kabupaten Jepara dalam penilaian IP ASN memperoleh nilai kategori Sedang. Pada tahun 2023 hasil Indeks Profesionalitas ASN memperoleh nilai 76,26 dengan kategori sedang. Pada tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN memperoleh nilai 81,56 dengan kategori Tinggi. Jika dilihat dari tahun 2022, 2023 dan 2024 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Jepara mengalami peningkatan salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas yaitu dengan mengikuti, menyelenggarakan Diklat/Workshop dan Seminar.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.I Pada Tahun 2024 Kabupaten Jepara tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jepara mendapatkan tugas Penerima manfaat dari Pemerintah Provisi Jawa Tengah.

3.2 TUGAS PENERIMA MANFAAT YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

A. Urusan Pertanian dan Urusan Pangan (DKPP Kabupaten Jepara)

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

  1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- **Dasar pelaksanaan Tugas**

  1. SP DIPA- 018.08.4.039158/2023 tanggal 24 November 2023
  2. SP DIPA- 018.08.4.039158/2023 tanggal 24 November 2023
  3. SP DIPA- 018.08.4.039158/2023 tanggal 24 November 2023
  4. SP DIPA- 018.08.4.039158/2023 tanggal 24 November 2023

  Program dan Kegiatan

  Pengembangan Tanaman Kelapa Genjah Khusus.

  Rincian Kegiatan :

  1. Poktan Danyangan, Desa Bategede, Kec. Nalumsari
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 H
  2. Gpoktan Mitra Tani, Ds. Bulungan Kec. Pakisaji.
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5
  3. Poktan Guyub Rukun Desa Somosari Kec. Batealit
     Realisasi : HaBantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
  4. Poktan Tani Bakti Desa Bondo Kec. Bangsri
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha
  5. Poktan Sari Tani I Desa Srikandang Kec. Bangsri.
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 3 Ha
  6. Poktan Sido Dadi I Desa Keling Kec. Keling.
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
  7. Poktan Sumber Rejeki III Desa Cepogo Kec. Kembang.
     Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
  8. Poktan Tani Bakti Desa Pancur Kec. Mayong.

Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2.5 Ha

9. Gapoktan Tani Mulyo Desa Buaran Kec. Mayong.
   Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2.5 Ha
10. Poktan Ayo Maju Serempak I Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
11. Poktan Tani Maju IX Desa Sekuro Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
12. Poktan Ayo Maju Desa Suwawal Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
13. Poktan Sido Makmur Desa Sinanggul Kec. Mlonggo
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
14. Gapoktan Sido Mulyo Desa Karanggondang Kec. Mlonggo.
    Realisasi :Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
15. Poktan Margo Mulyo Desa Banyumanis Kec. Donoroji.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha
16. Poktan Karya Tunggal Desa Banyumanis Kec. Donorojo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha
17. Poktan Makmur Jaya Desa Muryolobo Kec. Nalumsari.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
18. Poktan Sido Mulyo IV Desa Ngetuk Kec. Nalumsari.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
19. Gapoktan Sumber Makmur Desa Rajekwesi Kec. Mayong.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha
20. Gapoktan Pilih Tani Desa Batealit Kec. Batealit.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha
21. Gapoktan Langgeng Bhakti Desa Bringin Kec. Batealit.
    Realisasi :Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 3 Ha
22. Gapoktan Ngudi Hasil Desa Mindahan Kidul Kec. Batealit.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 3 Ha
23. Gapoktan Tani Sejahtera Desa Platar Kec. Tahunan.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha
24. Gapoktan Margo Rahayu Desa Tegalsambi Kec. Tahunan.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha
25. Gapoktan Ngudi Rahayu Desa Krapyak Kec. Tahunan.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha
26. Poktan Tani Sejati Desa Bugel Kec. Kedung.

Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha

27. Gapoktan Tani Sentosa Desa Dongos Kec. Kedung.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha
28. Poktan Sari Mulyo Desa Suwawal Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha
29. Poktan Tani Mulyo III Desa Karanggondang Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
30. Poktan Tani Mulyo Dua Desa Karanggondang Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
31. Poktan Karya Bhakti Desa Karanggondang Kec. Mlonggo.
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha
32. Poktan Sido Makmur II Desa Tengguli Kec. Bangsri
    Realisasi : Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 8 Ha

Program dan Kegiatan

Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Robusta

Rincian Kegiatan :

1. Poktan Godang Tani Desa Bategede Kec. Nalumsari.
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
2. Poktan Drakah Desa Pule Kec. Mayong
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
3. Poktan Subur Makmur I Desa Bungu Kec. Mayong
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
4. Poktan Rukun Santoso 3 Desa Somosari Kec. Batealit
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
5. Poktan Sopo Nyono Desa Plajan Kec. Pakisaji
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
6. Poktan Sido Mulyo VI Desa Tanjung Kec. Pakisaji
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
7. Poktan Margo Tani III Desa Papasan Kec. Bangsri
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
8. Poktan Tani Makmur II Desa Bucu Kec. Kembang
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
9. Poktan Langgeng Makmur V Desa Damarwulan Kec. Keling
   Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
10. Poktan Sido Makmur VII Desa Tempur Kec. Keling
    Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta

11. Poktan Sido Makmur VIII Desa Tempur Kec. Keling
    Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta
12. Poktan Sido Makmur IX Desa Tempur Kec. Keling
    Realisasi : Bantuan Bibit kopi robusta

Program dan Kegiatan

Persiapan irigasi perpipaan konsultan perencanaan dan pejabat pengadaan

1. Lokasi : -
   Anggaran : Rp 15.000.000
   Realisasi : Rp 14.901.000
   Capaian Kegiatan : 99,3%
   Capaian telah mencapai 99,3% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kontruksi irigasi perpipaan,

1. Lokasi : KT. Sido Makmur XIII Tempur Keling
   Anggaran : Rp.94.000.000
   Realisasi : Rp. 94.000.000
   Capaian Kegiatan : 100% , bangunan jaringan irigasi perpipaan 1 paket
   Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena sudah terlaksana sesuai target dengan capaian 100%
2. Lokasi : KT. Margo Tani III Papasan Bangsri
   Anggaran : Rp 94.000.000
   Realisasi : Rp 94.000.000
   Capaian Kegiatan : 100% Bangunan Jaringan irigasi 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
3. Lokasi : KT. Suko Harjo, Pringtulis Nalumsari
   Anggaran : Rp 94.000.000
   Realisasi : Rp 94.000.000
   Capaian Kegiatan : 100% Bangunan jaringan irigasi perpipaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Monitoring dan pelaporan

Lokasi : DKPP Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 3.000.000

Realisasi : Rp 3.000.000

Capaian Kegiatan : 100%, melakukan monitoring dan evaluasi irigasi perpipaan

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat

Persiapan

Rincian Kegiatan :

1. Lokasi : -

   Anggaran : Rp 60.000.000

   Realisasi : Rp 59.506.000

   Capaian Kegiatan : 99,18% Pejabat pengadaan dan tim teknis pengadaan

   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kontruksi irigasi perpompaan

Rincian Kegiatan :

1. Lokasi : KT. Tani Rahayu, Desa Tulakan Kecamatan Donorojo

   Anggaran : Rp112.800.000

   Realisasi : Rp112.800.000

   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

2. Lokasi : KT. Margo Tani, Desa Menganti Kecamatan Kedung

   Anggaran : Rp112.800.000

   Realisasi : Rp112.800.000

   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

3. Lokasi : KT. Murih Makmur I, Desa Tedunan Kecamatan Kedung

   Anggaran : Rp112.800.000

   Realisasi : Rp112.800.000

   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

4. Lokasi : KT. Dadi Makmur I, Desa Tedunan Kecamatan Kedung
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
5. Lokasi : KT. Ngudi Rejeki I, Desa Sowan Lor Kecamatan Kedung
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
6. Lokasi : KT. Dharma Tani, Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
7. Lokasi : KT. Mekar Sari II, Desa Bulungan Kecamatan Pakis
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
8. Lokasi : KT. Sido Sari I, Desa Bulungan Kecamatan Pakis
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
9. Lokasi : KT. Ngudi Rahayu II, Desa Slagi Kecamatan Pakis
   Anggaran : Rp112.800.000
   Realisasi : Rp112.800.000
   Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

10. Lokasi : KT. Tani Bhakti II, Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
11. Lokasi : KT. Srimulyo Utomo, Desa Troso Kecamatan Pecangaan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
12. Lokasi : KT. Jali Rejo, Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
13. Lokasi : KT. Ngudi Karyo II, Desa Rengging Kecamatan Pecangaan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
14. Lokasi : KT. Ngopeni II, Desa Ujunpandan Kecamatan Welahan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
15. Lokasi : KT. Margo Tentrem II, Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

16. Lokasi : KT. Tani Rejo III, Desa Batukali Kecamatan Kalinyamatan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
17. Lokasi : KT. Margo Rahayu III, Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
18. Lokasi : KT. Marem Tani II, Desa Kecapi Kecamatan Tahunan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
19. Lokasi : KT. Sumber Hasil, Desa Bantrung Kecamatan Batealit
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
20. Lokasi : KT. Tani Lestari II, Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
21. Lokasi : KT. Margo Mulyo II, Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

22. Lokasi : KT. Margo Mulyo IV, Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
23. Lokasi : KT. Manunggal Tani II, Desa Tulakan Kecamatan Donorojo
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
24. Lokasi : KT. Margo Utomo I, Desa Tulakan Kecamatan Donorojo
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
25. Lokasi : KT. Margo Mulyo 1, Desa Guyangan Mulyo Kecamatan Bangsri
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
26. Lokasi : KT. Tani Bakti, Desa Bondo Kecamatan Bangsri
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
27. Lokasi : KT. Sido Makmur II, Desa Wanusobo Kecamatan Kedung
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

28. Lokasi : KT. Rejo Mulyo II, Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
29. Lokasi : KT. Tani Mulyo III, Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
30. Lokasi : KT. Puji Lestari 1, Desa Welahan Lestari Kecamatan Welahan
    Anggaran : Rp112.800.000
    Realisasi : Rp112.800.000
    Capaian Kegiatan : 100%, bangunan irigasi perpompaan 1 paket
    Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan

Rincian Kegiatan :

1. Lokasi : DKPP Jepara
   Anggaran : Rp 45.000.000
   Realisasi : Rp 45.000.000
   Capaian Kegiatan : 100% Monev irigasi perpompaan
   Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

Rincian Kegiatan :

1. Lokasi : DKPP Jepara
   Anggaran : Rp 10.000.000
   Realisasi : Rp 9.704.000

Capaian Kegiatan : 97.04% Monev Bantuan Alsintan APBN, Pembuatan Laporan BAST Online

Capaian telah mencapai 97% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Layanan Manajemen Keuangan

Rincian Kegiatan :

1. Lokasi : DKPP Jepara

   Anggaran : Rp 47.280.000

   Realisasi : Rp 30.892.000

   Capaian Kegiatan : 65,34% Pendampingan kegiatan APBN di Kabupaten Jepara

   Capaian telah mencapai 65,3% sehingga realisasi anggaran disesuaikan dengan SBM. Sehingga realisasi anggaran rendah

Program dan Kegiatan

Kegiatan bantuan alat dan mesin pertanaian pra panen

1. Lokasi : Poktan / Gapoktan/UPJA Kabupaten Jepara

   Realisasi : Bantuan Alat Mesin Pertanian Pra Panen : Traktor Roda 4 : 4 Unit; Pompa Air : 109 Unit; Hand Sprayer : 30 Unit; Traktor Roda 2 : 29 Unit

Program dan Kegiatan

Kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian pasca panen

1. Lokasi : Poktan / Gapoktan/UPJA Kabupaten Jepara

   Realisasi : Bantuan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen : Combine Harvester : 5 Unit

Program dan Kegiatan

Kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian sumber dana DBHCH

1. Lokasi : Poktan / Gapoktan/UPJA Kabupaten Jepara

   Realisasi : Bantuan Alat Mesin Pertanian : Cultivator : 2 Unit; Traktor Roda 2 : 2 Unit; Mesin Pemotong Rumput : 3 Unit; Hand Sprayer : 5 Unit

I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasades Kabupaten Jepara)

- Bantuan Keuangan Khusus Desa
  - Dasar Pelaksanaan Tugas.

    Perbup Nomor 61 Tahun 2018

- Program : Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- Sumber Dana : APBD Kabupaten
- Jumlah Anggaran : Rp. 355.106.722.000
- Realisasi : Rp. 355.094.122.000
- Permasalahan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tidak terserap 100% di karenakan:

Bantuan Keuangan Khusus Desa (RT/RW) sebesar Rp. 12.600.000,- tidak mengajukan pencairan.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Jepara tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jepara mendapatkan tugas Penerima manfaat dari Pemerintah Provisi Jawa Tengah Matriks sebagai berikut:

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PENERIMA MANFAAT PUSAT / PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

(DKPP Kabupaten Jepara)

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	**(DKPP)**		Pengembangan	1. Poktan Danyangan,			100%	Bantuan Bibit Kelapa	100%	Tidak Ada
1.	Dinas		Tanaman Kelapa	Desa Bategede, Kec.				Genjah Khusus seluas 5 Ha		
	Pertanian dan		Genjah Khusus	Nalumsari						
	Perkebunan			2. Gpoktan Mitra Tani, Ds.			100%	Bantuan Bibit Kelapa	100%	Tidak Ada
	Provinsi Jawa			Bulungan Kec. Pakisaji.				Genjah Khusus seluas 5		
	Tengah.			3. Poktan Guyub Rukun			100%	HaBantuan Bibit Kelapa	100%	Tidak Ada
				Desa Somosari Kec.				Genjah Khusus seluas 5 Ha		
				Batealit						
				4. Poktan Tani Bakti Desa			100%	Bantuan Bibit Kelapa	100%	Tidak Ada
				Bondo Kec. Bangsri				Genjah Khusus seluas 4 Ha		
				5. Poktan Sari Tani I Desa			100%	Bantuan Bibit Kelapa		
				Srikandang Kec.				Genjah Khusus seluas 3 Ha	100%	Tidak Ada
				Bangsri.						

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				6. Poktan Sido Dadi I Desa Keling Kec. Keling.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5	100%	Tidak Ada
				7. Poktan Sumber Rejeki III Desa Cepogo Kec. Kembang.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha	100%	Tidak Ada
				8. Poktan Tani Bakti Desa Pancur Kec. Mayong.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2.5 Ha	100%	Tidak Ada
				9. Gapoktan Tani Mulyo Desa Buaran Kec. Mayong.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2.5 Ha	100%	Tidak Ada
				10. Poktan Ayo Maju Serempak I Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha	100%	Tidak Ada
				11. Poktan Tani Maju IX Desa Sekuro Kec. Mlonggo.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha	100%	Tidak Ada
				12. Poktan Ayo Maju Desa Suwawal Kec. Mlonggo.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha	100%	Tidak Ada
				13. Poktan Sido Makmur			100%	Bantuan Bibit Kelapa	100%	Tidak Ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Desa Sinanggul Kec. Mlonggo				Genjah Khusus seluas 1 Ha		
				14. Gapoktan Sido Mulyo Desa Karanggondang Kec. Mlonggo.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha	100%	Tidak Ada
				15. Poktan Margo Mulyo Desa Banyumanis Kec. Donoroji.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha	100%	Tidak Ada
				16. Poktan Karya Tunggal Desa Banyumanis Kec. Donorojo.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha	100%	Tidak Ada
				17. Poktan Makmur Jaya Desa Muryolobo Kec. Nalumsari.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha	100%	Tidak Ada
				18. Poktan Sido Mulyo IV Desa Ngetuk Kec. Nalumsari.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha	100%	Tidak Ada
				19. Gapoktan Sumber Makmur Desa Rajekwesi Kec. Mayong.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 5 Ha	100%	Tidak Ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				20. Gapoktan Pilih Tani Desa Batealit Kec. Batealit.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha	100%	Tidak Ada
				21. Gapoktan Langgeng Bhakti Desa Bringin Kec. Batealit.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 3 Ha	100%	Tidak Ada
				22. Gapoktan Ngudi Hasil Desa Mindahan Kidul Kec. Batealit.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 3 Ha	100%	Tidak Ada
				23. Gapoktan Tani Sejahtera Desa Platar Kec. Tahunan.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha	100%	Tidak Ada
				24. Gapoktan Margo Rahayu Desa Tegalsambi Kec. Tahunan.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha	100%	Tidak Ada
				25. Gapoktan Ngudi Rahayu Desa Krapyak Kec. Tahunan.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha	100%	Tidak Ada
				26. Poktan Tani Sejati Desa Bugel Kec.			100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha	100%	Tidak Ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Kedung. 27. Gapoktan Tani Sentosa Desa Dongos Kec. Kedung. 28. Poktan Sari Mulyo Desa Suwawal Kec. Mlonggo. 29. Poktan Tani Mulyo III Desa Karanggondang Kec. Mlonggo. 30. Poktan Tani Mulyo Dua Desa Karanggondang Kec. Mlonggo. 31. Poktan Karya Bhakti Desa Karanggondang Kec. Mlonggo. 32. Poktan Sido Makmur II Desa Tengguli Kec. Bangsri.			100% 100% 100% 100% 100% 100%	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 4 Ha Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 2 Ha Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 1 Ha Bantuan Bibit Kelapa Genjah Khusus seluas 8 Ha	100% 100% 100% 100% 100% 100%	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2.	**Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.**		Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Robusta	1. Poktan Godang Tani Desa Bategede Kec. Nalumsari. 2. Poktan Drakah Desa Pule Kec. Mayong 3. Poktan Subur Makmur I Desa Bungu Kec. Mayong 4. Poktan Rukun Santoso 3 Desa Somosari Kec. Batealit 5. Poktan Sopo Nyono Desa Plajan Kec. Pakisaji 6. Poktan Sido Mulyo VI Desa Tanjung Kec. Pakisaji			100% 100% 100% 100% 100% 100%	Bantuan Bibit kopi robusta Bantuan Bibit kopi robusta Bantuan Bibit kopi robusta Bantuan Bibit kopi robusta Bantuan Bibit kopi robusta Bantuan Bibit kopi robusta	100% 100% 100% 100% 100% 100%	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				7. Poktan Margo Tani III Desa Papasan Kec. Bangsri			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada
				8. Poktan Tani Makmur II Desa Bucu Kec. Kembang			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada
				9. Poktan Langgeng Makmur V Desa Damarwulan Kec. Keling			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada
				10. Poktan Sido Makmur VII Desa Tempur Kec. Keling			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada
				11. Poktan Sido Makmur VIII Desa Tempur Kec. Keling			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada
				12. Poktan Sido Makmur IX Desa Tempur Kec. Keling.			100%	Bantuan Bibit kopi robusta	100%	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3.	**Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah**	SP DIPA-018.08.4.039158/2023 tanggal 24 November 2023	1794. RBK. 001. Irigasi Perpipaan				100%			
			051. Persiapan		15.000.000	14.901.000	99.34%	CPCL Irigasi Perpipaan, Konsultan Perencana dan Pejabat Pengadaan	100%	Tidak ada
			052. Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	1. KT. Sido Makmur XIII, Tempur Keling	94.000.000	94.000.000	100%	Bangunan Jaringan Irigasi Perpipaan 1Paket		
				2. KT. Margo Tani III, Papasan Bangsri	94.000.000	94.000.000	100%	Bangunan Jaringan Irigasi Perpipaan 1Paket		
				3. KT. Suko Harjo, Pringtulis Nalumsari	94.000.000	94.000.000	100%	Bangunan Jaringan Irigasi Perpipaan 1Paket		
			053. Monitoring	DKPP Jepara	3.000.000	3.000.000	100%	Monev Irigasi Perpipaan	100%	Tidak Ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
			dan Pelaporan							
		SP DIPA-018.08.4.039 158/2023 tanggal 24 November 2023	1795. RBK. 008. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat							
			051. Persiapan		60.000.000	59.506.000	99.18%	CPCL Irigasi Perpompaan, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Kegiatan	100%	Tidak Ada
			052. Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan	1. KT. Tani Rahayu, Tulakan Kec. Donorojo	112.800.000	112.800.000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				2. KT. Margo Tani, Menganti Kedung	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				3. KT. Murih Makmur I, Tedunan Kedung	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				4. KT. Dadi Makmur I,	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Tedunan Kedung				Perpompaan 1 Paket		
				5. KT. Ngudi Rejeki I, Sowan Lor, Kedung	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				6. KT. Dharma Tani, Mayong Lor, Mayong	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				7. KT. Mekar Sari II, Bulungan Pakis	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				8. KT. Sido Sari I, Bulungan Pakis	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				9. KT. Ngudi Rahayu II, Slagi Pakis	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				10. KT. Tani Bhakti II, Ngeling Pecangaan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				11. KT. Sri Mulyo Utomo, Troso Pecangaan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				12. KT. Jali Rejo, Karangrandu Pecangaan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				13. KT. Ngudi Karyo II, Rengging Pecangaan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				14. KT. Ngopeni II,	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Ujunpandan welahan				Perpompaan 1 Paket		
				15. KT. Margo Tentrem II, Sendang Kalinyamatan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				16. KT. Tani Rejo III, Batukali Kalinyamatan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				17. KT. Margo Rahayu III, Tegalsambi Tahunan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				18. KT. Marem Tani II, Kecapi Tahunan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				19. KT. Sumber Hasil, Bantrung Batealit	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				20. KT. Tani Lestari II, Jatisari Nalumsari	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				21. KT. Margo Mulyo II, Jerukwangi Bangsri	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				22. KT. Margo Mulyo IV, Jerukwangi Bangsri	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				23. KT. Manunggal Tani II, Tulakan Donorojo	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				24. KT. Margo Utomo I, Tulakan Donorojo	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				25. KT. Margo Mulyo 1, Guyangan Mulyo Bangsri	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				26. KT. Tani Bakti,Bondo Bangsri	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				27. KT. Sido makmur II, Wanusobo Kedung	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				28. KT. Rejo Mulyo II, Ngeling Pecangaan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				29. KT. Tani Mulyo III, Bandungrejo Kalinyamatan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
				30. KT. Puji Lestari 1, Welahan Lestari Welahan	112800000	112800000	100%	Bangunan Irigasi Perpompaan 1 Paket		
			053. Monitoring dan Pelaporan	DKPP Jepara	45.000.000	45.000.000	100%	Monev Irigasi Perpompaan	100%	Tidak ada
		SP DIPA-018.08.4.039	1796.AEA.001.053. Monitoring dan	DKPP Jepara	10.000.000	9.704.000	97.04%	Monev Bantuan Alsintan APBN, Pembuatan laporan	100%	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		158/2023 tanggal 24 November 2023	Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian					BAST Online		
		SP DIPA-018.08.4.039 158/2023 tanggal 24 November 2023	1796. EBD.955.051. Layanan Manajemen Keuangan	DKPP Jepara	47.280.000	30.892.000	65,34 %	Pendampingan kegiatan APBN di Kabupaten Jepara	100%	Realisasi anggaran disesuaikan dengan SBM, sehingga realisasi anggaran rendah
			Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Poktan / Gapoktan / UPJA Kabupaten Jepara			100%	Bantuan Alat Mesin Pertanian Pra Panen : Traktor Roda 4 : 4 Unit; Pompa Air : 109 Unit; Hand Sprayer : 30 Unit;	100%	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
								Traktor Roda 2 : 29 Unit		
			Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen	Poktan / Gapoktan / UPJA Kabupaten Jepara			100%	Bantuan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen : Combine Harvester : 5 Unit	100%	Tidak ada
			Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Sumber Dana DBHCH	Poktan / Gapoktan / UPJA Kabupaten Jepara			100%	Bantuan Alat Mesin Pertanian : Cultivator : 2 Unit; Traktor Roda 2 : 2 Unit; Mesin Pemotong Rumput : 3 Unit; Hand Sprayer : 5 Unit	100%	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (PENUGASAN)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes Kabupaten Jepara)

No	URUSAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian kegiatan	lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan & solusi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**DINSOSPERMADES (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)** Kabupaten Jepara.	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 **DPA PENETAPAN TAHUN 2024** Nomor: DPPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024	- Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Lokasi : Kabupaten Jepara	378.196.030.000 378.196.030.000 355.106.722.000 355.106.722.000	166.396.521.800 355.094.122.000	44% 99.99 %			Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tidak terserap 100% di karenakan Bantuan keuangan khusus desa(RT/RW) sebesar Rp 12.600.000,- tidak mengajukan pencairan

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%. Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

1. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
2. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP

Keterangan:

IP SPM	=	Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase mutu Minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

NO.	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan tahun 2024. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya.

Tabel 4.1.2
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	37.666	Desember 2024	Angka partisipasi sekolah	37.666	Desember 2024	8.284.264.000
					Angka partisipasi murni	37.667	Desember 2024	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	608	Desember 2024	
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	3.421	Desember 2024	
					Rasio pengawas	17	Desember 2024	

					sekolah untuk PAUD			
					Kecukupan formasi guru ASN	71	Desember 2024	
					Indeks distribusi guru	4.110	Desember 2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	737	Desember 2024	
					Proporsi PTK penggerak	38	Desember 2024	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	181.369	Desember 2024	SD			20.808.639.000
					Angka partisipasi kasar	122.792	Desember 2024	
					Angka partisipasi sekolah	122.792	Desember 2024	
					Kemampuan literasi	82,93	Desember 2024	
					Kemampuan numerasi	74,48	Desember 2024	
					Perbedaan Skor Literasi	9,42	Desember 2024	
					Perbedaan Skor numerasi	15,92	Desember 2024	
					Indeks iklim keamanan	73,45	Desember 2024	
					Indeks iklim kebinekaan	74,28	Desember 2024	
					Indeks iklim inklusivitas	56,77	Desember 2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	4.328	Desember 2024	
					Indeks distribusi guru	7.285	Desember 2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	3.237	Desember 2024	
					Proporsi PTK penggerak	172	Desember 2024	
					SMP			
					Angka partisipasi kasar	58.577	Desember 2024	
					Angka partisipasi sekolah	58.577	Desember 2024	
					Kemampuan literasi	73,35	Desember 2024	
					Kemampuan numerasi	72,18	Desember 2024	
					Perbedaan skor literasi	2,78	Desember 2024	

					Perbedaan skor numerasi	19,8	Desember 2024	
					Indeks iklim keamanan	72,01	Desember 2024	
					Indeks iklim kebinekaan	72,98	Desember 2024	
					Indeks iklim inkusivitas	56,67	Desember 2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	1.342	Desember 2024	
					Indeks distribusi guru	4.066	Desember 2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	1.571	Desember 2024	
					Proporsi PTK penggerak	67	Desember 2024	
3 .	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.369	Desember 2024	Angka partisipasi kasar	2.369	Desember 2024	1.185.500.000
					Angka partisipasi sekolah	2.369	Desember 2024	
					Kemampuan literasi	58,79	Desember 2024	
					Kemampuan numerasi	56,17	Desember 2024	
					Indeks iklim keamanan	64,81	Desember 2024	
					Indeks iklim kebinekaan	64,81	Desember 2024	
					Indeks iklim inklusivitas	63,43	Desember 2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	38	Desember 2024	
					Indeks distribusi guru	93	Desember 2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	45	Desember 2024	

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

4.1.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	37.666	37.666	100%	8.284.264.000	7.849.275.941	94,75%
2.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	181.369	181.369	100%	20.808.639.000	20.253.771.364	97,33%
3.	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.369	2.369	100%	1.185.500.000	879.895.000	74,22%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan IP SPM dan rekapitulasinya diuraikan pada Tabel 4.1.3.1 dan 4.1.3.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten
Jepara Tahun 2024

1. Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	37666	37666	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	37666	37666	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	37666	37666	0	100.00 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	608	608	0	100.00 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	3421	3421	0	100.00 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	17	17	0	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	71	71	0	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	4110	4110	0	100.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	737	737	0	100.00 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	38	38	0	100.00 %

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

2. Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	173059	173059	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	SD					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	122792	122792	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	122792	122792	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	82.93	82.93	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	74.48	74.48	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	9.42	9.42	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	15.92	15.92	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.45	73.45	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.28	74.28	0	100.00 %

	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.77	56.77	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	4328	4328	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	7285	7285	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	3237	3237	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	172	172	0	100.00 %
	SMP					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	58577	58577	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	58577	58577	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	77.76	77.76	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	72.18	72.18	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.78	2.78	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	19.8	19.8	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.01	72.01	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.98	72.98	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.67	56.67	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	1342	1342	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	4066	4066	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1571	1571	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	67	67	0	100.00 %

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

3. Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5545	5545	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	2369	2369	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	2369	2369	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	58.79	58.79	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.17	56.17	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64.81	64.81	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63.43	63.43	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.32	54.32	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru	%	38	38	0	100.00 %

	ASN					
	11 . Indeks distribusi guru	%	93	93	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	45	45	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	21	0	21	100.00 %

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

Tabel 4.1.3.2
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	80	20	100	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesetaraan	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Pendidikan				100%	Tuntas Paripurna

Sumber: *Disdikpora Kabupaten Jepara,2024*

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang pendidikan tahun 2024 rata-rata sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 3 (Tiga) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan semua telah mencapai target 100%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Anak Usia	Pembangunan Ruang Kelas Baru	235.214.000

	Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.362.050.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	87.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0
2	Pendidikan Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.228.888.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.566.500.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.757.480.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	429.100.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.062.684.000
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.100.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	820.372.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	327.700.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.678.870.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	692.000.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	145.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.710.945.000,00
3	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.185.500.000,00

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Guna tercapainya pelayanan Pendidkan dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM)

didukung oleh sumber daya Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	BIDANG	Jenis Kelamin		TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Sekretariat	9	7	16
2	PAUD dan PNF	4	2	6
3	SD	5	3	8
4	SMP	3	3	6
5	Pemuda dan Olahraga	8	-	8
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2	9
7	Satkordikcam	26	17	43
8	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)	5	4	9
9	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (satkor)	43	9	52
10	Tenaga Harian Lepas	28	16	44
JUMLAH		2.409	7.654	10.063

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL		
		1,. Akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. 2. Masih ada desa yang kurang proporsional dalam jumlah lembaga PAUD dibanding masyarkat yang dilayaninya.	1. Pembentukan Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), 2. penguatan kelembagaan penyelenggara PAUD. 3. peningkatan kualitas bahan pembelajaran bagi anak usia dini 4. peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk penyelenggaran PAUD.

		masih relatif rendahnya angka partisipasi murni SMP/MTs/KPB dan angka melanjutkan dari SD/MI/KPA ke SMP/MTs/KPB atau sederajat	Pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasi terintegrasi
		Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan, Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil.	Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM.
		Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.	Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi
		Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM dari anggaran APBD	
		Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.	Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.
II	EKSTERNAL		
		Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah.	peningkatan kualitas pendamping atau guru yang terlibat dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini
		belum maksimalnya capaian program wajib belajar sembilan tahun masih tinggi	Membuat Peraturan Bupati Jepara tentang Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12
		Naiknya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Disusun rencana aksi daerah, yang melibatkan OPD terkait, pemerintah desa, penyusunan peraturan bupati tentang wajib belajar dua belas tahun, dan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan yang diberi tugas dan kewenangan menangani ATS.

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara,2024

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis pelayanan dasar

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yangsudah memiliki Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan tahun 2024. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya.

Tabel 4.2.2
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	19.696	Desember 2024	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.970	Desember 2024	1.112.594.000
					2 . Tablet tambah darah	3.545.280		
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	19.696		
					4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	19.696		
					5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	19.696		
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	19.696		
					1.Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B, Sifilis, dan HIV	19.696		

					8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	19.696		
					9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	19.696		
					10. Media KIE	19.696		
					11 . Gel USG	1.313		
					12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	326		
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	1.492		
					14. Tenaga kesehatan : Bidan	763		
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	435		
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	76		
					17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	19.696		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu bersalin yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	17.021	Desember 2024	1. Formulir Partograf	17.021	Desember 2024	894.635.800
					2. Kartu ibu (rekam medis)	17.021		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.021		
					4. Media promosi KIE	17.021		
					5. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	326		
					5. Bidan	763		
					7. Perawat	1.492		
					8.Tenaga Kefarmasian	435		
					9.Tenaga Gizi	76		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	16.924	Desember 2024	1 . Vaksin Hepatitis B0	17.905	Desember 2024	136.391.200
					2 . Vitamin K1 injeksi	17.905		
					3 . Salep/tetes mata antibiotik	17.905		
					4 . Formulir bayi baru lahir	17.905		
					5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	17.905		
					6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.905		
					7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			

					8. Dokter/dokter spesialis Anak	311		
					9. Bidan	724		
					10. Perawat	1.485		
					11. Tenaga Kefarmasian	435		
					12.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	51		
					13.Tenaga Gizi	76		
					14. Kader Kesehatan	6443		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran balita yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	90.219	Desember 2024	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	90.219	Desember 2024	57.244.000
					2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	90.219		
					3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	90.219		
					4 . Vitamin A Biru	90.219		
					5 . Vitamin A Merah	90.219		
					6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	90.219		
					7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	21.441		
					8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	69.562		
					9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	22.555		
					10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	15.037		
					11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	22.555		
					12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	22.555		
					13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	11.277		
					14 . Peralatan Anafilaktik	22.555		
					15 . Formula Terapi Gizi Buruk	11.277		
					16. Dokter	317		
					17. Bidan	763		
					18. Perawat	1.492		
					19. Ahli Gizi	76		
					20. Guru PAUD	3.233		

					21. Kader Kesehatan	6.443		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	41.818	Desember 2024	1 . Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	41.818	Desember 2024	430.620.000
					2 . Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	41.818		
					3 . Kuesioner skrining kesehatan	41.818		
					4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	41.818		
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	41.818		
					6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	14.901		
					7 . Alat Pemeriksaan Hb	644		
					8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	14.901		
					9 . Media promosi kesehatan	41.818		
					10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	5.227		
					11. Dokter/Dokter gigi	317		
					12. Bidan	763		
					13. Perawat	1.492		
					14. Ahli Gizi	76		
					15. Tenaga Kefarmasian	3.233		
					16.Tenaga Kesehatan Masyarakat	6.443		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 15-	812.187	Desember 2024	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	812.187	Desember 2024	155.359.300
					2. Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	644		

		59 tahun yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			3 . Alat : Tensimeter	644		
					4 . Alat : Glukometer	32.488		
					5 . Alat : Alat ukur lingkar perut	644		
					6 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	812.187		
					7 . Kit Opthalmologi Komunitas	644		
					8 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	812.187		
					9 . Alat Pelayanan KB	32.362		
					a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	8.830		
					b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	22.985		
					c. Vasectomi Set	547		
					10 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	812.187		
					11. Vaksin Tetanus Difteri	81.219		
					12. Dokter	317		
					13. Bidan	763		
					14. Perawat	1.492		
					15. Ahli Gizi	76		
					16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	96		
					17.Kader Kesehatan Terlatih	915		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 60 tahun ke atas yang akan dilayani dalam	148.090	Desember 2024	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	644	Desember 2024	22.366.000
					2 . Glukometer (alat pemeriksaan gula	644		

		kurun waktu satu tahun			darah)			
					3 . Alat pemeriksaan kolesterol	644		
					4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	148.090		
					5 . Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	148.090		
					6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	148.090		
					7 . Media KIE	148.090		
					8. Dokter	317		
					9. Bidan	763		
					10. Perawat	1.492		
					11. Ahli Gizi	76		
					12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	96		
					13. Kader Kesehatan Terlatih	915		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita hipertensi yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	175.015	Desember 2024	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	175.015	Desember 2024	15.750.000
					2 . Obat Hipertensi	175.015		
					3 . Tensimeter	644		
					4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	175.015		
					5 . Media promosi KIE	175.015		
					6. Dokter	317		
					7. Bidan	763		
					8. Perawat	1.492		
					9. Tenaga Gizi	76		
					10. Tebaga promosi kesehatan dan	51		

					ilmu perilaku			
					11. Tenaga Kefarmasian	435		
					12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	96		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita DM yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	30.315	Desember 2024	1 . Obat Diabetes Melitus	30.315	Desember 2024	770.566.000
					2 . Fotometer atau Glukometer	644		
					3 . Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	30.315		
					4 . Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	30.315		
					5 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30.315		
					6. Dokter	317		
					7. Bidan	763		
					8. Perawat	1.492		
					9. Tenaga Kefarmasian	435		
					10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	96		
					11. Tenaga Gizi	76		
					12. Teknis Medis (ATLM)	179		
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran ODGJ yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	2.599	Desember 2024	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2.599	Desember 2024	19.950.000
					2 . Penyediaan Psikofarmaka	800		
					3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.599		
					4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.599		
					5 . Media Komunikasi, Informasi,	2.599		

					Edukasi (KIE)			
					6. Dokter	22		
					7. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	12		
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	10		
					9. Tenaga Profesional	1		
11	Pelayanan Kesehatan Orang TerdugaTuberkulosis	Jumlah penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita TB yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	14.069	Desember 2024	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	14.609	Desember 2024	901.067.600
					2 . Reagen Zn TB	14.609		
					3 . Masker bedah dan Masker N95	14.609		
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	14.609		
					5 . Katrid tes cepat molekuler	14.609		
					6 . Formulir pencatataFormulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14.609		
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	14.609		
					8 . Tuberkulin	411		
					9. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	330		
					10. Perawat	1.492		
					11. Tenaga Kefarmasian	435		
					12. Tenaga kesehatan masyarakat	96		
					13. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	179		
					.14. Radiografer	42		
					15. Kader Kesehatan	6.443		
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang	26.474	Desember 2024	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster,	26.474	Desember 2024	145.280.000

	Terinfeksi HIV	mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			Banner)			
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	26.474		
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	26.474		
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26.474		
					5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	334		
					6. Perawat	1.492		
					7. Bidan	763		
					8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	179		
					9. Tenaga kesehatan masyarakat	96		
					10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	8		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

4.2.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.696	19.696	100,00	1.112.594.000	991.018.351	89,07

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.021	17.021	100,00	894.635.800	770.523.906	86,13
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.924	16.924	100,00	136.391.200	127.629.500	93,58
4	Pelayanan Kesehatan Balita	90.219	90.219	100,00	57.244.000	55.964.820	97,77
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	41.818	41.818	100,00	430.620.000	350.151.730	81,31
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	812.187	802.353	98,79	155.359.300	154.932.300	99,73
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	148.090	148.090	100,00	22.366.000	18.650.000	83,39
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	175.015	169.595	96,90	15.750.000	13.514.380	85,81
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.315	30.315	100,00	770.566.000	675.352.600	87,64
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	2.599	2.599	100,00	19.950.000	15.455.400	77,47
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.069	14.069	100,00	901.067.600	840.151.501	93,24
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	26.474	26.474	100,00	145.280.000	82.699.700	56,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan IP SPM dan rekapitulasinya diuraikan pada Tabel 4.2.5.1 dan 4.2.5.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten
Jepara Tahun 2024

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7

	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.68 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19696	19696	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	1970	1970	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	3545280	3545280	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	19696	19696	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	19696	19696	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	19696	19696	0	100.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	2954	2954	0	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	19696	19696	0	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	19696	19696	0	100.00 %
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	19696	19696	0	100.00 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19696	19696	0	100.00 %
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1313	1313	0	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	326	326	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1492	1492	0	100.00 %

	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	763	763	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	19696	19696	0	100.00 %

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17021	17021	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	17021	17021	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	17021	17021	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	17021	17021	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	17021	17021	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	326	326	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	763	763	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %

	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)					
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %

3. Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16924	16924	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	16924	16924	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	16924	16924	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	16924	16924	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	16924	16924	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	16924	16924	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16924	16924	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16924	16924	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	329	329	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	51	51	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	6443	6443	0	100.00 %

4. Pelayanan Kesehatan Balita

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	90219	90219	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	90219	90219	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	90219	90219	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	90219	90219	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	21441	21441	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	69562	69562	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	22555	22555	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	15037	15037	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	22555	22555	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	22555	22555	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	11277	11277	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	22555	22555	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	11277	11277	0	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	90219	90219	0	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	90219	90219	0	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	90219	90219	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	317	317	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %

	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	3233	3233	0	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	6443	6443	0	100.00 %

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	41818	41818	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	41818	41818	0	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	41818	41818	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	41818	41818	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	41818	41818	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	41818	41818	0	100.00 %

	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)					
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	14901	14901	0	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	644	644	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	14901	14901	0	100.00 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	41818	41818	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	5227	5227	0	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	405	405	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	64	64	0	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	6443	6443	0	100.00 %

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.03 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	812187	802353	9834	98.79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.87 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.36 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	812187	802353	9834	98.79 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	644	644	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	644	644	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	32488	32095	393	98.79 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	812187	802353	9834	98.79 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	812187	802353	9834	98.79 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	812187	802353	9834	98.79 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	812187	802353	9834	98.79 %
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	644	644	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	812187	802353	9834	98.79 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	32362	31970	392	98.79 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	812187	802353	9834	98.79 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	81219	80236	983	98.79 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	317	317	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %

	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	915	915	0	100.00 %

7. **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	148090	148090	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	644	644	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	644	644	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	644	644	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	148090	148090	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	148090	148090	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	148090	148090	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	148090	148090	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	317	317	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %

	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	6443	6443	0	100.00 %

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.52 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	175015	169595	5420	96.90 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.79 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.97 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	175015	169595	5420	96.90 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	175015	169595	5420	96.90 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	644	644	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	175015	169595	5420	96.90 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	175015	169595	5420	96.90 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	317	317	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %

	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	51	51	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30315	30315	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	30315	30315	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	644	644	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	30315	30315	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	30315	30315	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	30315	30315	0	100.00 %

	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)					
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	317	317	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	179	179	0	100.00 %

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2599	2599	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	2599	2599	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Jenus	800	800	0	100.00 %

	(pengobatan/medikasi)					
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2599	2599	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2599	2599	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	2599	2599	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	12	12	0	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	10	10	0	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14069	14069	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan	Paket	14069	14069	0	100.00 %

	Edukasi (KIE)					
	2 . Reagen Zn TB	Kit	14069	14069	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	14069	14069	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	14069	14069	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	14069	14069	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	14069	14069	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	14069	14069	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	411	411	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	330	330	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	435	435	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	179	179	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	42	42	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	6443	6443	0	100.00 %

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	26474	26474	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26474	26474	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	26474	26474	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26474	26474	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	26474	26474	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	334	334	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	763	763	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1492	1492	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	179	179	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	96	96	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	8	8	0	100.00 %

Tabel 4.2.3.2

Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80	20	100	Tuntas Paripurna

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80	20	100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80	20	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80	20	100	Tuntas Paripurna
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79,03	19,87	98,90	Tuntas Utama
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80	20	100	Tuntas Paripurna
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	77,52	19,79	97,32	Tuntas Utama
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80	20	100	Tuntas Paripurna
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	80	20	100	Tuntas Paripurna
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80	20	100	Tuntas Paripurna
12.	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Kesehatan				99,68	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang kesehatan tahun 2024 sebesar 99,68% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yang mencapai target 100% ada 10 (sepuluh) indikator, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita DM, pelayanan kesehatan ODGJ berat, pelayanan kesehatan orang terduga TB dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun yang mempunyai capaian kurang dari 100% ada 2 (dua) indikator yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM

Bidang Kesehatan pada tahun 2024 terdiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	INDIKATOR SPM	ANGGARAN		
		DAK	APBD	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	740.774.000	371.820.000	1.112.594.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	829.245.800	65.390.000	894.635.800
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.003.200	32.388.000	136.391.200
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	57.244.000	57.244.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	409.978.000	20.642.000	430.620.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	155.359.300	155.359.300
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	-	22.366.000	22.366.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	15.750.000	15.750.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	750.000.000	20.566.000	770.566.000
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	-	19.950.000	19.950.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	893.047.600	8.020.000	901.067.600
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	102.850.000	42.430.000	145.280.000
JUMLAH		3.829.898.600	831.925.300	4.661.823.900

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

Alokasi anggaran pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.661.823.900,-. Sumber anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang urusan Kesehatan pada tahun 2024 berasal dari APBD dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

4.2.5 Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan kesehatan dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.5
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Jepara	Puskemas	22	Dokter spesialis kebidanan	9
		Rumah Sakit	6	Dokter spesialis paru	2
		Klinik	63	Dokter spesialis penyakit dalam	11
				Dokter spesialis kulit dan kelamin	6
				Dokter speasialis anak	12
				Dokter	317
				Dokter Gigi	88
				Perawat	1.492
				Bidan	763

				Ahli Gizi	435
				Tenaga Kesmas	51
				Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	76
				Penata Rontgen	96
				Kader Kesehatan	179

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM bidang kesehatan baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten JeparaTahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
		1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan 2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil. 3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.	1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM. 2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan. 3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.
EKSTERNAL			
		1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM dari anggaran BLUD 2. Belum ada monitoring dan evaluasi	1. Integrasi anggaran BLUD spesifik untuk SPM

		rutin penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten	2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2024

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

A. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.3.2
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Presentase rumah tangga yang terlayani air minum layak	2156	Desember 2024	Presentase rumah tinggal yang dapat mengakses air bersih	2156	Desember 2024	9.975.336.820
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase rumah tangga yang terlayani sanitasi	1285	Desember 2024	Presentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	1285	Desember 2024	12.403.148.680

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

Target yang disampaikan pada data diatas merupakan target yang diharapkan dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2024 dan anggaran yang disampaikan merupakan anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp. 9.975.336.820 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 12.403.148.680.

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.3.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	2156	2156	100	9.975.336.820	9.963.630.480	99,88
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	1285	1285	100	12.403.148.680	12.271.795.409	98,94

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

Capaian layanan dasar urusan Bidang Pekerjaan Umum dalam hal ini Air Minum dan Sanitasi merupakan data capain Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Jepara hingga tahun 2024 dengan asumsi penerima layanan yaitu Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara yang di targetkan terlayani tuntas. Adapun perhitungan IP SPM dan rekapitulasinya diuraikan pada Tabel 4.3.3.1 dan 4.3.3.2 sebagai berikut :

Tabel 4.3.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten
Jepara Tahun 2024

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2156	2156	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2156	2156	0	100.00 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2156	2156	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7

2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1306	1306	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1285	1285	0	100.00 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	1285	1285	0	100.00 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1285	1285	0	100.00 %

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.3.3.2

Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Pekerjaan Umum				100%	Tuntas Paripurna

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.3.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.975.336.820
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	12.403.148.680

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

Alokasi anggaran yang disampaikan merupakan alokasi anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp. 9.975.336.820 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 12.403.148.680

4.3.5 Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	Jumlah (Orang)
	Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Jepara	
1.	Kepala Bidang dan Sub Koordinator	3
2.	Staf	31
4.	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	19
	J U M L A H	53

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

Personil yang disampaikan pada tabel diatas merupakan karyawan ASN maupun Non ASN dan Tenaga Fasilitator Lapangang (TFL) di bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :

Tabel 4.3.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Eksternal	Kurang koordinasi antar stakeholder dapat menimbulkan data yang kurang valid	Antara Stakeholder pelaksana SPM harus lebih intens dalam melaksanakan koordinasi hingga ke tingkat desa.
2	Internal	Perhitungan jumlah target harus disepakati seluruh pihak	Target yang disampaikan pada laporan SPM sesuai arahan dari Kemendagri yaitu KK/Unit yang dapat terbangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran berjalan.

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2024

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara adalah 100%, dapat dilihat pada tabel 4.4.2.

Pelaksanaan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten sebanyak 3 (tiga) unit (100%) yang pelaksanaannya di Tahun 2024 (tahun berjalan) melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di BPKAD Kabupaten Jepara.

Sedangkan untuk pelaksanaan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 12 unit/orang melalui bantuan dari Disperkim Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.4.2 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

Urusan Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	12 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan Jasa	3 unit (100%) (sesuai dengan jumlah unit rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	60.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	48 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan Jasa	12 unit (100%) (sesuai dengan jumlah unit rumah yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	480.000

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

4.4.3 Realisasi

Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan SPM Bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah 100% dengan kategori indeks SPM Tuntas Paripurna.

Tabel 4.4.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan
Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp. 000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (100%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3	3	100 %	60.000	60.000	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12	12	100 %	480.000	480.000	100 %

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.4.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar
Kabupaten Jepara Tahun 2024

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	

			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12	12	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	3	3	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48	48	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	12	12	0	100.00 %

	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	12	12	0	100.00 % 100.00
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.4.3.2
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Program Pemerintah Daerah	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Perumahan Rakyat				100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat pada kegiatan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024 dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Disperkim Provinsi Jawa Tengah.
Rincian alokasi anggaran dapat dilihat pada lampiran Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana dan lampiran Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Tabel 4.4.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO.	KEGIATAN LAYANAN	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA (Rp.000)	SUMBER PEMBIAYAAN		
					TAHUN 2024		
					APBD (Rp.000)	DAK	LAINNYA (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rehabilitasi	3	60.000	60.000		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan rumah layak huni	12	480.000			480.000
Jumlah *)			15	540.000	60.000		480.000

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebanyak 11 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	STATUS	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PNS	Magister (S2)	3 Orang
2	PNS	Sarjana (S1)	4 Orang
3	PPPK	Sarjana (S1)	1 Orang
4	THL	Sarjana (S1)	3 Orang
TOTAL			11 Orang

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 4.4.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan
Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL	
1	Bencana yang terjadi pada skala kecil misalnya kebakaran, rumah roboh karena angin puting beliung	dilakukan penanganan dengan menggunakan dana BTT dan bisa tuntas ditahun terjadinya bencana
II	EKSTERNAL	
1.	Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana untuk tingkat Kabupaten
2.	Perlu penyamaan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Rakor bersama stakeholder terkait untuk merumuskan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
3.	Belum adanya data landbanking yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi	Melaksanakan pendataan atau pencarian lahan yang sesuai dengan peruntukkannya

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2024

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasarnya adalah Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator pencapaian :

a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :

- Standar Operasional Satpol PP;
- Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebencanaan meliputi :

- Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana;
- Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
- Peningkatan kapasitas Personil/ Sumber Daya Manusia
- Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

c. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebakaran meliputi :

- Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan;
- Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi

- Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran
- Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang berdampak kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100%. Sedangkan target capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.5.2
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2024
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan perkada	80 orang	Setiap Tahun	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	28 unit	setahun	5.023.901.871
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	6 dokumen	setahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada	60 orang	setahun	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0	setahun	

					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0		
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1,192,811 orang	Setiap Tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	setahun	200,000,000
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	1192811 Orang	setahun	
					Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	1192811 Orang	setahun	
					Peengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public per jenis bencana	34 unit	setahun	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperolelh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140 orang	Setiap Tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana	163 unit	setahun	145.415.000
					Peningkatan kapasitas personil//Sumber Daya Manusia	140 orang	setahun	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	17.565 orang	Setiap Tahun	Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1 Posko	setahun	128,000,000

					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4759 orang	setahun	
					Melakukan respon cepat darurat bencana	2 dokumen	setahun	
					Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit, KLB Wabah zoonosis prioritas	0 layanan	setahun	
					Pelaksanaan, Pemcarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12 Layanan	setahun	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96 orang	Setiap Tahun	Tingkat waktu tanggap (resnponse time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	96 layanan	setahun	228.000.000
					Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2 dokumen	setahun	
					Sarana prasarana damkar, penyelamatan dan evakuasi	17 unit	setahun	
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM	1 orang	setahun	
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0	setahun	
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak	1 layanan	setahun	

					kebakaran			

Sumber : Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kabupaten Jepara

4.5.3 Realisasi

Untuk realisasi capaian penerapan SPM dan realisasi mutu pelayanan SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4.5.3
Realisasi Capaian Penerapan SPM
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2		4	5	6	7	8
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	80 orang	80 orang	100	5.023.901.871	4,977,966,003	99.09%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1,192,811 orang	1,192,811 orang	100	200.000.000	199.324.050	99,66
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140 orang	140 orang	100	210.000.000	207.751.786	98,93
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	17.565 orang	17.565 orang	100	55.000.000	54.240.000	98,62
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96 orang	96 orang	100	228.000.000	223.882.304	98,19

Tabel 4.5.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar
Kabupaten Jepara Tahun 2024

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	80	80	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	28	28	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	60	60	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %

	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)					
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Orang	0	0	0	100.00 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1192811	1192811	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 3320-20240718121844KRB JEPARA 2023-2027.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1192811	1192811	0	100.00 %

	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	40	40	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	24	24	0	100.00 %
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	140	140	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	Unit	163	163	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	110	110	0	100.00 %

	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
4 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17565	17565	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	17565	17565	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB	Layanan	0	0	0	100.00 %

	kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	12	12	0	100.00 %
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	96	96	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	96	96	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	17	17	0	100.00 %

	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)					
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.5.3.2
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	80	16.67	96,67	Tuntas Utama
2.	Pelayanan informasi rawan bencana.	80	20	100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	80	20	100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80	20	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Trantibumlinmas				98,89%	Tuntas Utama

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2024 mencapai sebesar 98,89% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian

penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Untuk 5 (lima) indikator jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 4 jenis pelayanan SPM mencapai target 100% yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sedangkan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban mencapai target 96,67%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 5.915.454.671,-dengan rincian anggaaran sebagai berikut:

Tabel 4.5.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Jepara Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum		5.023.901.871	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		200,000,000	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiaposiagaan terhadap Bencana		292,000,000	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana		97,002,800	
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		74,550,000	
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran		228.000.000	

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 50 (Lima Puluh) orang. Sedangkan personil yang mendukung urusan sub kebencanaan daerah sebanyak 39 orang, dan untuk personil yang mendukung sub urusan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 35 orang. Personil BPBD Kabupaten Jepara pada tahun 2024 yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana daerah sebanyak 39 orang.

Rincian personil pendukung penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan
Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. 2. 3.	S2 S1/D4 SMA	7 orang 18 orang 25 orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		
1. 2. 3.	S2 S1/D4 SMA	1 orang 8 orang 26 orang
Urusan Bencana Daerah		
1. 2. 3. 4.	S2 S1/D4 D3 SMA	0 orang 17 orang 2 orang 20 orang
	JUMLAH	124 orang

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, antara lain :

Tabel 4.5.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jepara Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Kesulitan akses dalam mendapatkan data kependudukan by name by addres	Perlu pemetaan daerah rawan bencana

2.	Internal	Keterbatasan sarana dan prasarana , untuk menjalankan tugas – tiugas pelayanna publik dapat menghambat kelancaran oprasional dan pencapaian target	Memanfaatkan dan melakuakn pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasaran yang ada harus menjadi prioritas agar fasilitas tetap berfu ngsi dengan baik dan tidak cepat rusak
3.	Internal	terjadi kebijakan yang dapat mempengaruhi kelancaran oprasional dan pencapain target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal . hal in sering terjadi akibat kebijakan penghematan atau perubahan prioritas anggaran	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengurangi pemborosa , seperti melakukan pembelian barang /jasa yang lebih hemat biaya namun tetap memenuhi standar kualitas
4.	Internal	Kurangnya pemahaman dalam pengisisan laporan SPM , sehingga untuk perbidang urusan perlu adanya penyatuan presepsi dalam penyususnan pelaporan SPM .	Rakor terkait penyamaan presepsi dalam penyusunan laporan SPM

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2024

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar di bidang sosial yaitu:

m. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
n. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
o. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
p. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
q. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial harus 100% (seratus persen).

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM sosial tahun 2024. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target target (jumlah orang yang akan terlayani).

Tabel 4.6.2
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negera penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.862	Desember 2024	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	1.862	Desember 2024	634.074.184
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.556	Desember 2024	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	1.556	Desember 2024	255.096.667
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	994	Desember 2024	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	994	Desember 2024	141.786.328

		dasar di luar panti						
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negera/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	34	Desember 2024	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	34	Desember 2024	9.688.322
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	402	Desember 2024	Penyediaan Permakanan	402	Desember 2024	1.120.000.000

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

4.6.3 Realisasi

Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	1.862	1.862	100,00	634.074.184	634.074.184	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	1.556	1.556	100,00	255.096.667	255.096.667	100,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	994	994	100,00	141.786.328	141.786.328	100,00
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	34	34	100,00	9.688.322	9.688.322	100,00
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	402	402	100,00	1.120.000.000	1.120.000.000	100,00

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.6.3.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar
Kabupaten Jepara Tahun 2024

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1862	1862	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	931	931	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	448	448	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	191	191	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %

	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	20	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	270	270	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1556	1556	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	778	778	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	592	592	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan	Orang	10	10	0	100.00 %

	keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	170	170	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	994	994	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	497	497	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	416	416	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	75	75	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	34	34	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	17	17	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	9	9	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100.00 %

	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	402	402	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	263	263	0	100.00 %

	(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)					
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40	40	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	7	7	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	42	42	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	50	50	0	100.00 %

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

Tabel 4.6.3.2
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Sosial Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	80	20	100	Tuntas Paripurna

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	80	20	100	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	20	100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	80	20	100	Tuntas Paripurna
IP SPM Bidang Sosial				100,00%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang sosial tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, yang mencapai target 100% ada 5 (lima) indikator, yaitu pelayanan sosial pada disabilitas, pelayanan sosial pada anak terlantar, pelayanan sosial pada lansia, pelayanan sosial pada pengemis/gelandangan. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
1	Program Rehabilitasi Sosial		
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS			
1		Layanan data dan pengaduan	8.376.068
2		Penyediaan permakanan	104.751.115
3		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	
4		Penyediaan sandang	
5		Penyediaan alat bantu	412.600.000
6		Penyediaan perbekalan kesehatan	
7		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	61.312.000
8		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	45.035.000
9		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	
10		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
11		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan	

		keluarga	1.000.000
12		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1.000.000
13		Layanan rujukan	
REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR			
1		Layanan data dan pengaduan	6.999.550
2		Penyediaan permakanan	138.421.117
3		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	
4		Penyediaan sandang	
5		Penyediaan perbekalan kesehatan	
6		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30.656.000
7		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	73.020.000
8		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	
9		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
10		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	3.000.000
11		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.000.000
12		Layanan rujukan	
REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR			
1		Layanan data dan pengaduan	4.471.435
2		Penyediaan permakanan	97.268.893
3		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	
4		Penyediaan sandang	
5		Penyediaan alat bantu	
6		Penyediaan perbekalan kesehatan	
7		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	
8		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	34.046.000
9		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	
10		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
11		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	3.000.000
12		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.000.000
13		Layanan rujukan	
REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN PENGEMIS TERLANTAR			
1		Layanan data dan pengaduan	153.946
2		Penyediaan permakanan	2.104.375
3		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	
4		Penyediaan sandang	
5		Penyediaan perbekalan kesehatan	
6		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	
7		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan pengemis terlantar	1.431.000
8		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	
9		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
10		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	3.000.000

11		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.000.000
12		Layanan rujukan	
2	Program Penanganan Bencana		
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
1		Penyediaan permakanan	170.000.000
2		Penyediaan sandang	10.000.000
3		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10.000.000
4		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	920.000.000
5		Pelayanan dukungan Psikososial	10.000.000

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan sosial dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang
Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	
		L	P
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial	8	7
2.	TKSK	10	6
3.	PKH	64	82
4.	Tagana	25	7
	J U M L A H	209	

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Sosial, antara lain:

Tabel 4.6.6
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Internal	Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PMKS lebih lanjut
		jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS.	Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PMKS lebih optimal Bantuan alat bantu untuk disabilitas

			yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas
2		Terdapat kebijakan yang mempengaruhi pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3		Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS
1	Eksternal	1. Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas 2. Bantuan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usaha disabilitas yang masih kurang	Dilakukannya proses pendataan, identifikasi dan pembuatan database penyandang disabilitasuntuk perencanaan mencukupi bantuan alat bantu dan menunjang pemberian bantuan pelatihan sesuai kebutuhan kategori disabilitas
2		Data anak terlantar dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut	Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2024

BAB V
PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahn yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, LPPD juga memuat tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Selain itu, buku LPPD ini juga memuat tentang Capaian Kinerja Makro, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target rencana pembangunan daerah, analisis efisien penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, 20 Maret 2025

BUPATI JEPARA

H. WITIARSO UTOMO, S,E.

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
LPPD TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	**Pendidikan**	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	37.665 -------- x 100 % 39.726	94,81
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	123.443 ---------- x 100 % 123.443	100
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan	%	58.577 --------- x 100 % 63.573	92,14
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	%	3.156 ---------- x 100 % 3.483	90,61

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			pendidikan kesetaraan.	menengah pada kabupaten/Kota yang bersangkutann			
2.	**Kesehatan**	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten ---------- x 1000 % Jumlah Penduduk kabupaten/Kota.	%	12.671 ---------- x 1000 1.283.687	0,98
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS kabupaten/Kota	%	6 ---------- x 100 6	100
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/Kota	%	17.174 ---------- x 100 17.174	100
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/Kota	%	17.021 ---------- x 100 17.021	100
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/Kota.	%	16.924 ---------- x 100 16.924	100
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/Kota	%	90.219 ---------- x 100 90.219	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/Kota	%	187.016 ---------- x 100 187.016	100
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/Kota	%	826.690 ---------- x 100 826.690	100
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/Kota	%	162.578 ---------- x 100 162.578	100
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/Kota	%	175.015 ---------- x 100 175.015	100
		1.b.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/Kota	%	30.315 ---------- x 100 30.315	100
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/Kota	%	2.599 ---------- x 100 2.599	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/Kota	%	14.609 ---------- x 100% 14.609	100
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar ---------- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/Kota.	%	26.474 ---------- x 100% 26.474	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten /Kota (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten /Kota (ha)	%	10.677,12 ------- X 100% 10.677,12	100
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten (WS) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten / Kota (ha)	%	1855,63 ------- X 100% 1855,63	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten / Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota	%	28.247 ---------- X 100% 28.247	100
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ---------- x 100 % Jumlah Proyeksi total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	%	389.201 ---------- X 100% 402.129	96,79
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestiK	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten	%	307.655 ---------- X 100% 402.129	76,51
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota.	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	%	322 -------- X 100% 322	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.c.7	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota.	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap ---------- x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	%	753,109 ---------- X 100% 854.027	88,18
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	%	81 -------x 100% 310	26,12
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	311 --------- X 100% 311	100
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**	1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024	%	3 x 100% 3	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	%	0+0+12 / 12 x 100%	100
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	%	2,22 Ha / 67,73 Ha x 100%	3.2777
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----------x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	%	9.116 / 365.673 x 100%	2,493
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	%	5.413 / 5.413 x 100%	100
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang di tangani ----------x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	6 / 6 x 100%	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.	%	8 --------- x 100% 8	100
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ---------- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	%	95.919 --------- x 100% 95.919	100
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	140 --------- x 100% 140	100
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ---------- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.	%	140 --------- x 100% 140	100
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	64 --------- x 100% 78	82,05

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/Kota			
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktutanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah seluruh kejadian kebakaran .	Menit	948 --------- x 100% 78	12,15menit
6.	**Sosial**	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	2.223 ---------- x 100% 2.223	100
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten /Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	%	348 -------- x 100% 348	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota.			
7.	**Tenaga Kerja**	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	9 ---------- x 100% 9	100
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	1.169 ---------- x 100% 164.883	0,71
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja	%	25.482.070.000.000.00, ---------- x 100% 164.883	154,546375,31
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100 % Jumlah Perusahaan	%	57 ----------x 100% 430	13,26
		2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	%	10.817 ----------x 100% 26.195	41,29

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional APBD ---------- x 100 % Jumlah seluruh belanja operasional APBD	%	177.535.539.332 ---------- x 100% 2.067.577.666.737	9
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi ---------- x 100 % jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	%	16 ----------x100% 16	100
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100 % Jumlah penduduk perempuan.	%	8 ----------x100% 325.450	2,45
9.	**Pangan.**	2.h.1	Persentase ketersediaan cadangan pangan.	Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten / Kota ---------- x 100 % Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota.	%	85,36 ton ---------- x 100% 42 ton	203,24
10.	**Pertanahan**	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100 %. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	1.252.043,08 M2 ---------- x 100% 1.252.043,08 M2	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			diterbitkan.				
		2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. ---------- x 100 %. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	0 ---------- x 100% 1	tdi
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----------x 100% Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan.	%	1.252.043,08 M2 ---------- x 100% 1.252.043,08 M2	100
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente.	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ---------- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform.	%	0 ---------- x 100% 1	tdi
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ---------- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan.	%	0 ---------- x 100% 1	tdi

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan.	%	0 ---------- x 100% 1	Tdi
11.	**Lingkungan Hidup.**	2.J.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%).	%	IKLH = 63,16 IKA = 49,00 IKU = 87,42 IKTL = 42,61	IKLH = 63,16 IKA = 49,00 IKU = 87,42 IKTL = 42,61
		2.J.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ---------- x 100 % Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota .	%	86.43,98 ---------- x 100% 157.915,99	54,73
		2.J.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Kota ---------- x 100 % Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan.	%	18 ---------- x 100% 25	72
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	2.K.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP ---------- x 100% Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas	%	950.447 ---------- x 100% 950.014	99,95

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2.K1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0-17 tahun.	%	222.971 ---------- x 100% 328.323	67,91
		2.K.1.3	Kepemilikan Akta Kelahiran.	Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akte kelahiran ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0 – 18 tahun	%	340.623 ---------- x 100% 342.791	99,37
		2.K.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ---------- x 100 % Jumlah OPD.	%	11 ---------- x 100% 25	44 (Kecamatan tidak termasuk)
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**	2.I.1	Persentase pengentasan desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	%	0 ------- x 100% 1	0
		2.I.2	Persentase peningkatan status desa mandiri.	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2024).	%	2 ------- x 100% 62	3,32

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total) .	5∑ASFR .		2,03	2,03
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur.		145.214 ----------x100% 211.993	68,50
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur.		16.179 ----------x100% 211.993	7,6
15	**Perhubungan**	2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	Rasio konektvitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Trayek / Lintas	1 + 0,64 2	0.82 trayek/ lintas
		2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota.	V/C ratio di jalan kabupaten/Kota	LoS	0,21	0,21
16	**Komunikasi dan Informatika**	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	33 --------- x 100% 42	78,57

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah Layanan Publik.	%	14 --------- x 100% 14	100
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya ---------- x 100% Jumlah penduduk usia 15-64	%	884.240 ---------- x 100% 884.240	100
17	**Koperasi dan UKM**	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi.	%	170 ------- x 100% 326	52,15
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	8.868 ---------- x 100% 78.023	11,37
18	**Penanaman Modal**	2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2024 - jumlah investasi tahun 2023) di kabupaten. ---------- x 100%	%	8.273.369.474.586 - 8.928.971.312.243 ---------- x 100%	-7,34

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah investasi tahun 2023 di kabupaten).		8.928.971.312.243	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ---------- x 100.000 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten.	%	34.036 ---------- X 100% 289.834	11,74 %
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	%	132.725 --------- X 100% 289.834	45,79%
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	52	52
20	**Statistik**	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	26 ---------x 100% 26	100
		2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	26 ---------x 100% 26	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
21	**Persandian**	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian	%	630 --------x 100% 645	97,67
22	**Kebudayaan**	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang di tetapkan	%	40 --------x 100% 40	100
23	**Perpustakaan**	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat.		TGM = (FM + DM + JBB+FAI+DAI)/5 FM : Frekuensi Membaca DM : Durasi Membaca JBB : Jumlah Bahan Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet TGM = 86,83+68,53+78,92+87,83 +71,27 5 = 78,24	78,24

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM).		$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} x\ 100$ Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) + Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)+ Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) + Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)+ Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)+ Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) + Jumlah Pemustaka (UPLM7) x 100 / 7 (0,4907+0,2743+0,1617 +0,3526+1,0000+1.0000 +1,0000) x 100 / 7 **4,2793/7 = 61,13**	61,13

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
24	**Kearsipan.**	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.	T = (a + i + s + j)/4.	%	T = 100 % + 89,21 % + 100 % + 0,15 % / 4 T = **77,34 %**	77,34
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	T = (m + b + g + a + c + i)/6	%	T= 100%+100%+100%+100%+100%+0% / 6 =83,33	83,33
Urusan Pilihan.							
25	**Kelautan Perikanan**	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP).	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten / Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan x 100	%	59.128.342 ton / 58.966.225 ton 100 %	100,275

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
26	**Pariwisata**	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	(Jumlah wisatawan tahun 2024 – Jumlah wisatawan tahun 2023) ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2023	%	19.928– 15.251 = 4.677 ---------- x 100% 15.251	30,66
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	(Jumlah wisatawan tahun 2024 – Jumlah wisatawan tahun 2023) ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2024	%	2.058.854 – 1.964.135 = 94.719 ---------- x 100% 1.964.135	4,82
		3.b.3	Tingkat hunian akomodasi.	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	%	123.035 ---------- x 100% 387.265	31,77
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) ---------- x 100% Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah).	%	1.898,34 ---------- x 100% 40.564,22	4,68
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2024 ---------- x 100% Realisasi PAD Tahun 2024	%	29.223.238.091 ---------- x 100% 497.777.936.704	5,87

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
27	**Pertanian**	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton) ---------- x 100% Luas Panen (ha).	Ton/ha	554,980,09 ton ---------- x 100% 66,996,76Ha	8,28 ton/ha
		3.c.1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2024) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2023) ---------- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2023)	%	-3061 ---------- x 100% 3.152	-97,11
28	**Kehutanan.**						Tidak Ada
29	**ESDM**	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota.	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. ---------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.		0 ---- x 100% 1	Tdi
30	**Perdagangan**	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten.	%	111 ------ x 100% 111	100
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk.	Realisasi ---------- x 100% RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).	%	20.678.979 ---------- x100% 24.141.845	85,6

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	%	3.304 ---------- x 100% 3.304	100
31	**Perindustrian**	3.g.1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2023 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2022) ---------- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023	%	13.462-10.551 ---------- x 100% 21585	27,58
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	pencapaian Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal	%	1.(0 X20%) =0 2.(0 X20%) =0 3.(0 X20%) =0 4.(0 X20%) =0 5.(0 X20%) =0	Tdi Perda RPIK Masih Dalam Proses

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 30%) = 30%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 30%) = 27% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 30%) = 24% ; dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 30%) = 30%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 30%) = 27% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 30%) = 24% ; dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 15%) = 15%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 15%) = 13,5%; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 15%) = 12% ; dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 5%) = 5%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 5%) = 4,5% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 5%) = 4% ;			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; dst			
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan.	%	88 ---------- x 100% 179	49

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	%	0	0
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	%	0	0
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini 1. Keterkinian informasi industri dengan batas waktu 0-6 (50 %) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25 %) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2. Kelengkapan informasi industri meliputi : - Iformasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	=(1+2) =(50%+(10%+10%+10%+10%10%)	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				- Informasi bahan bakar/energy (10%) - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkaitan informasi industri (1 +2).			
32	**Transmigrasi**	3.h			kk	Karena Pemerintah Kab. Jepara tidak mendapatkan kuota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	0
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) ---------- x 100% Jumlah APBD (realisasi)	%	999.927.945.735 ---------- x 100% 2.447.771.976.813	40.85
		4.a.2	Rasio PAD.	Jumlah PAD ---------- x 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	%	497.777.936.704 --------- x 100% 2.549.837.564.631	19,52

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3	3
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3	3
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) ---------- x 100% Jumlah belanja APBD (realisasi)	%	1.721.120.357.927 ---------- x 100% 2.447.771.976.813	70,31
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir).	10 kali.	Bukti piagam WTP (tahun 2014– 2023)	WTP. (Tahun 2024 masih proses)
34	**PENGADAAN**	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 ---------- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024	%	0 --------- x100% 52	0
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif ---------- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif	%	4.505 --------- x 100% 5.284	85,26

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4.b.3	Rasio Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ---------- x 100% total belanja operasi dan modal	%	384.692.161.716,06 ---------- X 100% 703.515.180.427	54,68
		4.b.4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Jumlah PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKN dan Koperasi tahun (n-1) ---------- x 100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri umkm dan koperasi	%	(342.335.000.000-549.104.000.000)=-206.769.000.000,00 ---------- X 100% 549.104.000.000,00	-37,65
35	**KEPEGAWAIAN**	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT Keatas ---------- x 100% Seluruh jumlah pegawai	%	1.215 --------- x 100% 1.900	63,95
		4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100% Jumlah seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	339 ---------- 100% 1.900	17,84
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- X 100% seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	%	281 ---------- x 100% 339	82,89

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
36	**MANAJEMEN KEUANGAN**	4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ---------- X 100% Total Belanja APBD	%	2.447.771.976.813 ---------- - x 100% 2.575.605.896.300	4,96
		4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ---------- X 100% Total PAD dalam APBD	%	497.777.936.704 ---------- - x 100% 466.309.174.300	6,75
		4.d.3	Assets management.	Jumlah Asset Manajemen. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya
		4.d.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ---------- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	%	173.972.107.859 ---------- x 100% 2.431.682.976.394	7,15
37	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)**	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. ---------- X 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	2.447.797.224.576 ---------- x 100% 2.563.589.427.118	95,48

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. ---------- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	%	12 ---------- x 100% 12	100